



Jurnal

Sosial Demokrasi



BURUH DAN POLITIK

**Tantangan dan Peluang
Gerakan Buruh Indonesia
Pascareformasi**



Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham ‘demokrasi ekonomi’, Indonesia yang berdasar pada ‘hak sosial rakyat’. Belum terpenuhinya hak sosial warga negara ini dikarenakan terjadinya pergeseran paham dari negara kesejahteraan ke paham liberal, dimana negara lebih mengutamakan pentingnya peran pasar. (Mohammad Hatta)

Jurnal
Sosial Demokrasi



Jurnal

Sosial Demokrasi

Daftar Isi

Editorial	
Buruh dan Politik <i>Labour and Politics</i>	4
Transkrip Diskusi	
BURUH DAN POLITIK: TANTANGAN DAN PELUANG GERAKAN BURUH INDONESIA PASCAREFORMASI	16
Resume Diskusi	
MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL POLITIK BURUH	40
Artikel	
Kebebasan Berserikat: Jauh Panggang dari Api	44
Artikel	
MENGGESER JEBAKAN MENJADI PELUANG: PENGUATAN GERAKAN BURUH INDONESIA DALAM ARENA PASAR BEBAS	50
Artikel	
BURUH DAN POLITIK	54
Artikel	
Tuntutan Reformasi Jaminan Sosial: Transformasi Gerakan Buruh Menuju Gerakan Sosial dan Politik?	62
Profile	
TRADE UNION RIGHTS CENTRE (TURC)	66
Resensi	
Meretas Kesadaran, Merajut Ideologi	70
Resensi	
Wan Oji Sudah Pindah	78

Dewan Redaksi

Pemimpin Redaksi :
Amir Effendi Siregar
Wakil Pemimpin Redaksi:
Ivan Hadar
Dewan Redaksi :
Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito
Martin Manurung

Pelaksana Redaksi

Azman Fajar
Puji Riyanto
Launa

Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358

Ilustrasi*

Kuss Indarto
Friedrich-Ebert-Stiftung

Cover dan Layout

Malhaf Budiharto

Penerbit**

Perkumpulan Sosdem Indonesia

ISSN: 2085-6415

*) Dilarang mengkopi dan memperbanyak ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung

***) Untuk mendapatkan edisi softcopy silakan lihat di www.fes.or.id



BURUH DAN *LABOUR AND*

Di Indonesia, eksistensi (gerakan) buruh—dan beragam aktivitas politik yang menyertainya—tumbuh bersamaan dengan kehadiran awal sistem kolonial, terutama melalui kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah Hindia Belanda tahun 1870 yang dikenal sebagai era *cultuurstelsel*. Guna menopang sistem kapitalisme kolonial ala *cultuurstelsel* ini, pemerintah Hindia Belanda menyusun serangkaian paket kebijakan liberal: pembukaan lahan perkebunan, pendirian pabrik, pembangunan infrastruktur, eksplorasi pertambangan, mengundang investasi asing, serta memobilisir ribuan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan infrastruktur yang diproduksi oleh sistem kolonial Belanda.

Liberalisasi ekonomi pada akhirnya menghasilkan sebuah kelas sosial baru bernama buruh. Transformasi sosial rakyat Hindia Belanda praktis menghadirkan kantong-kantong industri baru, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta masuknya beragam ideologi Barat (nasionalisme, sosialisme, dan marxisme) yang dibawa oleh para imigran Eropa. Rangkaian proses transformasi sosial itu memiliki andil besar dalam melahirkan kesadaran kelas dalam struktur ekonomi masyarakat kolonial.

Pada fase awal abad ke-20, gerakan buruh meng-

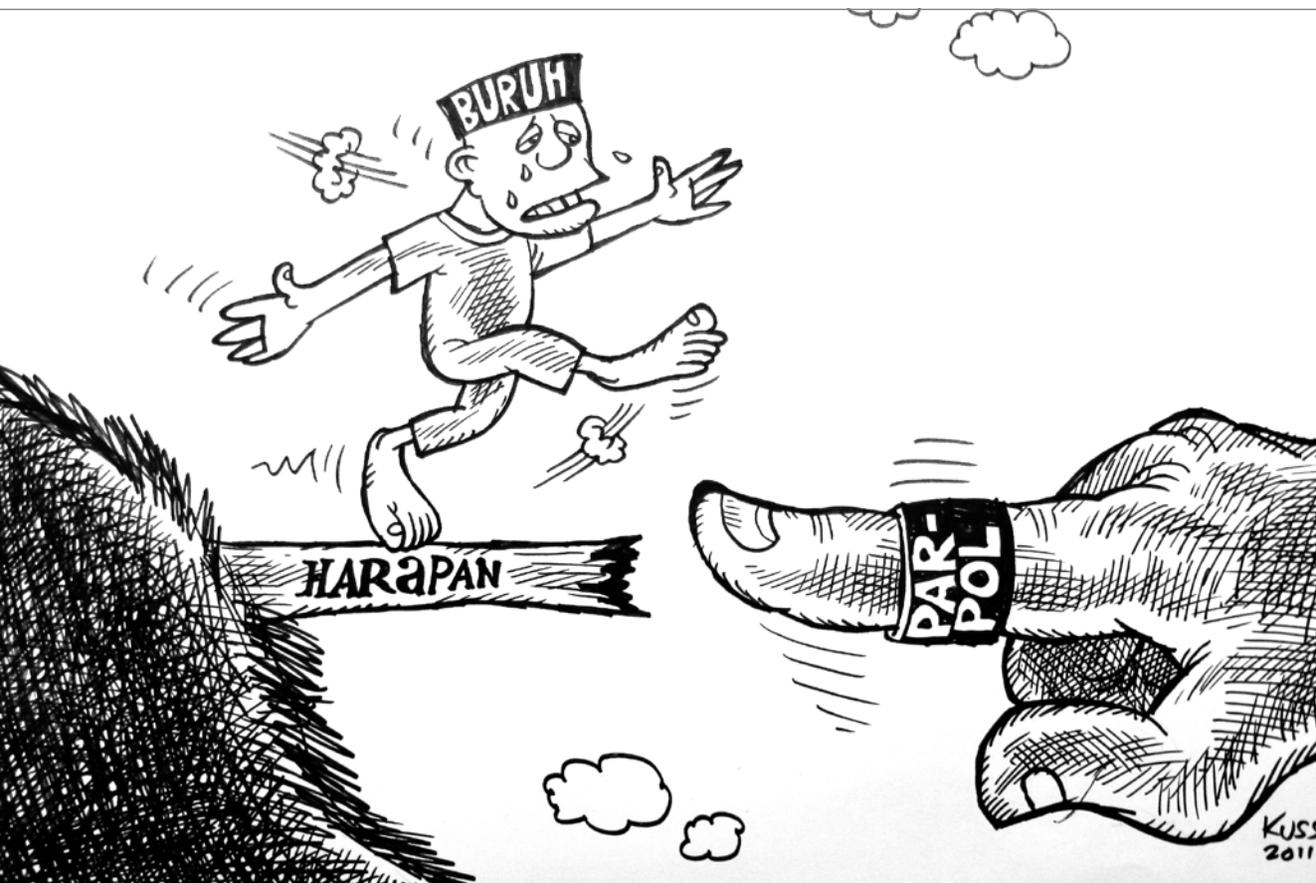
In Indonesia, the existence of labour (movement) — and variety of political activities that accompany — has grown along with the early presence of the colonial system, especially through the government's economic liberalization policy of the Dutch East Indies in 1870 that was known as the cultuurstelsel era.

In order to sustain the colonial-style capitalist system of cultuurstelsel, the Dutch government set a series of liberal policy package: clearing land for plantations, establishing factories, developing infrastructure, exploring mines, inviting foreign investment, and mobilizing thousands of workers to be employed in agricultural projects, plantations, and infrastructure produced by the colonial system.

Economic liberalization eventually produced a new social class called labour. Social transformation of the Dutch East Indies people practically brought up pockets of new industries, centers of economic growth, as well as the inclusion of Western ideologies (nationalism, socialism, and Marxism), which was brought by European immigrants. The series of social transformation processes has big contribution in bringing class consciousness in the economic structure of colonial society.

In the early phases of the 20th century, the labour movement experienced political transformation and movement

POLITIK *POLITICS*



alami transformasi politik dan proses radikalisasi gerakan. Masifnya aktivitas mogok yang diorganisir berbagai Serikat Buruh (SB) membuat gerah pemerintah kolonial. Tak sedikit para tokoh buruh berhaluan “kiri” yang kemudian ditangkap dan dipenjarakan pemerintah kolonial. Tahun 1930, Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI) dibubarkan karena dicurigai mendukung gerakan kebangsaan. Pemerintah kolonial Belanda menilai pengorganisasian SB yang radikal sebagai ancaman *rust and orde*, dan menuduh gerakan SB ditunggangi kaum “komunis”.

Dampak dari “pembersihan” organ-organ buruh progresif pada akhirnya membuat gerakan buruh tak lagi berperan penting dalam gerakan kebangsaan. Memasuki masa pendudukan Jepang (1941-1945), praktis tak ada satu pun kekuatan politik—termasuk gerakan buruh—yang bisa bertahan. Pada masa ini, seluruh organ perjuangan politik rakyat dibubarkan dan seluruh potensi tenaga rakyat dikerahkan pada proyek “kerja paksa” guna mendukung pengadaan pangan dan logistik perang bala tentara Jepang.

Pasca Proklamasi-di tengah-tengah euforia revolusi kemerdekaan-organ-organ SB kembali menggeliat dengan lahirnya belasan federasi SB di awal 1950 hingga akhir 1960-an. Hampir seluruh SB masa ini berafiliasi atau menjadi *underbouw* partai politik, seperti Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) dengan PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dengan NU, Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) dengan Parmusi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan militer/TNI. Pada era ini, relasi antar SB saling bersaing, sebangun dengan sistem kepartaian Indonesia saat itu yang sangat kompetitif dan cenderung konfliktual.

Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, gerakan buruh tak hanya mendapat ruang gerak cukup luas dari pemerintah, namun memiliki peran besar dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Pemerintahan Soekarno dikenal sebagai pemerintahan yang respek terhadap gerakan buruh dan ideologi politik sayap kiri. Jatuhnya pemerintahan Soekarno tahun 1966, telah diikuti oleh pemenjaraan ratusan ribu anggota PKI dan organ-organ afliasinya (SOBSI, Barisan Tani Indonesia/BTI, ormas-ormas sayap kiri, dan pihak-pihak yang dianggap dekat dengan Soekarno). Transisi politik Orde Lama ke Orde

radicalization process. Massive strike activity organized by various Trade Unions (TUs) had made the colonial government uneasy. Many labour leaders with “leftist” tendency who were later arrested and jailed by the colonial government. In 1930, Indonesian Workers Union (Serikat Kaum Buruh Indonesia–SKBI) was dissolved on the suspicion of supporting the national movement. The Dutch colonial government regarded the organization of the radical TUs as rust and order threat, and accused the movement of the TU is ridden by the “communist”.

The impact of the organs “cleansing” of progressive labour in the end made the labour movement no longer plays an important role in national movement. Entering the Japanese occupation (1941-1945), it was practically none of the political power –including the labour movement– could survive. At this time, all organs of people’s political struggle were dissolved and all the potential power of the people deployed on the “forced labour” project in order to support the procurement of food and the logistics of the Japanese military.

Post-Proclamation of independence declaration –in the midst of the euphoria of independence revolution– TU’s organs returned with the birth of dozens of TU federation in early 1950 to late 1960’s. At this time, almost all TU were affiliated with or become an underbow of political party, such as the Indonesian Central Labour Organisation (Sentral Organisasi Buruh Indonesia–SOBSI) with PKI, Indonesian Muslim Workers’ Union (Serikat Buruh Muslimin Indonesia–Sarbumusi) with NU, Join Labour Unions Islam Indonesia (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia–Gasbiindo) with Parmusi, Central Labour Organization of Republic of Indonesia (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia–SOBRI) with Murba, and the Central Organization of Employees Swadiri Indonesia (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia–SOKSI) with the Indonesian military/TNI. In this era, relation between TU was competing, congruent with the Indonesian party system that was highly competitive and tend to be conflictual.

Under the government of President Sukarno, the labour movement not only gained ample of space for the government, but has a big role in influencing state policy. Soekarno government is known as a government that have respect for the labour movement and leftist political ideology. The fall of Sukarno in 1966, has been followed by the imprisonment of hundreds of thousands of PKI members and its affiliated organs (SOBSI, Barisan Tani Indonesia/BTI, left-wing mass organizations, and parties that are considered close

Baru menjadi titik kulminasi dari keruntuhan gerakan buruh sebagai pilar penting kekuatan politik nasional. Setelah berhasil membubarkan PKI dan organ-organ afiliasinya, melalui berbagai intimidasi dan kekerasan politik, pemerintah Orde Baru melanjutkan upaya penataan kehidupan politik, termasuk merestrukturisasi organ-organ perburuhan yang ada.

Penataan gerakan buruh masa Orde Baru setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga fase berikut. *Pertama*, fase 1966 sampai awal 1970-an sebagai fase pelarangan terhadap segala bentuk pengorganisasian SB, karena hampir semua SB adalah produk era kepemimpinan Soekarno yang bersimpati — kalau bukan berafiliasi — pada gerakan politik sayap kiri.

Kedua, fase 1970-1990 sebagai fase pengambilalihan (*take over*) seluruh kekuatan SB di bawah kendali militer. Politik pengendalian militer bahkan masuk sampai ke tempat kerja, mengintervensi proses pemilihan pemimpin SB, membatasi partisipasi politik buruh, mengendalikan tuntutan kenaikan upah (termasuk tuntutan atas keamanan bekerja), hingga menghindari tumbuhnya SB yang berwatak kritis dan radikal.

Ketiga, fase 1990-1998, fase dimana kebijakan ekonomi pasar menjadi “kedok” pemerintah untuk melanjutkan proyek kooptasi dan eksploitasi atas kekuatan politik buruh melalui konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). HIP dimaksudkan sebagai instrumen kontrol negara sekaligus sarana penyeimbang aspirasi negara-negara kreditor yang meminta agar pemerintahan Soeharto bersikap lebih bersikap responsif-akomodatif terhadap tuntutan buruh.

Graciela Chichinilsky dan Richard Falk (1998) menyebut rezim Orde Baru — seperti rezim-rezim pembangunan di negara Dunia Ketiga lainnya — mempraktikkan model otoriterisme pembangunan sebagai bentuk penerimaan negara atas “ideologi pembangunan”. Ini berimplikasi pada terkurasnya energi politik nasional yang diarahkan penuh negara untuk berperan sebagai penjaga mesin pertumbuhan (ekonomi). Herbert Feith (2002) menyebut rezim-rezim pembangunan otoriter yang membiak di banyak negeri Dunia Ketiga sebagai “*developmentalism regime’s*”.

Untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan tinggi, pilihan banyak rezim pembangunan jatuh pada

with Soekarno). Political transition of the Old Order to New Order became the culmination of the collapse of the labour movement as an important pillar of national political power. After successfully dissolving the PKI and its affiliated organs; and through a variety of intimidation and political violence, the New Order government is continuing their effort to structure political life, including restructuring of the organs of the existing labour movement.

The structuring the labour movement during the New Order at least can be divided into three phases follows. First, the phase of 1966 to the early 1970s as the phase of the prohibition against all forms of organization of the TU, because almost all of the TU was the product of Sukarno’s leadership era that is sympathetic to –if not affiliated with– the left-wing political movement.

Second, the phase of 1970-1990 as the takeover phase of the TU force by the military control. The politic of military control even entered the working environment, to intervene the process of selecting the leader of the TUs, limiting the political participation of workers, controlling wage increase demand (including demands for work security), to avoid the TU to grow critical and radical.

Third, the 1990-1998 phase, a phase where the market economic policies become the “mask” of the government to proceed with the co-optation and exploitation project of workers’ political power through the concept of Pancasila Industrial Relations (Hubungan Industrial Pancasila–HIP). HIP is intended as an instrument of state control as well as a means of balancing the aspirations of creditor countries which demanded Soeharto’s government to be more responsive-accommodative to the demands of labour.

Graciela Chichinilsky and Richard Falk (1998) called the New Order regime –similar like the development regimes of in many other Third World countries– have been practicing authoritarian development model intensely as a form of state understanding on the “developmental ideology”. This implies to the depletion of national political energy that is fully directed by the state machine to act as guardians of (economic) growth. Herbert Feith (2002) calls the development of authoritarian regimes that flourish in many Third World countries as “developmentalism regime’s”.

To achieve development and high growth, the choice of many development regimes fell on large scale industrialization projects. While to boost the policies was needed a

proyek industrialisasi skala besar. Sementara untuk menggenjot kebijakan itu dibutuhkan modal yang besar. Pilihan pragmatis yang tersedia bagi rezim pembangunan — termasuk di Indonesia — yang membutuhkan modal besar adalah mengundang investasi langsung korporasi global (MNC's) dan institusi-institusi keuangan internasional (seperti Bank Dunia, IMF, ADB atau AfDB) dengan WTO (dan antek-anteknya) sebagai regulator perdagangan internasional. Hegemoni segitiga MNC's-Bank Dunia-WTO inilah yang oleh Peter Evans disebut sebagai *the death triangle*.

Guna melapangkan kepentingan bisnis imperium korporasi global, *the death triangle* ini mengintervensi berbagai kebijakan negara — tak hanya di bidang ekonomi, namun juga politik, sosial, dan kultural — melalui program penyesuaian struktural (*structural adjustment programme/SAP*). Mekanisme SAP adalah sebuah kebijakan penyesuaian multi-sektor yang harus dipatuhi negara berkembang untuk dapat mengakses modal MNC's. SAP memaksa berbagai sektor penting publik (seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, jasa keuangan, pajak, hingga sektor hubungan industrial dan keamanan) mengikuti skema liberalisasi.

Dalam kerangka kerja neoliberal itu, buruh diposisikan tak lebih dari komoditas ekonomi yang siap diperjualbelikan. Di samping jaminan stabilitas politik, rezim pembangunan di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) juga mengiming-imingi upah buruh murah untuk menarik investor asing. Sebab, bagi investor, salah satu prasyarat terpenting dari kebijakan investasi mereka adalah tersedianya tenaga kerja murah yang melimpah, stabilitas politik yang terjaga, di samping kemudahan pasok bahan baku bagi kepentingan industri modal global.

Visi kebijakan sektor perburuhan yang lebih menekankan pada kepentingan investor ini menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah. Sementara bagi MNC's, biaya untuk memindah (relokasi) perusahaan dari satu negara ke negara lain itu sangat murah. Kasus penutupan (*lock out*) perusahaan skala global Sony Corporation misalnya, menjadi contoh sederhana. Kondisi relokasi Sony dipicu oleh adanya demo buruh besar-besaran beberapa tahun sebelumnya. Biaya relokasi Sony dari Indonesia ke Vietnam ternyata hanya menyedot 20 persen dari keuntungan per tahun yang biasa diraih perusahaan elektronik raksasa dunia ini.

Praktis, pertumbuhan dan perluasan ideologi neoliberalisme tak bisa dipisahkan dari apa yang disebut

substantial amount of capital. Pragmatic options available to the development regime including in Indonesia— which requires large capital is to invite foreign direct investment global corporations (MNC's) and international financial institutions (such as the World Bank, IMF, ADB or AfDB) along with the WTO (and his minions) as a regulator of international trade. The triangle of hegemony MNC's-World Bank-WTO is what Peter Evans called as the death triangle.

In order to smoothen the interests of global corporate empire business, the death triangle intervened government's various policies —of not only economic, but also political, social, and cultural— through structural adjustment programs (structural adjustment program/SAP). The mechanism of SAP is a multi-sector adjustment policy which must be complied by the developing countries to access capital for MNC's. SAP is forcing the various sectors that hold public importance (such as education, health, agriculture, trade, financial services, tax, up to the industrial relations and security sector) to follow the liberalization scheme.

In the neoliberal framework, the worker is positioned no more than economic commodities that are ready to be traded. In addition to the guarantee of political stability, development regimes in developing countries (including Indonesia) are also promise cheap labour to attract foreign investors. Therefore, for investors, one of the most important prerequisite of their investment policy is the availability of abundant cheap labours, and political stability is maintained, in addition of easiness of raw materials supply for global capital industry.

Labour sector policies' vision that put more emphasis on the interests of investors has become the most chosen rational choice by the government. As for MNC's, the cost to move (relocation) of the company from one country to another is very cheap. The case of closing (lock out) a global scale company Sony Corporation for example, can be the simple example. Sonny relocation was triggered by the massive labour demonstration a few years earlier. Sony relocation cost from Indonesia to Vietnam was only taken 20 percent of profits that is normally gained per year by the world-wide electronics company.

Practically, the growth and expansion of neo-liberalism ideology cannot be separated from what is said by Goso-vic as a "global intellectual hegemony." Neoliberalism is the ideology continuation of liberalism was campaigned by Adam Smith three centuries ago. However, there are three differences between neoliberalism and liberalism.

Gosovic sebagai “*global intellectual hegemony*”. Neoliberalisme merupakan kelanjutan ideologi liberalisme yang diusung Adam Smith tiga abad lalu. Namun, ada tiga perbedaan antara neoliberalisme dan liberalisme.

Pertama, dalam liberalisme mekanisme pasar dipakai untuk mengatur ekonomi negara, sedangkan dalam neoliberalisme ia harus digunakan untuk mengatur ekonomi global. Dengan bantuan globalisasi, neoliberalisme bisa menjadi *universal value*.

Kedua, dalam neoliberalisme kinerja pasar dipakai untuk memakmurkan individu (*individual wealth*), sedangkan dalam liberalisme kinerja pasar digunakan untuk kemakmuran bersama (*commonwealth*). Kesejahteraan dan kemakmuran individu lebih diagungkan dalam paham neoliberalisme.

Ketiga, liberalisme menganggap otoritas regulatif negara diperlukan, sedangkan neoliberalisme justru menekankan pelimpahan otoritas regulatif dari negara ke individu, atau dari *social welfare* ke *selfcare*.

Inti neoliberalisme adalah mengurangi peran dan campur tangan negara dalam menggerakkan roda pembangunan nasional agar individu bisa berkompetisi secara bebas (*free fight liberalism*). Mekanisme pasarlah satu-satunya instrumen yang menentukan apakah individu menjadi pemenang (*the winner*) atau pecundang (*looser*). Subsidi harus dikurangi demi efisiensi sesuai dengan arahan mekanisme pasar dan semangat “Konsensus Washington”. Lemahnya posisi tawar negara berhadapan dengan MNC’s pada akhirnya harus berujung pada pengorbanan hak-hak asasi buruh dan kelas sosial marjinal lainnya.

Runtuhnya kekuasaan despotik Orde Baru — dan hadirnya rezim reformasi — tak serta merta menuntaskan beragam masalah perburuhan yang ada. Berbagai regulasi “pro-buruh” yang dihasilkan rezim reformasi (terutama pada masa Habibie dan Gus Dur), praktis masih menyisakan berbagai problem krusial, baik dalam konteks eksternal (relasi buruh-pemerintah-pengusaha dan relasi buruh-politik) maupun internal (konflik internal berlarut dan eksklusifisme dalam organ-organ SB).

Gerakan buruh pasca reformasi menghadapi problem yang lebih kompleks, terutama terkait kian maraknya kebijakan pasar kerja fleksibel (*labor market flexibility/LMF*) yang menjadi tuntutan rezim global-

First, in liberalism the market mechanism is used to regulate the nation’s economy, while in neoliberalism it should be used to regulate the global economy. With the help of globalization, neoliberalism can be a universal value.

Second, in neoliberalism the market performance is used to prosper individual person (individual wealth), while in liberalism the market performance is used for shared prosperity (commonwealth). Individual’s welfare and prosperity are more exalted by the neoliberalism.

Third, liberalism considers state regulatory authority as a necessary, while neo-liberalism emphasize the delegation of regulatory authority from the state to individuals, or from social welfare to selfcare.

The essence of neoliberalism is to reduce the role and state intervention in national development drive so that individuals are able compete freely (free fight liberalism). Therefore it is the market mechanisms that become the only instrument which determines whether the individual becomes the winner or the looser. Subsidies should be reduced for the sake of efficiency in accordance with the direction of the market mechanism and the spirit of the “Washington Consensus”. Weak state bargaining position in dealing with the MNC’s must culminate in the sacrifice of workers’ human rights and other disadvantaged social classes.

The collapse of the despotic rule of the New Order — and the presence of Reformation regime — is not necessarily resolved the numerous labour problems existing. Various “pro-labour” regulations that were issued by Reformation regime (especially during the Habibie and Gus Dur era), this practically still leaves many crucial problems, both in the context of external (government-labour-entrepreneur relations and labour-political relations) and also internal (sustained internal conflict and exclusivism within TU’s organs).

Post-reform labour movement faces more complex problem, especially in relation to the rise of increasingly flexible labour market policies (labour market flexibility/LMF) that become a demand of neoliberal globalization regime. LMF is the agenda of the international trade regime — in employers’ response of pressure the market which increasingly grow more liberal.

For the defenders of the idea of flexible labour markets, LMF strategy will benefit the workers because it is able to provide wider employment opportunities by creating a system of part-time work (part-time jobs), facilitating negotiations between the workers with the company to become

isasi neoliberal. LMF merupakan agenda rezim dagang internasional — sebagai respons pengusaha terhadap tekanan pasar yang kian liberal.

Bagi para pembela gagasan pasar kerja fleksibel, strategi LMF akan menguntungkan buruh karena ia mampu memberi kesempatan kerja lebih luas dengan menciptakan sistem kerja paruh-waktu (*part time jobs*), memudahkan negosiasi antara buruh dengan perusahaan secara lebih fleksibel, meningkatkan posisi tawar buruh karena mereka bisa bernegosiasi langsung dengan perusahaan tanpa perantara pihak ketiga, memungkinkan adanya kepuasan kerja dengan menyesuaikan jenis dan beban pekerjaan dengan kemampuan buruh.

Masifnya penerapan sistem kerja kontrak (*outsourcing*) telah membuat prioritas utama perjuangan SB di seluruh dunia kini terfokus pada perlawanan terhadap sistem kerja ini. Kian maraknya penggunaan sistem kerja kontrak di berbagai negara tak bisa dilepaskan dari dampak ekseseif kompetisi ekonomi global yang menganggap peningkatan daya saing dan produktivitas hanya mungkin dicapai apabila ada kebijakan penyesuaian terhadap pasar kerja yang lebih efisien dan murah. Pikiran ini diterjemahkan kaum neoliberal sebagai sistem hubungan kerja yang memberikan kemudahan pada perusahaan untuk melakukan perekrutan dan pemecatan.

Bank Dunia pada akhir 2008 melansir survei kontroversial tentang peringkat negara yang paling efisien dalam perekrutan dan PHK. Semakin sedikit biaya PHK, semakin bagus buat investor asing. Setelah mendapat kritikan besar dari serikat buruh dan ILO, survei diralat. Bank dunia akhirnya hanya menggunakannya sebagai "*internal working paper*", bukan untuk bahan referensi pembuatan kebijakan pasar kerja.

Pada aras lain, problem eksternal yang hingga kini masih terus menghantui banyak SB, juga terkait dengan perlindungan negara terhadap hak-hak normatif buruh, seperti soal kebebasan berserikat, rumitnya proses penyelesaian hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), kian kompleknya penanganan buruh akibat pelimpahan urusan perburuhan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Problem eksternal lain menyangkut orientasi dan partisipasi politik buruh. Hasil survei Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bertajuk "Orientasi Politik

more flexible, improving the workers' bargaining position because they can negotiate directly with the companies without third-party intermediaries, allowing the existence of job satisfaction by adjusting the type of work and workload with the ability of the workers.

Massive application of labour contract system (outsourcing) has made TU's top priority struggle throughout the world to focus on the fight against this working system. Increasingly widespread use of contract labour system in many countries cannot be seen separated from the excessive impact of global economic competition that considers increasing competitiveness and productivity is only possible if there are policy adjustments to make the labour market more efficient and cheaper. This thought translates neo-liberals as a labour relations system that provides easeiness for the company to conduct recruitment and dismissal.

The World Bank in late 2008 launched a controversial survey of ranking which country is the most efficient in recruiting and cutting job. The less the cost for layoff is the better for foreign investors. After receiving big criticism from trade unions and the ILO, the surveys were revised. World Bank ended up just using it as an "internal working paper", rather than reference material for the manufacture of labour market policy.

On another level, external problems that still continue to haunt many of the TUs, is also related to the state's protection on workers' normative rights, such as the issue of freedom of association, the complexity of the legal settlement process in the Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial–PHI), the growing complexity as a result of delegation in handling workers' labour affairs from the central government to local governments.

Other external problems related to workers' political orientation and participation. The result of Indonesia Workers Organisation (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia–OPSI) survey titled "Labour's Political Orientation in 2009 Legislative Elections" shows that the majority of workers did not know the existence of the Labour Party, the majority of workers did not have sufficient knowledge related to vision, mission and programs (platform) of political parties, and majority of workers still want TU not to be involved in practical political affairs. This survey provides a preliminary illustration which told us that the level of knowledge, awareness, and political participation

Buruh dalam Pemilu Legislatif 2009” menunjukkan, mayoritas buruh tidak mengetahui keberadaan Partai Buruh, mayoritas buruh tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait visi, misi dan program (*platform*) partai politik, dan mayoritas buruh masih menghendaki SB tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Survei ini memberi gambaran awal kepada kita bahwa tingkat pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik buruh masih terbilang rendah; belum mampu memaksimalkan ruang demokratisasi politik yang tersedia sebagai arena penting perjuangan struktural buruh di pentas politik negara.

Sementara masalah internal yang umumnya dihadapi SB menyangkut fenomena konflik internal dan eksternal (baik antarpengurus SB maupun antarSB), pola perjuangan yang lebih didominasi oleh isu-isu normatif, dan kentalnya fenomena oligarki dalam tubuh SB. Rentannya konflik internal dalam tubuh SB umumnya bukan disebabkan oleh masalah prinsip-ideologis, namun lebih didominasi soal-soal teknis, seperti sikap egois para elite buruh, ketidakmatangan dalam mengelola organisasi, pemimpin SB yang kurang mengakar, lemahnya militansi anggota, dan sejenisnya.

Kecenderungan pola pengorganisasian SB juga bersifat rutinitas, dimana hampir seluruh waktu pimpinan SB habis untuk mengurus problem internal organisasi (seperti iuran anggota, distribusi jabatan, administrasi, advokasi, dan rapat-rapat seremonial). Relasi pimpinan SB dengan anggotanya pun kian birokratis. Anggota hanya bertemu dengan pimpinan SB jika sedang menghadapi masalah. Setelah masalah selesai, praktis komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi tak lagi berjalan efektif.

Model perjuangan SB Indonesia kerap membatasi cakupan perjuangannya sebatas tuntutan kesejahteraan anggota. Pola ini kerap disebut sebagai *economic unionism/business unionism*. Pola perjuangan normatif ini membuat SB gagal mengikatkan diri pada basis ideologi politik tertentu dan berperan aktif dalam mendorong isu-isu perubahan sosial yang lebih luas dan mendasar — termasuk membangun *network* dengan elemen *civil society* dan kelompok-kelompok pro-demokrasi, melakukan penyadaran publik, edukasi massa, *media campaign* atau advokasi kebijakan publik.

Hingga kini, SB terlihat sulit mereposisi perannya sebagai *social movement*. SB kerap gagap dalam memetakan akar masalah dan gagal memberi solusi alternatif atas problem kemiskinan, ketimpangan eko-

of workers is relatively low; they have not yet able to maximize the available space of political democratization as an important arena of workers' structural struggle within the country's political stage.

Meanwhile, the internal problems that is commonly faced by TU is regarding internal and external conflict (whether between one TU caretakers or between TUs), the pattern of struggle that is more dominated by a struggle over normative issues, and the strong phenomenon of oligarchy within the TU body. Vulnerability of the internal conflict within the TU body is generally not caused by principal-ideological problems, but rather dominated by technical issues, such as the selfishness of the elite worker; immaturity in managing the organization; leaders of unions that are not accepted by the grass root; lack of militancy of members, and the like.

The tendency of TU's organizing pattern that is more routines, where most of the TU leader's time is absorbed for taking care of organization's internal problems (such as member's contribution, job distribution, administration, advocacy, and ceremonial meetings). The relationships between TU leaders with its members are also becoming bureaucratic. Members only meet with leaders of the TU when facing a problem. After the problem solved, then practically the communication, coordination, and consolidation is no longer effective.

Model of Indonesia TUs struggle often limit the scope of their struggle only to the demands of the welfare of their members. This pattern is often referred to as economic unionism/business unionism. The pattern of this normative struggle make the TUs fail to bind themselves on the basis of a particular political ideology and to play an active role in pushing the issues of broader and basic social change —including building network with elements of civil society and pro-democracy groups, conduct public awareness raising, mass education, media campaign or public policy advocacy.

Until now, TU is having difficulty in repositioning its role as a social movement. TU often stutters in mapping the root of the problem and failed to provide alternative solutions for problems of poverty, economic inequality and social injustice. This is the effect of the New Order regime policies that has successfully undermined the political-ideological orientation of the TU and successfully instilled technical-economic orientation through HIP system as an ideal concept of a corridor of Indonesian workers' movement throughout the 32 years. This exclusive orientation of most

nomi, dan ketidak-adilan sosial. Ini merupakan buah dari kebijakan rezim Orde Baru yang berhasil mengikis orientasi politik-ideologis SB dan sukses menanamkan orientasi teknis-ekonomis melalui sistem HIP — sebagai konsep ideal yang menjadi koridor gerakan buruh Indonesia sepanjang 32 tahun. Orientasi kebanyakan SB yang eksklusif inilah, yang oleh banyak pihak disebut sebagai “gerakan tanpa ideologi kelas”. Dengan kata lain, gerakan buruh pasca reformasi masih mewarisi watak gerakan buruh era Orde Baru, yakni lemahnya kepekaan dan militansi SB dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang direproduksi negara.

Problem internal lain adalah menjamurnya budaya oligarkis dalam tubuh SB. Padahal, demokratisasi adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya organisasi SB yang kuat. Meluasnya kultur *patron-client* dalam tubuh SB adalah pemicu utama tingginya tensi konflik internal di tubuh SB. Dalam kondisi ini, SB cenderung menjadi organ elitis yang tidak mengakar, kinerja organisasi menjadi tak terkontrol, meluasnya apatisisme dikalangan massa anggota, dan menguatnya watak *status quo* pengurus.

Ditinjau dari aspek pengorganisasian isu, berbagai kasus menunjukkan agenda perjuangan SB di tingkat nasional (DPP federasi/konfederasi) kerap terlihat tak berelasi secara sinerjis dengan kepentingan, aspirasi, dan isu pokok di tingkat lokal (DPD, DPC, dan Pengurus Unit Kerja/PUK). Sementara gerakan buruh di tingkat lokal nyaris tak mampu mengangkat isu-isu lokal ke level nasional akibat lemahnya pengorganisasian, SDM, *networking*, komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antarperangkat organisasi.

Sebagai bagian dari kelompok warga, buruh dan SB akhirnya tidak diperhitungkan dalam kehidupan politik dan dalam pembuatan kebijakan negara. Kendati *klise*, stigma yang sering kali dimunculkan oleh penguasa terhadap berbagai upaya partisipasi buruh dalam politik adalah aktivitas buruh diidentikkan dengan bahaya kemunculan kembali gerakan komunisme. Stigma ini, praktis telah menghambat perjuangan buruh dan SB, baik secara struktural maupun psikologis.

Zaman neoliberalisme tampaknya masih akan menguat di negeri ini, kendati kekuatan pasar di beberapa negeri kapitalis tak lagi dianggap serba benar dan sakti. Di Prancis, di sebuah rapat umum di kota Toulon

TUs, which made them widely referred as “movement without class ideology”. In other words, the post-reform labour movement still inherits the the characteristic of New Order era labour movement of, namely the TUs’ lack of sensitivity and militancy against various forms of structural injustice that reproduced the state.

Another internal problem is the proliferation of oligarchic culture within the TU body. In fact, democratization is a necessary condition for the growth of strong TU organization. The widespread of patron-client culture in TU body is the main trigger of high conflict tension in TU internal body. In these conditions, SB tends to be elitist organs that are not rooted, organizational performance becomes uncontrollable, widespread of apathism among the members and the management’s status quo nature is strengthening.

Viewed from the aspect of organizing issue, many cases show the struggle of the TU agenda at the national level (DPP federation/confederation) is often seen not synergically related to the interests, aspirations, and a central issue at the local level (DPD, DPC, and Working Unit Management /PUK). Meanwhile the labour movement at the local level was barely able to raise local issues to national level due to lack of organization, human resources, networking, communication, coordination, and consolidation between the organizations.

As part of residents group, workers and TU is finally not taken into account in political life and also in formulating state policy. Despite the cliché, the stigma that is often raised by the authorities against the various efforts of worker political participation is the activity of trade unions is identified with the reappearance of the dangers of communism movement. This stigma has hindered the practical struggle of the workers and TU, both politically and psychologically.

The era of neoliberalism is likely keep strengthened in this country, despite market forces in some capitalist countries are no longer considered completely true and powerful. In France, at a rally in the town of Toulon by the end of 2008, President Sarkozy said: “The idea that the market is all-powerful and can not be opposed by whatever rules and by any kind of political intervention is an insane mind.”

In Australia, Kevin Rudd, Prime Minister from the Labour Party, wrote an essay published in *The Monthly* that indicated that the ongoing global crisis in recent time is the

menjelang akhir 2008, Presiden Sarkozy mengatakan: "Pikiran bahwa pasar adalah serba-kuasa dan tak dapat ditentang oleh aturan apa pun dan oleh intervensi politik macam apapun adalah pikiran yang gila".

Di Australia, Kevin Rudd, Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh, menulis sebuah esei dalam *The Monthly* yang menunjukkan bahwa krisis global yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir adalah titik puncak neoliberalisme yang mendominasi kebijakan ekonomi dunia sejak 1978. Kini, Kevin Rudd menggantikannya dengan istilah yang berbeda. Ia menyebut agenda baru yang mendasari kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Partai Buruh Australia adalah jalan "kapitalisme sosial-demokratik".

Rudd menjanjikan peran negara yang aktif, walaupun tetap bertaut dengan "pasar yang terbuka". Tapi di Indonesia kita masih mendengar suara seperti Amien Rais dan Prabowo Subianto yang mengancam neoliberalisme. Retorika "populis" atau "kerakyatan" memang perlu buat selalu mengingatkan masih besarnya ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Jika kita sepakat bahwa ideologi merupakan sebuah kumpulan ide, gagasan, pengetahuan, sistem nilai, bahkan struktur kesadaran yang berhubungan erat dengan kepentingan kelas tertentu; dan memiliki solusi konkret untuk menjawab kebutuhan kelas tersebut (seperti diteorikan Mazhab Frankfurt), apa sesungguhnya yang menjadi basis ideolog gerakan buruh Indonesia; yang direpresentasikan oleh begitu banyak organ SB di negeri ini?

Kedua, mengapa gerakan buruh di Indonesia yang secara historis memiliki tradisi kuat sebagai gerakan politik, tidak eksis secara politik, seperti yang berlangsung pada gerakan buruh di Eropa, Amerika Latin, Jepang, atau Korea Selatan?

Ketiga, mengapa gerakan buruh Indonesia pasca reformasi yang tampil dalam jumlah yang demikian banyak, dalam relasinya kerap memperlihatkan kecenderungan konfliktual dan fragmentatif di antara elemen serikat yang ada?

Keempat, Mengapa partai buruh (atau setidaknya partai politik yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai "buruh/pekerja"), sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2009 lalu tak pernah mampu mendulang perolehan suara secara signifikan; apalagi lolos dari syarat *parliamentary threshold*?

Kelima, mengapa gerakan buruh Indonesia hingga

culmination of the economic policies of neoliberalism that have dominated the world since 1978. Now, Kevin Rudd replaces it with different terms. He called the new agenda that underlies the economic policy that will be the Australian Labour Party is the way "social-democratic capitalism".

Rudd promises an active role of the state, although still linked to "open markets". But in Indonesia, we still hear the sound like Amien Rais and Prabowo who criticize neoliberalism. The rhetoric of "populist" or "populist" is necessary for always reminding still big socio-economic inequality in Indonesia.

If we agree that ideology is a collection of ideas, ideas, knowledge, value system, even the structure of consciousness is closely related to the particular class interests, and has a concrete solution to address the needs of the class (as theorized by the Frankfurt School), what is really the ideology basis of Indonesian labour movement, which is represented by so many organs of the TU in this country?

Second, why the labour movement in Indonesia, which historically has a strong tradition as a political movement, does not exist politically, like what have took place in the labour movement in Europe, Latin America, Japan, or South Korea?

Third, why post-reform movement of Indonesian workers who appear in so many numbers, in its relation often has conflictual and fragmented tendency between the existing union's elements?

Fourth, Why workers' party (or at least a political party that identifies itself as the party of "workers"), since the 1999 election until the 2009 election, was never able to gain significant votes, let alone get away with parliamentary requirements trashold?

Fifth, why the labour movement in Indonesia until now have no option or at least have no a permanent relations with a particular political party, so the agenda of struggle at the structural level (the country's policy in parliament formally pro-workers) could be maximized?

Sixth, why the Indonesian labour movement – up to this day – is difficult to change the normative mode of struggle (which is only to increase the welfare of members, demanding higher salaries, improving working conditions, and the like) and into the domain of social movement (social unionism); become an integral part of social progressive power who played an active role in changing the policy orientation of political, economical, and social state?

Seventh, why did the workers union /elites were now accused more visibly infected with feudalism virus and oli-

kini tak memiliki pilihan atau setidaknya relasi yang bersifat permanen dengan partai politik tertentu, sehingga agenda perjuangan di level struktural (penyusunan kebijakan negara secara formal di parlemen yang pro buruh) bisa lebih dimaksimalkan?

Keenam, mengapa gerakan buruh Indonesia—hingga hari ini—sulit menanggalkan corak perjuangan normatif (sekedar meningkatkan kesejahteraan anggota, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi kerja, dan sejenisnya) dan masuk ke dalam domain gerakan sosial (*social unionism*); menjadi bagian integral dari kekuatan sosial progresif yang berperan aktif dalam merubah orientasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial negara?

Ketujuh, mengapa para pengurus serikat/elite buruh dituding banyak pihak kini makin terlihat terjangkiti virus feodalisme dan kultur oligarkisme?

Sesungguhnya masih banyak pertanyaan lain yang bisa kita ajukan terkait problem gerakan buruh (atau lebih tepat “gerakan politik buruh”) di Tanah Air yang hingga hari ini, meminjam istilah WS Rendra, masih menyisakan “cermin yang retak”.

Atas dasar realitas di atas, kita berharap, ke depan, gerakan buruh mampu melakukan reposisi gerak-an, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Dalam konteks internal, gerakan buruh harus sanggup berperan sebagai miniatur implementasi nilai-nilai demokrasi, yang menjunjung tinggi kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan pola kepemimpinan populis-egaliter. Argumen yang menyatakan fenomena oligarki di kebanyakan SB tanah air adalah realitas niscaya hanya akan mempertebal kultur feodalisme dan birokratisme dalam tubuh serikat.

Saatnya gerakan (politik) buruh membuat pilihan aliansi politik strategis dengan kekuatan *civil society* dan kelompok-kelompok pro demokrasi, terutama dengan partai politik yang memiliki visi, platform, dan ideologi perjuangan yang jelas. Relasi gerakan buruh-partai politik menjadi niscaya dalam konteks demokratisasi.

Gerakan buruh Indonesia harus segera menanggalkan corak perjuangan normatif (sekedar meningkatkan kesejahteraan anggota, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi kerja, dan sejenisnya) dan masuk ke dalam domain gerakan sosial (*social unionism*); menjadi bagian integral dari kekuatan sosial progresif yang berperan aktif dalam merubah watak kebijakan politik, ekonomi, dan sosial negara yang pragmatis dan asosial.

Sebab, tanpa demokratisasi dalam tubuh serikat,

garchy culture?

Indeed there are many other questions can we ask in related problems of the labour movement (or more appropriately “labour political movement”) in Indonesia up to this day, that to borrow a phrase of Rendra, still leaves “a cracked mirror”.

On the basis of the reality above, we hope, in the future, the labour struggle will be capable of repositioning their movements, both in internal and external context. In internal context, the labour movement should be able to act as a miniature of the implementation of democratic values, which upholds equality, transparency, accountability, and pattern of egalitarian-populist leadership. The argument that states the phenomenon of oligarchy in most TUs in the country is inevitable reality that will only strengthen the culture of feudalism and bureaucracy in the union body.

It is the time for (political) movement workers to make the choice of strategic political alliances with the power of civil society and pro-democracy groups, especially with the political parties who have a vision, platform, and a clear ideological struggle. The relation between the worker movement and political parties is deemed to be necessary in the context of democratization.

Indonesian labour movement must immediately abandon the normative mode of struggle (only focused in increasing the welfare of members, demanding higher salaries, improving working conditions, and the like) and move into the domain of social movement (social unionism); become an integral part of progressive social forces that play an active role in changing character of state’s political, economic, and social policies that are pragmatic and asocial.

Because, without democratization in the body of the union, without a clear base of political ideology, and without tying yourself in the arena of structural political struggle, the labour movement will face various difficulties to act as an avant garde of change, lose ground as a suppressor power, experience confusion in its orientation, and have potential failure in building the labour-capital-state relations that are more democratic; and also to realize a prosperous and equitable economic life for the workers (and their families).

Various papers presented in this Journal of Social Democracy’s 10th edition is certainly not intended to answer all the “heavy” questions, but at least trying to respond to some of these crucial questions. The goal was to make the agenda of the workers struggle to have a road map based on deep understanding of the related agenda and challenge

tanpa basis ideologi politik yang jelas, dan tanpa mengikatkan diri dalam arena perjuangan politik struktural, gerakan buruh akan menghadapi berbagai kesulitan untuk berperan sebagai *avant garde* perubahan, kehilangan pijakan sebagai kekuatan penekan, mengalami kekaburan orientasi gerakan, dan potensial gagal dalam membangun relasi buruh-kapital-negara yang lebih demokratis; dus mewujudkan kehidupan ekonomi buruh (dan keluarganya) yang sejahtera dan berkeadilan.

Beragam tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Sosial Demokrasi* edisi ke-10 ini tentu tak ditujukan untuk menjawab seluruh pertanyaan “berat” itu, namun setidaknya mencoba merespon sebagian pertanyaan krusial tersebut. Tujuannya tak lain agar agenda perjuangan buruh memiliki peta jalan berbasis pemahaman mendalam terkait agenda dan tantangan gerakan buruh yang ada sebagai titik tolak bagi kita untuk memproyeksikan atau setidaknya membangun hipotesa ke arah mana sebenarnya gerakan buruh Indonesia akan mengarah. Selamat membaca, dan tetap berpikir merdeka! ■

L a u n a,
Staf redaksi
Jurnal Sosial Demokrasi

the existing labour movement as a starting point for us to project, or at least to build hypotheses, in which way the Indonesian labour movement is actually headed. Happy reading and keep on thinking free! ■

L a u n a,
Editorial Staff of Journal Sosdem



BURUH DAN POLITIK:

TANTANGAN DAN PELUANG GERAKAN BURUH INDONESIA PASCAREFORMASI



Pengantar Redaksi

Di Indonesia, organ perburuhan di negeri ini eksis bersamaan dengan kian menguatnya praktik kapitalisme kolonial, terutama yang di-introduce oleh kebijakan liberalisasi ekonomi *cultuurstelsel* yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1870. Guna menopang sistem *cultuurstelsel* yang eksploitatif ini, pemerintah kolonial menyusun serangkaian paket kebijakan liberal: pembukaan lahan perkebunan, pendirian pabrik, pembangunan infrastruktur, eksplorasi pertambangan, mengundang investasi asing, serta memobilisir ribuan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan infrastruktur.

Sejak awal, gerakan buruh Indonesia mengalami proses radikalisasi gerakan. Akibatnya, banyak buruh yang ditangkap pada masa penjajahan Belanda.



Pada masa pendudukan Jepang, nyaris organ buruh dilumpuhkan, seiring gerakan politik lainnya.

Pada masa organ-organ SB kembali menggeliat dengan lahirnya belasan federasi SB di awal 1950 hingga akhir 1960-an. Hampir seluruh SB berafiliasi atau menjadi *underbouw* partai politik, seperti Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) dengan PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dengan NU, Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) dengan Parmusi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan militer/TNI. Kemudian, Transisi politik Orde Lama ke Orde Baru ini menjadi titik kulminasi dari keruntuhan gerakan buruh sebagai pilar penting kekuatan politik nasional. Setelah berhasil

membubarkan PKI dan organ-organ afiliasinya, pemerintah Orde Baru melanjutkan upaya penataan kehidupan politik, termasuk melakukan kooptasi dan korporatisasi di sektor perburuhan. Politik buruh yang dilakukan selama masa Orde Baru ini ternyata mempunyai dampak yang sangat luar biasa dalam memarginalkan gerakan buruh, termasuk dalam melakukan deideologisasi.

Sayangnya, Runtuhnya kekuasaan despotik Orde Baru—dan hadirnya rezim reformasi—tak serta merta menyelesaikan beragam masalah perburuhan yang ada. Berbagai regulasi “pro-buruh” yang dihasilkan rezim reformasi (terutama pada masa Habibie dan Gus Dur), praktis masih menyisakan berbagai problem krusial, baik dalam konteks eksternal (relasi buruh-pemerintah-pengusaha dan relasi buruh-



politik) maupun internal (konflik internal berlarut dan eksklusifisme dalam organ-organ SB). Dalam situasi semacam inilah, muncul banyak pertanyaan mengenai masa depan gerakan buruh di Indonesia. Setidaknya, ada tujuh pertanyaan dasar gerakan buruh yang layak dijawab ataupun didiskusikan. Pertama, berkenaan dengan ideologi gerakan buruh, maka pertanyaan pokoknya adalah apa sesungguhnya yang menjadi basis ideologi gerakan buruh Indonesia; yang direpresentasikan oleh begitu banyak organ SB di negeri ini? Kedua, mengapa gerakan buruh di Indonesia yang secara historis memiliki tradisi kuat sebagai gerakan politik, tidak eksis secara politik, seperti yang berlangsung pada gerakan buruh di Eropa, Amerika Latin, Jepang, atau Korea Selatan? Ketiga, mengapa gerakan buruh Indonesia pasca reformasi yang tampil dalam jumlah yang demikian banyak, dalam relasinya kerap memperlihatkan kecenderungan konflikual dan fragmentatif di antara elemen serikat yang ada? Keempat, mengapa partai buruh (atau setidaknya partai politik yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai “buruh/pekerja”), sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2009 lalu tak pernah mampu mendulang perolehan suara secara

signifikan; apalagi lolos dari syarat *parliamentary threshold*? Kelima, mengapa gerakan buruh Indonesia hingga kini tak memiliki pilihan atau setidaknya relasi yang bersifat permanen dengan partai politik tertentu sehingga agenda perjuangan di level struktural (penyusunan kebijakan negara secara formal di parlemen yang pro buruh) bisa lebih dimaksimalkan? Keenam, mengapa gerakan buruh Indonesia—hingga hari ini—sulit menanggalkan corak perjuangan normatif dan masuk ke dalam domain gerakan sosial (*social unionism*)? Ketujuh, mengapa para pengurus serikat/elite buruh dituding banyak pihak kini makin terlihat terjangkiti virus feodalisme dan kultur feodalisme ?

Selanjutnya, dalam rangka menjawab ketujuh pertanyaan di atas Jurnal Sosial Demokrasi Volume 10 membuat diskusi dengan tema: “Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Pascareformasi”. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah Hari Nugroho (Lab Sosio UI), Andriasari (AKATIGA) dan Said Iqbal (Presiden FSMI). Selain itu, diskusi juga dihadiri oleh berbagai elemen gerakan buruh di Indonesia.

Mian Manurung (*Jurnal Sosdem, FES*)

Terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan diskusi yang kami selenggarakan malam ini. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan jurnal Sosial Demokrasi Volume 10. Sepertinya, diskusi ini merupakan yang terakhir untuk tahun 2010. Topik diskusi malam ini adalah Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi.

Sebenarnya, *Term of Reference* (TOR) diskusi kita malam ini sudah lama direncanakan, tapi baru akhir tahun 2010 ini diskusi tentang buruh bisa diselenggarakan. Untuk itu, kita telah mengundang beberapa narasumber yang kita harapkan bisa mempresentasikan kondisi perburuhan kontemporer. Dari gerakan buruh, kita mengundang Mas Said Iqbal, dari akademisi kita mengundang Mas Hari Nugroho (Lab Sosio UI), dan Mbak Asih (Andriasari Tjandraningsih) dari Peneliti (AKATIGA). Dengan demikian, kita mempunyai tiga *main resource person*. Meski demikian, bukan berarti bahwa kawan-kawan yang hadir di sini bukan narasumber. Sebaliknya, kami berharap kawan-kawan yang hadir juga akan menjadi narasumber. Seperti biasa, untuk kawan-kawan yang pernah mengikuti diskusi di sini, diskusi ini akan direkam. Transkrip dan *resume*-nya akan dimuat dalam *Jurnal Sosial Demokrasi* Vol. 10. Oleh karena itu, kami berharap ketika kawan-kawan akan mengajukan pertanyaan, ide, ataupun komentar kiranya bersedia untuk menyebutkan nama dan asal institusinya sehingga bisa tercatat dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan bagi teman-teman untuk mengambil minuman sendiri yang sudah kami sediakan, dan silahkan kepada Bang Ivan untuk memimpin diskusi kita malam ini.

Ivan A. Hadar (*Wakil Pemimpin Jurnal Sosdem*)

Selamat malam. Assalamu'alaikum wr.wb.

Sebagaimana tadi telah disampaikan Mbak Mian, TOR diskusi kita malam ini sebenarnya dibuat oleh rekan kita, Launa, yang menurut saya sangat bagus dalam menceritakan gerakan buruh di Indonesia mulai dari zaman kolonial hingga sekarang. Pada masa Soekarno, gerakan buruh relatif cukup banyak, berasal dari berbagai partai politik dengan berbagai tuntutan masing-masing. Kemudian, gerakan buruh mengalami masa-masa suram atau bisa dikatakan mati suri ketika zaman Orde

Baru. Pada masa Orde Baru ini, bisa dikatakan tidak ada gerakan buruh yang menuntut gerakan demokratisasi, perbaikan hidup dan apalagi perubahan nasib. Bahkan pada waktu itu, sebagaimana disebutkan dalam TOR ini, buruh berada di bawah organ yang dikelola dan *dimonitoring* oleh kelompok militer.

Pada masa reformasi, muncul Serikat Buruh dan bahkan Partai Buruh. Barangkali, *euforia* demokrasi membuat para pihak atau kelompok banyak mendirikan organisasi buruh atau partai politik. Namun, pertanyaan mendasar dalam TOR ini adalah bagaimana tantangan dan peluang gerakan buruh Indonesia pascareformasi? Kita tahu bahwa dalam beberapa pemilihan umum ada peserta dari buruh yang ikut dalam kontestan pemilu, tetapi suara yang berhasil dikumpulkan relatif kecil. Ini, tentu saja, menjadi pertanyaan yang menarik karena ternyata kita belum mampu membuat gerakan politik buruh yang kemudian berhasil memasuki gelanggang legislatif.

Di Eropa, Jerman, misalnya, serikat buruh relatif independen. Afiliasinya biasanya ke Partai Sosial Demokrat, Partai Buruh ataupun komunis. Mereka biasanya bergabung ke dalam kelompok partai beraliran kiri. Sementara itu, asosiasi pengusaha akan lebih condong kepada partai-partai politik yang, katakanlah, konservatif atau liberal. Oleh karena itu, ketika pemilihan umum maka suara-suara yang akan diberikan kepada partai politik, katakanlah, dari kelompok buruh akan relatif lebih jelas.

Nah, di Indonesia, saya kira, setidaknya, secara normatif atau retorika, partai-partai politik akan mendukung masyarakat, semua golongan, termasuk buruh atau orang miskin, dan lain sebagainya. Namun, dalam langkah-langkah yang relatif konkret, urusan legislatif, misalnya, atau undang-undang yang dibuat maka akan terlihat bahwa produk undang-undang tersebut belum menampakan keberpihakan negara, katakanlah, kelompok buruh itu sendiri—seperti dalam kasus UU NO. 13 tentang Tenaga Kerja. Undang-undang tersebut justru menafikan hak-hak buruh terkait dengan asuransi, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Demikian juga, misalnya, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Jika di Jerman, yang saya tahu berkaitan dengan negosiasi upah, hubungan kerja, dan lain sebagainya antara Serikat Buruh dan Pengusaha yang jelas ada kepentingan masing-masing, maka per-



soalan-persoalan yang menyalahi undang-undang bisa dinegosiasikan sehingga ada hal-hal yang bisa diselesaikan bersama.

Kembali ke diskusi kita malam ini, dalam TOR juga telah disebutkan, mengapa, misalnya, Indonesia dengan tradisi kelompok buruh yang cukup kuat terutama di awal-awal kemerdekaan, tetapi sekarang malah justru terjadi fragmentasi kelompok buruh dari berbagai jenis? Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan hal ini. Tadi, Mbak Mian mengatakan ada tiga narasumber yang nanti akan presentasi, tapi tentu saja yang hadir di sini juga berasal dari kelompok buruh sehingga bisa menjadi narasumber otentik karena kegiatan kesehariannya yang terkait dengan perbaikan kehidupan buruh dan mengubah nasib buruh. Menurut saya, ini merupakan dua hal yang berbeda. Jika berkaitan dengan perbaikan kehidupan buruh, maka ada kaitannya dengan undang-undang, gaji, lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan jika berhubungan dengan nasib buruh, maka, menurut Tan Malaka, itu berkaitan dengan partai politik. Dengan kata lain, harus ada wadah yang bisa digunakan untuk mengubah nasib buruh dengan berbagai dimensinya dan menjadi sebuah gerakan.

Baik. Kita bisa mulai dengan narasumber pertama, Pak Hari dari Universitas Indonesia (UI), Lab Sosio. Beliau saat ini Ketua Pusat Kajian Sosiologi di UI, fokus utama ada beberapa kajian, terutama diantaranya adalah kajian identitas dan perilaku politik buruh serta kajian

perburuhan di era desentralisasi. Saya kira sangat menarik. Silahkan Pak Hari. Waktunya, barangkali, sekitar 20 menit.

Hari Nugroho (Lab Sosio-UI)

Terima kasih. Selamat malam. Ketika diberikan TOR diskusi ini, saya bilang kepada Mbak Mian bahwa pertanyaan yang diajukan relatif cukup susah. Meskipun demikian, menurut saya, pertanyaan yang diajukan dalam TOR merupakan pertanyaan yang hampir selalu muncul dalam diskursus gerakan buruh. Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup krusial, dan tepat pada persoalan pokok gerakan buruh dalam konteks politik. Saya tidak membuat suatu kerangka yang sangat sistematis. Namun, saya akan berusaha menjawab pada persoalan-persoalan pokok yang diajukan dalam TOR. Dari tujuh pertanyaan penting, menurut saya, ada dua persoalan utama. *Pertama*, eksistensi gerakan buruh. *Kedua*, soal kemungkinan transformasi gerakan buruh. Kemudian, oleh karena di dalamnya, ada pertanyaan mengenai ideologi maka, menurut saya, transformasi juga menyangkut perubahan ideologi. Pertanyaan dalam TOR diskusi juga bisa diubah menjadi bagaimana ideologi gerakan buruh saat ini? Berikutnya, transformasi juga menyangkut orientasi gerakan buruh.

Jika kita mengacu pada pertanyaan yang diajukan TOR mengenai eksistensi gerakan buruh, maka ada satu persoalan yang selalu muncul dalam setiap diskusi bahwa gerakan buruh yang muncul pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari proses destruksi politik yang dilakukan Orde Baru terhadap gerakan buruh. Kita bisa memodifikasi pertanyaan ini menjadi basis-basis apa saja yang dihancurkan, yang paling penting menurut saya adalah pemutusan jaringan politik buruh dengan partainya, misalnya, ketika SOBSI dihancurkan. Selanjutnya, kontrol politik negara atas serikat buruh. Pergeseran kontrol negara ke arah yang lebih bersifat korporatif selama Orde Baru. Di sini, orang-orang yang duduk sebagai pengurus merupakan gambaran dari kepentingan negara. Saya kira yang sangat penting juga adalah “dekonstruksi ideologi gerakan”. Hasil konstruksi ini pada intinya bahwa serikat buruh tidak lebih dari bagian dari keluarga besar negara, dan ini telah membongkar ideologi yang telah dibangun sebelumnya.

Selain itu, eksklusivitas sosial politik terhadap semua aliran gerakan buruh. Jadi, ada proses depolitisasi dan mar-

ginalisasi baik dalam konteks hubungan kerja maupun dalam konteks masyarakat. Oleh karena itu, kita bisa melihat, misalnya, bagaimana – kebetulan saya dengan beberapa teman sedang membuat studi mengenai identitas buruh tadi – ketika serikat buruh menjadi gerakan politik atau bahkan sebelum menjadi gerakan politik pun maka stigmatisasi gerakan buruh sebagai gerakan radikal cepat sekali muncul. Mungkin teman-teman di tingkat pengurus hal itu sudah selesai, tetapi saya kira tidak demikian di tingkat *grassroot*. Apalagi ketika diagendakan serikat masuk ke dalam Partai Politik maka sebagian besar – saya belum menghitung secara persis – menganggap sebagai arena yang berada di luar gerakan politik itu sendiri. Nah, saya kira hal ini merupakan produk dari proses politik eksklusif yang dilaksanakan selama masa Orde Baru yang secara sukses dilaksanakan di berbagai institusi mulai dari pendidikan, keluarga, hingga sampai pada hubungan-hubungan di tingkat pemukiman komunitas.

Jadi, sebenarnya, jika kita lihat bagian politik atau rantai politik ini menjadi hilang secara fundamental ketika perubahan politik terjadi. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman di Amerika Latin dimana ketika perubahan politik itu terjadi paling tidak sisa-sisa jaringan politik itu masih bisa bertahan. Dalam kasus Indonesia, ketika Orde Baru tumbang dan kemudian diganti dengan reformasi maka jaringan politik formal yang diciptakan masih belum terinstitusionalisasi. Teman-teman berusaha untuk membangun organisasi politik formal itu, tapi ternyata menjadi suatu kenyataan – dalam bahasa televisi – dunia lain yang memang tidak mudah dimasuki. Ketika teman-teman di Serikat Buruh berusaha untuk membangun jaringan itu, tapi ternyata ketika sampai di “jalan” maka representasi buruh menjadi sulit dinegosiasikan. Jikapun muncul, maka lebih sebatas pada *capacity building* yang ada dalam serikat buruh. Memang, ada beberapa prestasi di tingkat daerah, tapi saya kira secara kuantitatif masih terlalu kecil untuk diperhitungkan meskipun hal ini merupakan proses pembelajaran politik yang sangat penting.

Berikutnya mengenai hubungan politik permanen.

Pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana jika dikaitkan dengan agenda yang lebih komprehensif tentang Indonesia, yakni ketika dijadikan sebuah hubungan politik yang permanen kemudian masuk politik kebijakan? Saya kira ini menjadi pertanyaan berikutnya.

Saya kira masih ada persoalan kegamangan politik sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika masuk ke dalam partai politik maka dianggap sebagai arena yang berbeda. Selain itu, dalam partai, banyak sekali kepentingan dan program-program yang muncul tidak bisa dilepaskan dari hasil diskusi program partai. Proses memperjuangkan program ini bisa sangat krusial, tapi saya kira itu juga yang masih menjadi persoalan. Bagaimana mengajukan agenda-agenda gerakan buruh ke dalam arena politik formal?

Persoalan lainnya dalam konteks politik formal adalah adanya kekuatan oligarkhis yang sangat kokoh. Ketika, misalnya, seorang wakil serikat duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mengajukan gagasan-gagasan yang sangat progresif maka apakah isu ini menjadi kepentingan anggota DPRD, akan sangat tergantung pada situasi yang melahirkan parlemen itu sendiri. Dalam politik sekarang, ketika parlemen menjadi sebuah arena “transaksi politik” atau kompromi politik, dan kemudian representasi politik tidak berjalan maka pertimbangan politik

tentang isu-isu krusial tentang perburuhan yang diangkat ke permukaan akan sangat berbeda. Nah, menurut saya, ini menjadi sebuah kendala struktural yang sangat serius bagi buruh untuk menempatkan perjuangannya mempengaruhi kebijakan politik di parlemen.

Basis ideologi partai politik saya kira juga menjadi persoalan ketika dikaitkan dengan gerakan buruh itu sendiri. Dalam kaitan ini, ideologi politik tidak begitu jelas ketika dikaitkan dengan gerakan buruh meskipun ada beberapa yang mempunyai basis ideologi gerakan buruh. Namun, hasilnya belum begitu signifikan.

Nah, ada pertanyaan menarik, misalnya, mengapa dari tahun 1999 hingga 2009 partai-partai buruh selalu gagal? Saya kira, dalam hal ini, kita berbicara tentang kontradiksi antara ketersediaan peluang versus ketidakmatangan gerakan sosial ke dalam gerakan politik. Saya

Ketika parlemen menjadi sebuah arena “transaksi politik” atau kompromi politik, dan kemudian representasi politik tidak berjalan maka pertimbangan politik tentang isu-isu krusial tentang perburuhan yang diangkat ke permukaan akan sangat berbeda. (Hari Nugroho)

kira apa yang sudah terjadi selama ini lebih pada proses pembelajaran politik yang baru berlangsung selama belasan tahun. Alasan kedua kegagalan gerakan buruh adalah basis kolektivisme yang sempit. Ini terjadi karena mobilisasi sumber daya yang terbatas dan kelemahan mengidentifikasi kelas sebagai konstituen. Kolektivisme merupakan bagian penting gerakan. Namun, persoalannya adalah mendefinisikan siapa politik itu? Apakah politik itu yang berada dalam kelompok serikatnya ataukah yang ada dalam sebuah bagian besar dari buruh? Nah, saya kira mendefinisikan hal ini menjadi persoalan semua serikat buruh. Ini menjadi dasar dari kegagalan partai politik buruh. Ketika kita berbicara mengenai partai politik buruh yang lebih maju maka pertanyaannya kemudian adalah siapa yang kemudian menjadi partai politiknya?

Ketiga, sebagai sebuah hasil studi sementara-ketika pemilu, serikat pekerja tidak menjadikan identitas pekerja sebagai identitas politiknya. Sebaliknya, yang muncul adalah identitas politik yang lain, misalnya, pilihan ideologis, agama ataupun yang berkaitan dengan historis. Jadi, tidak ada pertimbangan pilihan politik yang sifatnya lengkap.

Keempat, pendidikan politik yang relatif masih lemah di tingkat *grassroot*. Menurut saya, ini merupakan bagian yang paling susah. Saya melihat bahwa ideologi harus diterjemahkan dari premis-premis yang lebih fundamental tentang hubungan antara perorangan dengan masyarakat, hubungan perorangan dengan negara. Selain juga bagaimana hubungan itu dilakukan. Persoalannya kemudian adalah barangkali saat ini masih berada dalam proses mencari. Ideologi seperti apa kira-kira yang hendak dirumuskan. Sayangnya, ketika proses demokratisasi berjalan, perdebatan semacam ini justru menghilang dari permukaan. Ada beberapa kasus dimana ideologi sangat kuat, tetapi persoalannya muncul ketika melihat basis di tingkat *grassroot*-nya, misalnya, basis massanya terlampau kecil sehingga ketika membangun kekuatan politik juga sangat terbatas. Di sisi lain, yang mempunyai basis massa besar masih melakukan proses pencarian.

Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, kita pernah mempunyai gerakan buruh yang cukup kuat. Namun, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, dekonstruksi ideologis yang dilakukan oleh Orde Baru sangat kuat. Akibatnya, pada masa sekarang, terjadi kegamangan ketika mencari basis ideologisnya. Di

sisi lain, transformasi struktural ekonomi politik dari otoritarianisme ke demokrasi dan pasar liberal tidak memicu rekonstruksi ideologis. Barangkali memang, kita mempunyai ruang yang lebih demokratis, tapi di sisi lain liberalisasi juga kuat. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri ketika membangun, katakanlah, liberal, tetapi ketika dijabarkan menjadi program akan muncul banyak pertanyaan. Ini karena ideologi tidak hanya berisi gagasan abstrak saja, tetapi harus diturunkan menjadi lebih operasional. Ideologi dalam organisasi katakanlah bisa dirumuskan dalam visi dan misi organisasi, tetapi hal ini memerlukan diskusi yang mendalam.

Sementara itu, ketika membahas tentang serikat maka pertanyaannya kemudian apakah yang kita bahas kelompok ataukah kelas? Dengan kata lain, apakah kelas ataukah kelompok yang menjadi acuan? Itu saya kira yang harus menjadi catatan buat kita semua. Di sisi lain, konsolidasi buruh juga terkatung-katung. Konsolidasi kelas terfragmentasi oleh sekat-sekat politik primordial (agama, etnisitas, asal daerah), otonomi daerah, hirarki sosial dalam angkatan kerja, dan oleh gerakan buruh itu sendiri. Misalnya, ketika kita melihat angkatan kerja di sektor garmen dengan angkatan kerja kerah putih maka akan menyulitkan kita untuk mendefinisikan atau menyebut siapa yang disebut sebagai kelas itu. Pertanyaannya kemudian bagaimana buruh bisa membangun identitas kelas itu?

Saat ini, pertumbuhan serikat sangat luar biasa, tetapi sebenarnya ia mewakili populasi yang sebenarnya tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi, sebenarnya, justru terjadi fragmentasi. Ada perdebatan, misalnya, ada undang-undang yang membiarkan serikat membuat kelompok kecil-kecil, tapi saya kira itu juga karena ada pada persoalan gerakan buruh itu sendiri. Saya kira memang ada kemacetan demokrasi di tingkat internal. Beberapa serikat cukup demokratis, tetapi beberapa yang lain saya kira mempertahankan betul dominasi elit sehingga tidak terjadi sirkulasi. Oleh karena itu, menurut saya, demokratisasi itu sangat penting.

Berikutnya adalah kesulitan meninggalkan syarat normatif dan kesulitan dalam memasuki arena sosial liberalisme. Kita melihat bahwa liberalisasi seringkali membuat proses konsolidasi menjadi sangat terbatas. Contoh sederhananya adalah ketika kerja harus penuh sehingga waktu yang tersedia untuk keluarga sangat terbatas, demikian juga untuk konsolidasi organisasi. Saya kira inilah persoalan konkret harian. Ini terjadi

karena ada desakan untuk terus bekerja agar upah yang diperoleh mengejar inflasi. Kondisi semacam ini menjadi beban yang tidak bisa dihindarkan. Persoalan normatif ini selalu ada setiap hari dan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, persoalan normatif itu memang sangat riil, dan bagi teman-teman di serikat pun mengalami kesulitan karena sumber daya yang ada sangat terbatas. Kondisi ini menjadi semakin sulit ketika ada eksklusi baik dari dalam maupun dari luar gerakan buruh itu sendiri. Gerakan buruh, dalam hal ini, terpisah dari persoalan sosial-ekonomi politik lainnya. Persoalan buruh juga sering dikotakkan-kotakkan secara terpisah. Persoalan perburuhan tidak sama atau terpisah dengan persoalan kemiskinan. Konsep eksklusi semacam ini tidak membuat proses integrasi yang baik dalam gerakan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi agenda penting bagi teman-teman untuk melebarkan agenda gerakan buruh itu sendiri.

Di luar yang telah saya paparkan di atas, saya mempunyai pertanyaan, yakni pentingnya memikirkan basis gerakan. Dalam hal ini, siapakah sebenarnya yang berada dalam barisan gerakan buruh itu? Ini menyangkut soal perdebatan menginklusi atau mengeksklusi aktor-aktor gerakan buruh.

Saya kira Hernando de Soto sangat baik dalam membahas teman-teman *Non Governmental Organization* (NGO) dan aktor-aktor gerakan yang lain dalam gerakan buruh. Ketika kita berbicara tentang gerakan buruh di ranah politik saya kira perlu untuk membuka sekat-sekat sosial dan politik kepada isu-isu lain yang berdampak kepada persoalan perburuhan. Misalnya, persoalan buruh berkait erat dengan persoalan kemiskinan, korupsi, fair trade, dan lain sebagainya.

Kemudian, ketika politik lokal itu menjadi penting maka memahami struktur politik lokal kemudian juga menjadi sangat penting. Dalam hal ini, memahami isu sosial dan politik lokal menjadi penting bagi konsolidasi gerakan buruh yang lebih luas. Jadi, adalah penting untuk memberi konteks gerakan buruh dengan isu-isu saat ini sehingga menjadi lebih luas. Saya kira itu dulu, terima kasih.

Ivan A. Hadar

Paparan yang menarik. Di Indonesia, saya kira konteksnya sudah sangat luas, dan tentunya sudah merambah kemana-kemana, tetapi belum ada, katakanlah, teori-teori yang bisa ditampilkan dari konteks yang ada.

Berikutnya, Ibu Indrasari Tjandraningsih dari AKATIGA. Kita akan mendengar dari Ketua LSM yang mempunyai banyak kegiatan tidak hanya menyangkut buruh, tapi juga kemiskinan, petani gurem, konflik tanah, dan sebagainya. Mungkin ada pandangan yang sifatnya komprehensif mengenai topik kita malam, buruh dan politik: tantangan dan peluang gerakan buruh. Silahkan Mbak Indrasari.

Indrasari Tjandraningsih

Terima kasih. Selamat malam.

Apa yang ingin sampaikan, yakni bacaan terhadap gerakan buruh di Indonesia berdasarkan kepercayaan teman-teman buruh terhadap AKATIGA untuk melakukan beberapa studi. Barangkali, saya memulai dengan pertanyaan yang sedikit provokatif, yakni ketika kita berbicara mengenai gerakan buruh baik di kalangan pelaku maupun pengamat maka pertanyaan saya adalah: memang ada gerakan buruh di Indonesia? Kalau buruh bergerak memang ada. Tahun ini, misalnya, kita telah membuat statistik data mengenai berapa banyak buruh turun ke jalan menuntut banyak hal, mulai dari yang bersifat normatif hingga ke urusan-urusan publik. Namun, kira-kira hasil ke jalan itu apa? Seberapa efektif ia meraih tujuan yang diharapkan?

Dalam kesempatan ini, saya tidak akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam TOR karena tujuh pertanyaan dalam TOR bisa menjadi tujuh tesis atau skripsi yang bisa sangat mendalam. Meskipun demikian, jika melihat seluruh jawaban dari pertanyaan yang diajukan merupakan sebuah hasil dari politik perburuhan yang dilaksanakan sejak Orde Baru. Politik perburuhan tersebut berlangsung sangat efektif dan mematikan gerakan buruh, baik sebagai gerakan politik maupun lainnya. Dalam pengamatan saya, gerakan buruh berada dalam bahaya. Ini karena, misalnya, ketika saya mengajar di Fakultas Ekonomi untuk mata kuliah hubungan industrial maka setiap mulai kelas saya bertanya apa yang ada di kepala mereka ketika mendengar kata buruh? Di sini, buruh diidentikkan dengan demo, memacetkan jalan, pembuat biang kerok, dan lain sebagainya. Hal ini tampaknya sederhana, tapi, dalam pemahaman saya, merupakan isyarat lampu kuning yang hampir mendekati lampu merah. Ini karena mahasiswa atau masyarakat secara umum tidak lagi simpati apalagi empati terhadap gerakan buruh. Tidak hanya dari orang luar, kita bermimpi bahwa hendaknya



gerakan buruh diintegrasikan dengan gerakan-gerakan yang lain. Namun, alih-alih dari gerakan sosial yang lain atau dari masyarakat luar yang *notabene* juga buruh di dalam kesehariannya terlepas apakah mereka seorang eksekutif, manager atau lainnya pada hakikatnya mereka buruh. Mereka bekerja kepada orang lain untuk upah. Itu definisi buruh.

Sekarang ini, istilah tersebut disamarkan dan dijadikan istilah yang sangat elitis, misalnya, *account executive*, *sales representative* (SPG), dan lain sebagainya. Namun, pengistilahan itu telah membuat buruh menjadi “bukan buruh”, dan karenanya tidak ada alasan mendukung gerakan buruh, merayakan Hari Buruh, dan lain sebagainya. Menurut saya, yang paling berbahaya adalah ketika buruh tidak lagi tertarik untuk menjadi anggota serikat buruh karena jika menjadi anggota serikat buruh akan membahayakan dapurnya. Tidak ada anggota buruh *outsourcing* yang menjadi anggota serikat buruh, dan hanya 24% buruh kontrak yang menjadi anggota serikat buruh, dan hanya 75% buruh tetap yang menjadi sasaran serikat buruh menjadi anggota serikat buruh. Pertanyaannya kemudian mengapa mereka tidak tertarik untuk menjadi anggota serikat buruh? Ini karena, sekali lagi, dengan status mereka sebagai buruh kontrak, *outsourcing*, atau bahkan tetap sekalipun ketika mereka bergabung ke dalam serikat buruh maka akan kehilangan pekerjaannya. Nah, itulah situasi riil yang kita hadapi sekarang, dan sungguh menjadi persoalan.

Siang tadi kita memperingati satu tahun Fauzi Abdulhal, semua orang tentu kenal dengan nama itu, dan kita

mendapatkan pengakuan dari pelaku pimpinan serikat buruh bahwa memang ada persoalan besar dalam internal serikat buruh. Nah, saya seperti mendapatkan konfirmasi dari pengalaman dan pengamatan yang terkumpul. Saya ingin menyatakan dengan lugas, dan mudah-mudahan tidak menyinggung kawan-kawan aktivis, tetapi memang ada persoalan besar dalam organisasi serikat buruh mulai dari SDM, keuangan, hingga strategi gerakan. Jika boleh dielaborasi, maka SDM buruh sangat lemah baik di jajaran pengurus dan lebih-lebih di jajaran basis. Itu yang pertama. *Kedua*, “gerakan buruh” sangat miskin strategi dan inovasi dalam mengembangkan strategi agar eksistensinya dipercaya baik oleh konstituenya maupun oleh gerakan-gerakan sosial lainnya atau masyarakat lain secara luas.

Persoalan internal ini seringkali tidak diketahui, tapi ada juga yang mengakui. Tadi, mungkin telah disebutkan bahwa ada jarak yang cukup besar antara elit dan basis kontituennya. Nah, berdasarkan pengamatan, jarak tersebut cukup besar, dan ada soal perbedaan pemahaman dan asumsi. Asumsi yang diambil oleh elit – yang dalam hal ini saya berbicara di tingkat pusat dan basis di tingkat perusahaan – sering membuat kebijakan-kebijakan serikat tidak bisa dilaksanakan di bawah karena merasa tidak relevan dengan apa yang dialami oleh buruh di tingkat basis. Persoalan lain adalah serikat buruh di Indonesia itu menggunakan *ownership*, kepemilikan serikat oleh yang mendirikannya atau pimpinannya sehingga muncul perasaan, misalnya, “serikat ini punya saya”. Oleh karena itu, kita menemukan serikat yang pimpinannya tidak pernah ganti, dan kita semua sudah tahu, sementara basisnya sudah tidak ada. Namun, serikat atau organisasi ada dan tercatat oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Bahkan, mungkin menjadi anggota tripartit nasional. Padahal, basisnya sudah tidak ada. Hal ini sekaligus menunjukkan elitism yang menjadi semacam ciri khas serikat buruh di Indonesia. Untuk tidak mengatakan egois, banyak sekali serikat-serikat buruh itu bergerak secara individual. Kalau organisasi serikat buruh merupakan suatu kumpulan, maka kumpulan tersebut masih dapat dipecah-pecah lagi, misalnya, kumpulannya si A, B, C, dan sebagainya. Masing-masing tidak saling berhubungan meskipun berada dalam kesatuan serikat buruh. Dalam hal kerja, minimal mereka akan selalu bertengkar terlebih dahulu. Nah, ketika sebuah gerakan buruh mengasumsikan sebuah soliditas, kekompakan, dan persatuan, jika kita

tahu yang ada di dalamnya, maka pertanyaan saya, “kira-kira mimpi *ndak* ya jika saya terus menjadi peneliti buruh yang berusaha memperkuat gerakan buruh?” Sementara di sisi lain, kelompok yang hendak kita perkuat itu terpecah-belah.

Ketiga, sebetulnya, jika dibilang tantangan tentu banyak. Bahkan, sepertinya, gerakan buruh sekarang hampir seluruhnya berisi tantangan. Oleh karena itu, saya sering berfikir barangkali bahwa serikat buruh itu salah baca, membaca jebakan sebagai peluang sehingga masuk ke dalam jebakan tersebut, dan bahkan turut serta dalam membuat jebakan tersebut. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana buruh kita sangat gembira dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 yang sebetulnya jebakan luar biasa. Bayangkan, dalam ruangan sebesar ini, kita bisa membuat dua serikat, dan itulah yang disambut sehingga berujung pada fragmentasi. Nah, di situlah, sebenarnya, akar persoalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi mengenai SDM serikat buruh. Hal lain adalah ketika kita berbicara mengenai serikat buruh maka yang seringkali dibicarakan adalah elit-elitnya. Karakter basis buruh justru seringkali dilupakan. Jika kita membandingkan sejarah sebelum kemerdekaan atau sebelum Orde Baru, maka jelas ada perubahan karakter basis. Persoalannya adalah jarang sekali ada yang melihat perubahan ini. Gerakan itu intinya adalah massa. Namun, ketika massa itu tidak kita cermati wujudnya maka sebuah gerakan bergerak dengan asumsi. Jika kita lihat fenomena di lapangan, maka yang disebut buruh adalah yang berusia 18-24 tahun. Mereka yang berusia di atas 24 tahun semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan. Nah, usia 18 adalah anak-anak muda lulus SMA, sangat apolitis, dan sama sekali terputus dengan gerakan buruh di Indonesia. Kemudian, mereka bekerja karena memang harus bekerja agar bisa hidup, dan mereka harus bersaing sangat ketat dengan sesama pencari kerja. Oleh karena itu, kondisi apapun diterima. Hal-hal inilah yang seyogianya kita cermati dalam membahas persoalan-persoalan gerakan.

Nah, pertanyaannya kemudian adakah strategi penguatan dalam gerakannya? Banyak hal yang memang sepertinya pesimis. Namun, ini merupakan kenyataan yang harus kita hadapi sebelum kita bergerak untuk membangun strategi gerakan dalam pengertian sesungguhnya. Sekarang ini, dengan kasat mata, kita dapat melihat bagaimana modal mendikte negara untuk mengendalikan buruh melalui undang-undang. Sekarang

sedang ramai dibicarakan revisi undang-undang No. 13 tahun 2003. Nah, teman-teman serikat menolak revisi undang-undang tersebut. Nah, pertanyaan kemudian mengapa harus ditolak? Jika revisi itu diarahkan untuk lebih melindungi buruh, maka mestinya tidak perlu ditolak. Ada memang hal-hal yang sifatnya lebih emosional, mudah terbawa arus, kurang dipikirkan dengan baik dalam merumuskan strategi. Dalam pembacaan kami, begitu banyak undang-undang atau peraturan merupakan hasil lobi pengusaha yang sangat kuat. Tahun 2009, ada keputusan menteri tentang kerja magang. Di sini, kerja magang menjadi legal. Oleh karena itu, kerja magang yang seharusnya untuk calon pekerja diberlakukan untuk pekerja. Nah, ini hanya salah satu contoh saja untuk memberikan ilustrasi. Dalam situasi dimana pemodal bekerja sama sangat erat, sementara di sisi lain buruh terpecah-pecah maka hal tersebut justru menguntungkan pemodal untuk menyusun strategi. Persoalan-persoalan ini mestinya bisa diletakkan di atas meja karena jika kita menghindari persoalan-persoalan ini, maka justru seperti memasukkannya di bawah meja kemudian bermimpi membangun gerakan tanpa melihat kondisi riil di tingkat basis. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Cukup mencerahkan, blak-blakan dan telanjang. Pertanyaan memang kemudian harus ada strategi. Nah, dalam kaitan ini, ada *ndak* kira-kira *think tank* untuk gerakan buruh? Ini penting karena dengan melihat kondisi buruh sebagaimana tadi telah dipaparkan perlu ada yang berfikir untuk membuat strategi, berfikir secara struktural, keterkaitannya dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Apalagi jika kita lihat dimana modal sangat kuat. Saya kira memang *think tank* itu harus ada. Sekarang ini, ada AKATIGA, LIPS, dan lain sebagainya. Tampaknya, memang harus ada sinergi bagi kelompok-kelompok yang mempunyai komitmen atau prihatin terhadap gerakan buruh. Barangkali, itu bisa menjadi solusi yang spontan.

Tadi, sudah disampaikan oleh Mbak Indrasari bahwa ada banyak hal krusial yang perlu dipertimbangkan. Pertanyaan awal yang tadi disampaikan sudah cukup bombastis. Apakah ada gerakan buruh? Beberapa hal pokok tadi disampaikan seperti masalah internal dalam serikat buruh, keuangan, strategi, soliditas, elitis, juga undang-undang yang menjebak, dan karakter buruh yang melemahkan. Selain itu, tadi, juga disampaikan

persoalan usia yang memang menjadi persoalan, 18-24 tahun. Usia-usia yang perhatian pokoknya ingin bekerja. Istilah buruh yang identik dengan pekerja kasar, miskin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, kita dengar dari pelaku. Silahkan, Bung Said Iqbal!

Said Iqbal

Assalamu'alaikum... Selamat malam

Kami akan mencoba untuk berbagi pengalaman, baik menyangkut pengalaman praktis di lapangan maupun semangat yang berkembang di kawan-kawan gerakan buruh. Saya adalah orang yang cukup optimis bahwa gerakan buruh akan turut mempengaruhi sejarah ke depan perjalanan demokratisasi di Indonesia, tapi dengan syarat demokratisasi di Indonesia tetap berjalan sehingga gerakan buruh akan tetap mempunyai tempat dan kesempatan dalam memberikan andil yang kuat. Syarat kedua adalah mayoritas kawan-kawan di gerakan buruh optimis dan saya kira data Mbak Indrasari perlu di-*up date* karena telah terjadi regenerasi kepemimpinan. Regenerasi gerakan buruh pasti akan terjadi dalam dua atau tiga tahun ke depan. Jika kita masuk ke *grassroot*, maka kita akan menemukan teman-teman yang cukup cerdas. Rata-rata mereka adalah sarjana/D3 sehingga mempunyai basis akademis juga. Sekarang ini, mereka masuk ke dalam konstelasi gerakan buruh yang mulai tumbuh. Dua alasan itulah yang membuat saya cukup optimis meskipun tidak terlalu ambisius.

Barangkali, paparan berikut ini bisa menjelaskan optimisme tersebut. Salah satu contoh yang kami alami dimana fragmentasi gerakan buruh tidak terbaca lagi sebagaimana tadi dijelaskan. Kami bergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Nah, itu hampir semua elemen gerakan buruh bergabung, dan isunya bukan lagi semata isu buruh, tapi isu rakyat, yakni jaminan sosial. Tiga *highlight* yang menjadi pedoman aksi jaminan sosial itu adalah jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat, jaminan pensiun untuk pekerja formal, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah wali amanat, oleh rakyat sebagai *stakeholder*, bukan lagi PT atau BUMN. Nah, di KAJS, jika teman-teman hadir, maka praktik yang tadi diceritakan tidak akan kita temukan. Barangkali, temuan-temuan penelitian tadi

Kami juga memerlukan pengamat yang optimis dalam melihat gerakan buruh. Jika gerakan buruh selalu dilihat dari kaca mata yang pesimis, maka lama-lama gerakan buruh akan benar-benar tidak bisa bangkit (Said Iqbal).

perlu di-*up date* lagi. Dalam forum itu, kita juga membahas strategi-strategi gerakan sebagai sebuah tujuan bersama. Sebagai ilustrasi juga, SPSI Pasar Minggu dan SPS Kalibata I dulunya pecah. Namun sekarang, jika diundang oleh Komite, maka semuanya akan hadir. Barangkali, suatu saat saya bisa mengundang Pak Hari dan Ibu Indrasari untuk datang ke forum itu sehingga bisa mengubah cara berfikir. Ini penting karena kami juga memerlukan pengamat yang optimis dalam melihat gerakan buruh. Jika gerakan buruh selalu dilihat dari kaca mata yang pesimis, maka lama-lama gerakan buruh akan benar-benar tidak bisa bangkit. Jadi, kami memerlukan teman-teman pengamat yang tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga capaian-capaian positif yang sudah kita lakukan. Cerita yang dibangun masih Orde Baru. Padahal, pasca-reformasi, pelan-pelan paradigma Orde Baru sudah mulai kendor. Jadi, kita perlu membangun

optimisme. Barangkali memang, kanalisasi yang semestinya kita bangun, diberikan arah jalan.

Selanjutnya, jika kita pergi ke daerah, maka kita akan menemukan buruh-buruh yang membangun aliansi. Kita bisa menyebutkan, misalnya, aliansi buruh Yogyakarta, aliansi buruh Tangerang, forum buruh Depok, ataupun forum buruh DKI. Nah, forum buruh DKI, misalnya, ketika berbicara tentang upah

minimum, buruh DKI bergabung baik dari kiri ataupun kanan. Jadi, saya pikir hal inilah yang bisa kita bangun dengan optimisme baru. Dalam hal ini, "Betapa gerakan buruh menjadi bagian gerakan sosial untuk menempatkan dirinya dalam keputusan-keputusan politik, dan tidak semata ekonomi". Saya adalah orang yang sangat optimis dalam melihat gerakan buruh karena terlibat langsung dalam proses.

Baiklah, kami akan berbagi cerita dari sebuah buku yang ditulis oleh Jhon Ingleson, Tangan dan Kaki Terikat, terbitan Komunitas Bambu, Januari 2004. Ia menjelaskan kondisi politik dan serikat buruh pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an kurang lebih sama dengan saat ini. Ia menjelaskan bahwa pemimpin serikat buruh menghadapi pertanyaan fundamental. Haruskah mereka membatasi aktifitasnya pada urusan industrial-upah dan kondisi kerja, praktik kecurangan, kesehatan



dan isu keamanan sehingga bisa meminimalkan resiko sikap represif pemerintah? Ataukah, harus mencari usaha mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam gerakan politik nasionalis yang lebih kuat, menguji batas kekuasaan negara dalam rangka menguatkan gerakan nasional secara keseluruhan? Beberapa menganggap bahwa hubungan organisasi yang erat antara partai politik dan serikat buruh merupakan urusan politik yang sama besar dengan agenda serikat buruh sebagaimana upah dan kondisi kerja.

PDSP sebuah serikat buruh kereta api pada tahun 1925 para pemimpin buruh itu berdebat bahwa mereka harus memperjuangkan tempat-tempat penginapan para buruh kereta api dan pelabuhan dalam hal penerangan lampu. Selanjutnya, mereka juga berdebat mengenai mengapa ada perbedaan upah antara buruh pribumi dengan buruh Eropa. Mengapa jaminan keselamatan tidak diberikan? Sementara di sisi lain, beberapa tokoh buruh di PDSP juga mengemukakan, "Jika kita hanya berbicara mengenai hal itu saja, maka tidak akan selesai". Oleh karena itu, mereka harus masuk ke dalam kebijakan publik pemerintah kolonial.

Pasca-tahun 1940 pun terjadi perdebatan. Gerakan buruh mendirikan partai sebagai gerakan politik atau tetap berjuang di sosial ekonomi. Kemudian, terbentuklah Partai Buruh Indonesia (PBI). Namun kemudian, sebagian kelompok buruh tidak setuju dengan PBI terse-

but. Berdasarkan cerita yang saya dapat beberapa organisasi buruh kemudian melakukan kongres, termasuk SOBSI yang kemudian dipengaruhi oleh PKI menjadi *underbouw*-nya, dan kemudian lahirnya Garkindonya Suryopranoto, dan lain sebagainya. Perdebatan yang terjadi pada waktu itu adalah apakah perlu berpolitik ataukah tidak? Maka, akhirnya, apa yang saya tangkap hari ini dan sepuluh tahun lalu bahwa gerakan sosial politik adalah nafasnya gerakan buruh. Jika kita lihat produk undang-undang 1264 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 2257 tentang penyelesaian perburuhan, 151, 1469 ketika semuanya diciptakan pada waktu gerakan buruh memberikan kontribusi melalui gerakan politik maka ternyata semuanya protektif. Undang-Undang 1264, misalnya, hanya dua negara yang mengizinkan jika PHK itu meminta ijin. Di luar itu, tidak ada. Jika hendak PHK, maka di-PHK saja, dan jika tidak setuju, maka silahkan menggugat di pengadilan. Nah, undang-undang semacam itu hanya di Indonesia dan Belanda. Undang-undang 2257 pun, menteri mewakili negara mempunyai hak veto. Ini sekedar suatu cerita bahwa gerakan buruh memberikan kontribusi.

Nah, ini kondisi 32 tahun. Oleh karena itu, jangan membayangkan seolah-olah gerakan buruh maju cepat padahal selama 32 tahun dikooptasi oleh rejim Orde Baru dimana buruh hanya dijadikan objek politik dan takut berpolitik sehingga yang muncul adalah bu-

ruh yang apolitis (apolitisasi). Pada masa Orde Baru, iuran kita saja bahkan masuk ke rekening pemerintah. Bukankah ini merupakan suatu hal yang lucu? Anggota serikat buruh juga tidak pernah dilibatkan dalam penetapan upah minimum. Sementara itu, serikat pekerja nasional ditakut-takuti untuk tidak melakukan unjuk rasa dan mogok kerja. Bayangkan, hal semacam ini telah berlangsung selama 32 tahun. Kemudian, kita tiba-tiba minta perubahan cepat dalam gerakan buruh. Saya yakin meskipun tidak terlalu ambisius bahwa gerakan buruh pasti akan berubah.

Nah, tiga pilar dalam isu buruh, yakni pilar jaminan kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial merupakan isu besar. Dalam ranah politik, bagaimana isu ini menjadi *output* kebijakan publik. Jika kita bercerita tentang, mohon maaf, kadang-kadang kita berada di menara gading, ideologi, dan macam-macam, maka bagi saya hal ini perlu. Namun, kemudian, isu pentingnya tidak menjadi *output* kebijakan publik. Akhirnya, kita bisa melihat bahwa sebelum dan setelah reformasi tidak ada perubahan signifikan dari serikat pekerja yang ada. Hanya saja, terjadi penambahan jumlah sehingga yang tadi telah disampaikan merupakan pecahan-pecahan saja. Namun sebaliknya, dari jumlah anggota, tidak mengalami kenaikan yang berarti (lihat tabel 1). Buruh informal relatif tidak menjadi anggota serikat. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, jika kita ingin mendapatkan capaian-capaian signifikan dalam gerakan buruh, maka gerakan buruh memang harus menjadi gerakan sosial politik, tetapi harus dipahami dulu gerakan sosial ekonomi yang tadi sudah saya sampaikan menyangkut tiga pilar.

Kita juga bisa melihat bahwa iuran buruh di Indo-

Tabel 1

No	Uraian	Sebelum	1998 - 2008	
			2007	2008
1	Konfederasi	0	3	3
2	Federasi	1 (SPSI)	90	90 (67)
3	Plant Level (PUK)	> 20.000	11.467	11.786
4	Anggota (orang)	> 5.000.000	3.388.597	3.405.615

Note:

Jumlah Pekerja (BPS Februari 2010)

1. Buruh Formal 30,72 juta orang
2. Buruh Informal 76,6 juta orang

Tabel 2.

Perbandingan iuran JHT antara Indonesia dengan Negara-negara di Asean					
NO	NEGARA	BADAN PENYELENGGARA	IURAN		
			PEMBERI KERJA	PEKERJA	TOTAL
1	SINGAPURA	CPF	20,00%	20,00%	40,00%
2	MALAYSIA	EPF	12,00%	11,00%	23,00%
3	FILIPINA	SSS	4,70%	3,30%	8,00%
4	INDONESIA	Jamsostek	3,70%	2,00%	5,70%

Perbandingan iuran JHT antara Indonesia dengan Negara-negara di Afrika					
NO	NEGARA	BADAN PENYELENGGARA	IURAN		
			PEMBERI KERJA	PEKERJA	TOTAL
1	TANZANIA	NPF	10,00%	10,00%	20,00%
2	GHANA	SSNIT	12,50%	5,00%	17,50%
3	GAMBIA	SSHF	10,00%	5,00%	15,00%
4	GABON	NDDF	5,00%	2,50%	7,50%
5	ZAMBIA	NPF	3,50%	3,50%	7,00%
6	NIGERIA	SITF	5,00%	2,50%	7,50%
7	INDONESIA	Jamsostek	3,70%	2,00%	5,70%

Sumber: Buku Jaminan Sosial, 2000

nesia menjadi salah satu yang paling rendah (lihat tabel 2). Kita kalah dibandingkan Gabon. Anehnya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang menjadi isu jaminan sosial kita, dia untung (sekitar 1,3 triliun), 55% memang dianggarkan untuk kembali kepada anggotanya. Namun, jika kita bagi dengan jumlah anggotanya, maka setiap anggota hanya kebagian Rp. 67.000,00 pertahun. Jadi, sistem jaminan sosial dikondisikan sedemikian

rupa sehingga pesertanya hanya mendapatkan jumlah yang sangat kecil. Di sisi lain, insentif untuk direksi Rp. 4,3 milyar dan memang kecil jika dihitung dari aset, tapi menjadi besar jika dihitung berdasarkan jumlah direksi dan komisaris (lihat tabel 3). Jika hal ini kita jelaskan, maka akan muncul gerakan. Namun, jika tidak, maka percuma kita berbicara tentang ideologi.

Sebenarnya, gerakan buruh di Indonesia bisa kita bagi menjadi dua. *Pertama*, gerakan buruh yang dididik teman-teman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gerakan buruh yang dididik teman-teman LSM biasanya merupakan gerakan politis, dan bukan gerakan pabrik. *Kedua*, gerakan buruh yang mereformasi diri yang melihat bahwa Serikat Perburuhan Seluruh Indonesia (SPSI) tidak layak lagi sebagai kendaraan. Dengan demikian, dari publik lagi, dalam bahasa saya, muncul lagi profesionalisme gerakan buruh. Nah, biasanya, ini tidak terdeteksi dengan baik. Mereka kuat karena persoalan.

Isu *outsourcing*, misalnya, penelitian kita dengan AKATIGA barangkali bisa menjelaskan juga. Tenaga kerja *outsourcing* ternyata dibayar 20% lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja tetap. Kemudian, mereka tidak mempunyai jaminan sosial, dan jaminan kesehatannya tidak memadai. Nah, jika persoalan-persoalan ini kita sampaikan ke buruh maka akan masuk ke dalam pikiran mereka. Selanjutnya, tinggal bagaimana mendorong ke arah gerakan politik. Sayangnya, sembilan partai besar yang ada tidak ada yang bisa menjelaskan hal itu sehingga tidak muncul partai alternatif. Oleh karena itu, jika ada partai yang bisa menjelaskan persoalan-

an-persoalan ini, maka saya adalah orang yang percaya bahwa gerakan buruh akan mengalami kemajuan dalam waktu tertentu.

Akhirnya, dalam berpolitik bagi kaum buruh, mereka dapat melakukan pilihan-pilihan dalam cara berpolitiknya, yaitu kaum buruh (Serikat Buruh/SB) menyampaikan konsep dan aspirasinya kepada partai-partai politik yang ada untuk diperjuangkan. Jika tidak demikian, maka kaum buruh (SB) dapat menempatkan orang pilihannya untuk "dititipkan" ke suatu partai politik tertentu yang mempunyai visi misi yang sama dengan SB, dan melalui orang tersebut aspirasi kaum buruh diperjuangkan, tentunya SB ikut bekerja untuk partai tersebut. Pilihan lainnya adalah kaum buruh (SB) mendirikan sendiri partai buruh sebagai alat perjuangan politiknya, tetapi pilihan ini memerlukan persyaratan-persyaratan yang ketat sekali.

Sebagai penutup, barangkali, apa yang saya sampaikan ini salah ataupun keliru, tapi itulah gunanya malam ini kita diskusi untuk memperkaya pemikiran. Kegagalan buruh dalam berpolitik karena ia muncul dari elit dan seringkali menjadi komoditas. Partai-partai buruh yang pernah ada hampir tidak mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, jika kita hendak mendirikan partai buruh alternatif, maka kita harus bertanya dulu kepada buruh. Untuk itu, langkah pertama harus adalah membentuk satu tim independen yang meluas, menyebar kuesioner/angket ke sejumlah buruh, tani, nelayan dan agamawan tentang perlukah adanya saluran politik bagi mereka. Langkah berikutnya mendorong bersatunya (mayoritas) serikat buruh yang

Tabel 3

**Hasil pengembangan Dana PT. Jamsostek
RUPS 2007 PT. Jamsostek Tentang Pembagian Laba Bersih Senilai Rp 998.393.462.589**

No	%	Nilai (Rp)	Peruntukan	Dinikmati oleh	Rata - rata perorang (Rp)
1	55	549.116.404.424	Pengembangan JHT	8,1 juta orang Peserta Jamsostek	67.174 (US \$ 6,9/thn)
2	30,57	305.170.723.403	Cadangan Perseroan dan Tujuan	Badan Usaha (PT. Jamsostek)	-
3	10	99.839.346.259	DPKP	8,1 juta orang Peserta Dalam Bentuk Pinjaman + Hibah	12.325 (US\$ 1.3/thn)
4	4	39.935.738.504	Program Kemitraan	Mitra	-
5	0,43	4.331.250.000	Insentif/Bonus	13 orang Direksi dan Komisaris	+ 240.000.000 (US \$25.000/thn)

Diolah dari berbagai sumber



ada (karena mereka merupakan organisasi kader yang sudah tertata) untuk mengadakan konvensi nasional diperluas tentang perlukah dibentuk partai buruh. Ketiga, bila mana konvensi memutuskan “perlu”, maka diadakan referendum nasional oleh tim yang dibentuk untuk itu. Keempat, bila mayoritas menyatakan setuju pembentukan partai buruh, maka dibentuk pengurus dan struktur partai yang diperluas. Kelima, maka peran Serikat Buruh kembali menjadi peran sosial ekonomi yang bersifat independen (bukan *underbouw* partai), tetapi memberikan sokongan kepada partai. Peran partai buruh memainkan peran sosial politik yang membawa aspirasi kepentingan kaum buruh dan turunannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan pemikiran ini bisa memberikan sumbangan yang berarti. Assalamu’alaikum wr..wb

Ivan A. Hadar

Ya, terima kasih. Calon pemimpin masa depan memang berbeda. Optimislah kira-kira. Tadi, para pengamatnya pesimis, tapi pelakunya justru optimis. Namun, masih ada yang menggajal. Anggota buruhnya akan *fight* jika mereka mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira ada *ndak* di kalangan buruh dimana pernah disebarkan kuisioner bahwa mereka memperoleh manfaat dari menjadi anggota serikat buruh atau jika mereka bergiat justru membahayakan.

Said Iqbal

Ukuran buruh mempunyai *sense of belonging* adalah

ketaatannya pada membayar iuran. Mereka mau membayar karena ada manfaat yang kembali kepada mereka. Ketika mereka membayar iuran maka independensi dan kekuatan gerakan buruh itu menjadi semakin kuat dan ini berarti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Minimal, nilai perjanjian kerja bersama yang menjadi anggota FSPMI di atas rata-rata normatif. Bahkan, jauh melampaui yang lainnya. Oleh karena itu, saya adalah orang yang termasuk percaya bahwa keanggotaan buruh dalam serikat mempunyai keuntungan terhadap anggota.

Ridwan Monoarfa

Yang paling konkret, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam gerakan buruh sekarang ini adalah akibat kegagalan transformasi gerakan buruh dari oligarkhi atau yang dalam kooptasi negara itu menjadi gerakan buruh yang mandiri. Nah, jika kita ingin menyebut mandiri, maka apa yang kemudian menjadi ukuran? Maka, iuran. Oleh karena itu, setidaknya, saya ingin mengatakan bahwa sebagian gerakan buruh gagal.

Kemudian, ada persoalan dalam proses demokratisasi ini harus dimaklumi bahwa kebebasan yang ada itu tidak kita baca dalam konteks kebebasan politik, tetapi keluar dari kungkungan oligarkhi, keluar dari kungkungan pemerintah, dan lain sebagainya. Ini terjadi karena kita tidak mempunyai ideologi politik, dan sosial demokrasi tidak pernah ada dalam kepala. Sebaliknya, yang ada adalah respon – dalam konteks masuknya serikat

buruh dalam partai politik dalam kasus SBI. Nah, di sini, kita berdebat apakah orang partai yang ada di gerakan ataukah orang gerakan yang ada di partai. Di luar itu, ada pragmatisme dari elit yang berusaha mencoba-coba untuk mengadu nasib karena di buruh tidak ada *income*, maka siapa tahu bisa didapatkan dari partai politik. Oleh karena ketiadaan ideologi maka negara yang begitu pro-modal tidak dilihat sebagai persoalan yang harus dikritisi. Saya kira pernyataan-pernyataan Mbak Asih itu tadi penting kita tangkap sebagai hal yang perlu kita pikirkan. Apakah betul kita telah memasuki fase gerakan?

Basis massa itu memang takut bergabung dengan organisasi. Mereka lebih tidak memilih politik dibandingkan dengan ancaman rasa keamanan. Di Batam, misalnya, saya mempunyai optimisme. Hitung-hitungan anggota kurang lebih 19 ribu. Begitu kita ikutkan elit-elit buruh maka tak satupun mendapatkan suara signifikan. Lantas saya bilang, “apa yang sebenarnya terjadi?” Saya kira memang sulit sekali mengorganisasikan buruh. Mereka antipati terhadap gerakan buruh karena elit-elitnya “menjual” seluruh perkara buruh. elit-elitnya menjual kasus-kasus sehingga elit menikmati hasil tersebut, sedangkan massa tidak berdaya. Kita bisa membayangkan bahwa sejak reformasi (1998-2001) upah naik 3%. Di situ, ketika kita hendak bergerak maka akan selalu ditanya “Anda anggota ataukah iuran?”. “Kita ingin anggota dan iuran”. Jadi, pendidikan menjadi sangat penting.

Hal yang harus dimengerti sekarang ini, ketika kita ingin menggerakkan buruh ke dalam publik maka pengusaha juga menghambat. Dalam arti, dia selalu mencari pimpinan-pimpinan PUK yang bisa diajak kerja sama. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa mentransformasi buruh ada persoalan di tingkat elit dan pemahaman sosial yang lemah. Kita terjebak dengan melihat buruh itu pabrik. Nah, situasi ini harus dibongkar. Pertanyaan sekali lagi adalah strategi apa yang harus kita ambil? Keterlibatan AKATIGA dalam penelitian banyak pelajaran yang kita ambil bahwa banyak hal yang tidak kita lihat sebagai sebuah persoalan yang harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, ada desakan

kebutuhan orang-orang di luar buruh.

Ivan A. Hadar

Nah, Mbak Asih hendak ke Bandung, dan tadi disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa penelitian ini agak telat atau datanya perlu di-*update*. Oleh karena itu, barangkali, Mbak Asih akan menyampaikan sesuatu.

Indrasari Tjandraningsih

Terima kasih. Inilah perlunya diskusi, dan mengapa diskusi menjadi hangat dan menarik. Namun, seperti semua hal di dunia, tidak ada yang bisa dipandang hanya satu sisi. Saya hanya melihat bagaimana sekarang ini kita bisa membaca situasi dengan cara Mas Iqbal membaca, saya membaca, Pak Hari, dan juga mungkin bagaimana cara teman-teman membaca.

Kadang-kadang, pada masa lalu, semacam ada sinisme bagi peneliti atau LSM agar tidak ikut-ikutan serikat buruh karena kerjanya hanya mengganggu atau dalam bahasanya Mas Iqbal menurunkan semangat. Namun, di sisi lain, bagi saya, yang menurunkan semangat itu baik untuk menjadi konsumsi internal gerakan supaya tidak terlena dengan perasaan bahwa kita sudah kuat atau mampu.

Nah, ini sama halnya dengan melihat gerakan kita itu siapa sebenarnya massanya. Dalam gerakan buruh, terdapat sub-sub gerakan. Menurut saya, hal ini tidak salah karena sub-sub gerakan ini pada suatu saat bisa disinergikan. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempersatukan seluruh elemen gerakan karena tidak mungkin. Subgerakan yang sekarang sangat taktis adalah KAJF, misalnya. Kita juga bisa melihat subgerakan di tingkat lokal, aliansi-aliansi terbangun. Ini memperlihatkan sebenarnya basis itu mulai berfikir bahwa ketergantungan terhadap pusat itu berkurang, tapi bisa juga dibaca sebagai lampu kuning. Dalam hal ini, apakah sebenarnya basis sudah tidak percaya pada kemampuan dan kapasitas pusat. Jika ini yang terjadi, maka harus ada perbaikan di tingkat pusat. Oleh karena itu, bacaan saya justru ingin memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang masih ada yang harus diperbaiki. Jika buruh yang jumlahnya 3,4 juta itu bisa

Akan lebih baik jika kita mempersatukan setiap tingkat atau subgerakan sehingga kekuatan yang padu bisa memperlihatkan bahwa gerakan buruh memang ada dalam pengertian sesungguhnya, bukan sebatas buruh bergerak ke DPR (Indrasari Tjandraningsih).



berjalan seiring dan tidak berada dalam satu organisasi, maka, dalam pemahaman saya, dalam situasi yang sulit ini, ketika kekuatan eksternal (modal) begitu canggih dan inovatif dalam menaklukkan buruh, maka alangkah baiknya jika kita bergandengan tangan dibandingkan saling menjatuhkan. Jadi, Saya kira hanya dengan cara semacam itu akan efektif, dan saya kira akan sangat baik jika masing-masing elemen gerakan seperti dosen dan lainnya saling bertukar pikiran. Ini penting karena sebenarnya hal ini sudah diulang-ulang sejak jaman Bang Ozi dulu (Fauzi Abdullah, red). Namun, mengapa hingga sekarang belum berubah? Saya menduga mengapa belum ada suatu gerakan yang sistematis karena gerakan buruh semakin lemah sebagai akibat semakin menguatnya modal atau kekuatan eksternal. Oleh karena itu, terpenting adalah bagaimana kekuatan eksternal ini bisa kita hadapi secara bersama-sama? Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Baik, terima kasih Mbak Asih. Saya kira memang untuk melihat situasi riil dari sisi pengamat tentu saja ada hal-hal yang beyond dari hal-hal yang konkret yang tadi disambung atau dikait menjadi teori. Apa sih yang mesti dilakukan? Tadi, Bung Iqbal dengan sangat konkret

sudah mengatakan apa yang mesti dilakukan? Langkah-langkah yang mesti dilakukan sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan besar. Ada yang tadi disampaikan Mbak Asih kita buang hal-hal buruk, dan kita ambil yang baik.

Djufnie Ashari (Ketua UMUM Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi)

Saya sebagai praktisi juga seperti Iqbal. Jika kita berbicara tentang gerakan buruh dan peluang tidak terlepas dari serikat buruhnya. Berbicara tentang serikat buruh atau serikat pekerja maka kita harus definisikan dulu apa serikat buruh itu? Undang-undang sudah menyebutkan hal itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan definisi itu?

Pertama, kita memperkuat buruh dari sisi keuangan, misalnya. Jika semua serikat buruh seperti SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia), maka saya kira gerakan buruh akan menjadi raksasa. Namun, jika kita tidak mempunyai uang, dan karenanya meminta ke sana ke mari, maka justru hanya menjadi alat. Bahkan, bisa menjadi serikat pekerja kertas karena hanya ada di atas kertas atau kuning karena menerima begitu saja tawaran pengusaha.

Kedua, bagaimana dengan anggota agar menjadi

besar. Jika besar, maka akan banyak yang diwakilinya sehingga suaranya akan didengar. Sebaliknya, jika anggotanya sedikit, maka bagaimana orang akan menghormatinya.

Ketiga, independensi. Nah, ini hanya mungkin jika kita mempunyai uang yang cukup. *Keempat*, setelah itu, baru kita bicara mengenai persatuan. Namun, modalnya tidak seperti Orde Baru yang semuanya masuk dalam satu organisasi. Jadi, kita memang perlu menyatukan diri, tapi bukan karena ideologi, melainkan karena isu. Isu jaminan sosial, *outsourcing*, dan lain sebagainya. Isu ini akan bisa menyatukan banyak gerakan buruh karena berdampak langsung pada mereka. Jika ideologi, maka mereka tidak tahu karena ideologinya sangat beragam. Kita juga perlu mendeteksi mana saja serikat buruh.

Berkaitan dengan jaringan, ada beberapa pola hubungan antara serikat buruh dengan Partai Politik. *Pertama*, pola Bapak Anak. Pola ini bapak melahirkan anak yang terjadi tahun 1950an. *Kedua*, anak-bapak. Bisa juga, anak melahirkan bapak. SBSI melahirkan partai politik. *Ketiga*, pola kemitraan seperti di AS. Hanya saja, untuk yang ketiga ini, harus setara antara serikat pekerja dengan partai politik. Nah, untuk Indonesia, serikat buruh bisa bersatu dan menjadi partner partai politik. Namun, partai politik di Indonesia yang mana karena semuanya “tukang bual”.

Ivan A. Hadar

Jadi, di zaman Neoliberal, ada yang bilang ketika “partai buruh” suaranya 0,0%. Massa maunya sebagai pemenang. Jika dari buruh atau dari manapun jika tidak akan menang, maka tidak akan didukung meskipun mereka peduli. Intinya, saya mau bilang sebagaimana tadi disampaikan Bung Iqbal, optimisme karena itu merupakan bagian dari menang. Ini perlu diungkap meskipun dari bantuan pengamat tadi kita menemukan lubang-lubang atau kelemahan, tapi *success story* perlu diangkat. Ada kemenangan-kemenangan dan dari anggotapun akan muncul semangat karena melihat ada kemajuan-kemajuan atau sesuatu yang dicapai.

Revifriyoso husodo

Terima kasih. Saya melihatnya begini bahwa sebenarnya kritik kapitalisme mutakhir bahwa dari jumlah buruh yang 30,7 juta ini merupakan potensi yang mestinya sudah ada gerakan. Meskipun menurut saya gerakan selalu ada hanya seberapa besar skalanya atau seberapa

signifikan. Teorinya adalah krisis yang kemudian diselesaikan melalui efisiensi agar biaya produksinya turun. Kemudian, muncul gerakan buruh yang besar. Namun sayangnya, hal ini tidak terjadi. Jika saya melihat dari segi budayanya, maka rumus tadi tidak berjalan karena gerakan kirinya adalah gerakan kiri melayu. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, kalangan gerakan hanya menguasai *hardware* saja, tapi dari segi *software* agak terlambat. Jadi, kesadarannya tidak dibangun. Jadi, siapa, bagaimana, dan media apa yang digunakan tidak dibangun sama sekali. Nah, justru saya hendak mengkritisi isu normatif bisa berbelok karena mestinya ideologis dan politik sehingga gerakan politik buruh akan membawa kesadaran. Jadi, menurut saya, dibolak-balik pun persoalannya, maka muaranya adalah siapa, bagaimana caranya, dan mediana apa? Jika kita merujuk pada kaum blangkis, maka tidak jadi soal sedikit, tapi yang penting bisa mewarnai dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam usaha semata membangun jumlah yang banyak tadi.

Arie Sujito

Terima kasih. *Pertama* sangat ingin mengapresiasi perubahan sosial ataupun konstelasi politik. Tentu saja, harus dicatat sebagai salah satu capaian buruh. Hasil ini harus kita catat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Saya kira arena-arena yang dimanfaatkan buruh juga relatif cukup banyak. Itu harus diapresiasi, dan satu fakta yang perlu kita baca sebagai bagian untuk merumuskan politik perburuhan.

Saya ingin menempatkan tafsir politik dalam tiga level agar kita tidak terjebak apakah gerakan buruh gagal ataukah berhasil. *Pertama*, politik sebagai kontestasi. Jika politik kita pahami sebagai kontestasi, maka tidak banyak buruh memang yang terlibat dalam kekuasaan. *Kedua*, politik dalam pengertian pengorganisasian. *Ketiga*, politik kita pahami sebagai berpengetahuan. Nah, ini menyangkut ideologi. Jika politik kita terjemahkan ke dalam tiga level itu, maka kita akan lebih proporsional dalam menilai buruh. Selain itu, kita juga tidak akan mungkin membuat komparasi secara membabi buta, misalnya, dalam konteks komparasi yang kita lakukan di Indonesia dan Eropa. Ini karena, dalam konteks Indonesia, kegagalan masyarakat dari tradisional ke modern kemudian industrial juga menjadi penghambat yang luar biasa. Faktor-faktor struktural yang tadi diulas teman-teman mempunyai sumbangan yang cukup berharga



mengapa kemacetan kesadaran mereka terjadi. Oleh karena itu, jika kita ingin membangun organ politik, maka kita harus membayangkan bentuk lahannya sehingga politik itu bisa tumbuh subur. Dengan kata lain, membangun struktur politik buruh harus mempertimbangkan situasi sosial yang berlangsung dalam struktur politik dan sebagainya.

Jika kita melihat dalam tiga level, maka capaian buruh di level organisasi sudah sangat baik. Ini berarti kita bisa mengajukan pertanyaan berikutnya: bagaimana kualitas pengorganisasian buruh untuk diarahkan seperti apa sehingga kita bisa mengatakan gagal ataukah tidak? Jika kita langsung mengatakan bahwa pengorganisasian yang *fragmented* itu membuat kelemahan buruh, utamanya ideologi, maka barangkali kedua hal ini tidak ada bedanya karena tidak berada dalam level yang sama. Dengan cara demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa buruh di Indonesia pada level politik pengorganisasian saya apresiasi betul. Ini karena jauh melampaui apa yang kita bayangkan, baik dalam hal variasi organisasi, kegiatan buruh luar biasa.

Kemudian, jika kegiatan pengorganisasian ini hendak kita arahkan ke politik kontestasi, maka kita berbicara politik representasi. Dengan kata lain, kita berbicara demokrasi. Persoalannya kemudian adalah struktur demokrasi kita tidak cukup subur bagi transformasi organisasi dalam pengertian politik representasi tadi. Ini terjadi karena buruh mau diproyeksi dalam pengertian politik kontestasi, tapi politik yang terjadi sekarang

adalah politik administrasi bukan politik dalam pengertian mandat. Nah, demokrasi oligarkhi, semua orang tahu itu, terjadi karena politik kita sebagai administrasi bukan sebagai tindakan berdasarkan nilai atau mandat.

Kita bisa menyaksikan sekarang ini, misalnya, orang-orang ramai berbicara mengenai politik konfederasi, merger, dan lain sebagainya. Tujuan yang ingin diraih adalah efisiensi. Itu tujuannya sebenarnya adalah agar partai-partai kecil tetap ikut, bukan karena alasan-alasan ideologis. Kemudian, ketika politik dipahami sebagai tindakan administrasi dan bukan tindakan kritis, maka orang akan dianggap berhasil jika menyesuaikan dengan administrasi politik itu. Di sinilah, ideologi tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, menurut saya, kita berbicara ideologi, tapi tidak akan, dalam konteks buruh, lahir dari *training*. Sebaliknya, berasal dari benturan dan keyakinan Bung Iqbal tadi. Jika dijelaskan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bung Iqbal maka ada pengalaman yang bersentuhan dengan mereka, bukan dengan modul-modul. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa modul atau *training* tidak penting. Namun, modul dan *training* itu seharusnya digunakan untuk memahami kontradiksi dan dialektika yang terjadi.

Sejarah buruh di Indonesia sebenarnya menarik. Oleh karena itu, saya membayangkan bahwa, menurut saya, memberi makna atas ideologi atau atas praktik sosial pabrik itu jauh lebih *urgent* dibandingkan memberi pengetahuan ideologi kepada buruh. Dengan demikian, apa yang tadi disampaikan beberapa narasumber, ba-

rangkali, lebih pas jika disebut sebagai memberi catatan kritis. Jadi, dalam pandangan saya, jika gerakan buruh ke depan hendak diproyeksikan, maka jangan sampai terjebak ke dalam administrasi politik. Sebaliknya, buruh akan lahir dari pergolakan dirinya bukan sekedar memelihara kepentingan saja. Saya kira pengalaman “partai desimal” sebagaimana tadi disampaikan Bung Iqbal bukan kelemahan buruh, tapi pelajaran yang penting kita petik. Saya usul agar gerakan buruh relevan di masa depan maka jika memang secara objektif memulai pengorganisasian maka lakukan saja. Jika kuat, maka akan berproses ke dalam ideologi berpengetahuan untuk kemudian berkontestasi sehingga politik perburuhan akan memiliki ruang. Terima kasih.

Betty Purba

Saya setuju sebenarnya dengan pendapatkan Mback Ati karena sebenarnya saya juga mempunyai pengalaman dengan hal itu. Bahkan, saya cenderung bilang jika gerakan buruh di Indonesia “jalan di tempat”. Jika tadi Bung Iqbal mengatakan bisa mengumpulkan serikat buruh, maka karena isu. Isunya sama sehingga mereka bisa kita kumpulkan. Nah, yang tidak boleh kita lupakan adalah banyak kegiatan yang dibiayai oleh donor, dan ketika donor hilang maka hilang juga kegiatannya.

Nah, saya setuju dengan pengorganisasian, sebagaimana pernah kita lakukan pada masa Orde Baru, dimana kami juga melakukan pengorganisasian meskipun mau tidak mau harus masuk ke SBSI. Meskipun begitu, terpenting adalah mereka tahu hak-hak berserikat. Pertanyaannya kemudian siapakah yang akan melakukan pengorganisasian? Buruh atukah NGO? Oleh karena itu, menurut saya, yang harus kita lakukan adalah melakukan “pencerahan” kepada mereka yang berada di tingkat *grassroot*.

Kemudian, berkaitan dengan partai politik. Jika kita hendak masuk ke dalam partai politik, maka hendaknya partai politik yang benar. Sayangnya, tidak ada partai politik yang benar. Di sisi lain, banyak teman-teman aktivis buruh yang memilih partai, tapi ideologinya kurang pas sehingga kita agak susah mendukungnya. Oleh karena itu, jika bisa mendirikan partai sendiri menurut saya bagus. Terima kasih.

Budiyono

Terima kasih, dan selamat malam. Kami dari SPSI dan kebetulan juga di LBH hukum. Kita mendirikan

partai buruh dalam rangka perjuangan serikat buruh, dan kita sebetulnya sedang mengarah pada adanya perjuangan bukan hanya serikat buruh, tapi jika ada partai politik mengapa tidak.

Persoalan yang kita hadapi sebenarnya adalah kita tidak mempunyai pilihan lain. Misalnya, outsourcing dan kontrak harus kita terima karena memang tidak ada pilihan, dan kita berjuang untuk itu. Oleh karena itu, menurut saya, pada akhirnya, orang memilih “perutnya” sehingga cukup melemahkan gerakan serikat buruh. Jika kita ikut serikat buruh, maka akan di-PHK maka “Ya sudah kita trima saja”. Terlebih, jika sudah mempunyai anak-istri maka pilihannya adalah akan tetap bekerja. Dengan demikian, penting sebenarnya untuk mengubah undang-undang itu ke arah yang lebih baik, tapi sayangnya tidak ada inisiator-inisiatornya sebagaimana tadi telah banyak disampaikan.

Dari LBH buruh sebenarnya, kita sudah memperjuangkan dalam gugatan untuk menggugat undang-undang SJSN karena undang-undang tersebut dari sejak diundangkan hingga lima tahun belum diimplementasikan. Oleh karena itu, jika ada teman-teman dari serikat buruh yang hendak menggugat SJSN, maka mari kita lakukan sama-sama. Kita sudah ada konsepnya untuk melakukan gugatan itu sehingga kita bisa bersama-sama bisa melawan. Saya kira jika undang-undang SJSN bisa diberlakukan untuk seluruh masyarakat, maka gerakan buruh akan kuat. Ini karena setiap orang yang sudah masuk SJSN akan mendapatkan perlindungan kesehatan dan pensiun pada hari tua sehingga jika hal ini disadari, maka gerakan serikat buruh akan menjadi semakin kuat. Nah, inilah, menurut saya, sebagaimana tadi disampaikan Bung Iqbal, sebagai cikal bakal gerakan buruh yang akan mengawal partai-partai yang mungkin bernafaskan buruh, yang lebih bisa memperjuangkan kepentingan buruh. Jadi, bukan lagi orang lain yang akan memperjuangkan nasib buruh.

Enung Yani

Baik terima kasih. Kebetulan saya berada di *grassroot*. Saya memikirkan bahwa perut memang harus dipenuhi terlebih dahulu, tanggung jawab terhadap keluarga juga harus dipenuhi sehingga bisa melakukan gerakan politik. Tanpa melakukan gerakan politik, saya kira buruh tidak akan mampu memperjuangkan haknya. Menurut saya, mengapa mereka tidak tertarik dengan politik praktis karena pendidikan politik itu sendiri yang kurang.

Ada beberapa kisah sukses barangkali ketika ada tawaran advokasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nah, di puncak acara, ketika menghadirkan para kontestan (partai politik, *red*) mereka tidak menjanjikan apa yang diinginkan buruh. Akibatnya, kita tidak mempunyai alternatif pilihan yang cukup meskipun ada Partai Pekerja waktu itu. Namun, ia juga tidak bisa memberikan jawaban atas tuntutan kaum buruh.

Ivan A. Hadar

Faktanya memang kandidat yang masuk ke parlemen berasal dari partai yang berbeda-beda, dan biasanya mereka juga harus bertarung dengan fraksinya masing-masing. Oleh karena itu, memang harus ada isu bersama yang bisa diadvokasi. Silahkan, Bang Amir.

Amir Effendi Siregar (Pemimpin Redaksi Jurnal Sosdem)

Terima kasih. Dari diskusi yang panjang tadi, barangkali memang, kita memerlukan apa yang kita sebut sebagai, dalam pikiran saya, *rethinking labour movement* Indonesia. Sebagai ilustrasi saja, kadang-kadang, saya juga terkejut. Di Brazil, nama partainya adalah Partai Pekerja (*Workers Party*). Saya juga heran mengapa namanya *Workers Party* dan bukannya *Labour Party*. Barangkali, ada hal-hal spesifik yang sifatnya kontekstual. Mungkin, ini yang perlu kita pikirkan, hal-hal yang bersifat spesifik. Tadi, sudah dicontohkan bahwa buruh ini didekati dengan kasus-kasus, tapi tanpa perspektif ideologis maka tidak bisa didekati dengan kasus-kasus. Meskipun ideologi itu disusun melalui realitas yang panjang. Nah, ideologi inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mendekati kasus-kasus. Tadi, yang disampaikan oleh Iqbal mengenai gaji yang kecil, dan lain sebagainya mengandung perspektif ideologis. Jadi, mau tidak mau kita harus belajar perspektif ideologis yang sifatnya universal, dan yang sifatnya lokal. Dua objek ini bisa dipakai untuk kemudian bisa mengidentifikasi realitas itu. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, fungsi teman-teman yang ada di sinilah yang merumuskan ideologi yang bisa digunakan oleh banyak pihak untuk mendekati realitas sebagai isu. Meskipun begitu, rumusan-rumusan itu harus melihat, misalnya, posisi buruh dan pengusaha bagaimana? Jika kita melihat pengusaha semata-mata sebagai musuh besar, maka ada perspektif ideologisnya. Namun, jika pengusaha itu dipaksa atau ditekan untuk

juga mempunyai tanggung jawab sosial, maka itupun ada perspektif ideologisnya. Kemudian, jika pengusaha di AS hanya di-tax hanya 30%, sedangkan di Skandinavia 45%, perspektif apakah yang digunakan untuk masing-masing kebijakan tersebut? Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita melihat hubungan antara buruh dan pengusaha? Mengapa, misalnya, FES mau mensponsori sebuah kegiatan ekonomi dan bisnis tentunya ingin memasukan suatu perspektif ideologis yang sifatnya sosial-demokrat dalam semua pekerjaan pengusaha. Ini yang disebut dengan fungsi sosial dari pengusaha. Termasuk di dalamnya, *market economy*. Nah, apakah *market economy* ditolak, tentu saja tidak. Namun, *market economy* harus berfungsi sosial atau yang kemudian disebut sebagai *social market economy*. Ini bukan berarti bahwa saya adalah *true believers* Sosdem, tapi apa yang saya bilang bahwa sosdem itu sendiri yang utama mengandung *freedom*. Sesuatu yang harus ada. *Freedom* tanpa *social justice* akan melahirkan otoritarianisme. *Freedom* tanpa *diversity* akan melahirkan otoritarianisme baru. Oleh karena itu, menurut saya, perspektif ideologis ini harus kita kuasai. Jadi, *freedom*, *social justice*, dan *solidarity*. Itulah tiga prinsip pokok. Jadi, menurut saya, harus ada *rethinking labour movement*. Kemudian, kita rumuskan indikator-indikator penting hubungan antara negara dengan modal dan hubungan antara buruh dengan pengusaha. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengidentifikasi persoalan. Saya setuju dengan Iqbal bahwa untuk buruh kita memerlukan isu bersama, tapi isu bersama tidak mungkin diidentifikasi tanpa perspektif ideologis. Terima kasih.

Mian Manurung

Terimakasih bung Moderator. Belajar dari pengalaman Jerman, dalam hal ini Partai Sosial Demokrat-nya (SPD), yang telah berdiri ratusan tahun yang diawalnya bermula dari gerakan buruh pada tahun 1848, kemudian menjadi Partai Buruh Sosdem tahun 1869. Bila kita hitung tahun 2010 ini telah berusia 141 tahun, pertanyaannya kenapa masih tetap *exist* dan diterima sebagian besar masyarakat Jerman. Melihat sejarah panjang itu, ada pelajaran penting yang dapat dipetik, sejak awal mereka memulainya dengan ideologi, bila tidak salah saat itu dimulai dari 'manifesto komunisnya' Karl Marx. Kemudian yang selalu berproses 'jatuh-bangun' menyesuaikan diri dengan keadaan secara terus menerus sesuai zaman dan kebutuhannya. Nah inilah yang menjadi pertanyaannya, dan mungkin ini bisa menjadi refleksi

untuk kita, kok bisa ya? Mengapa partai itu bisa bertahan ratusan tahun, dengan tidak keluar dari ide perjuangan awalnya?

Kemudian, saya melihat bahwa sejak awal gerakan buruh di Jerman yang kemudian bertransformasi ke gerakan politik, itu juga menjaga keutuhannya sebagai serikat pekerja, bahkan hanya menjadi satu konfederasi yaitu DGB. Saya sepakat dengan Bung Iqbal, bahwa kita bisa berdebat panjang tentang pandangan politik, kita bisa mempunyai pilihan dan pandangan politik yang berbeda, tetapi sebagai serikat pekerja kita jangan sampai pecah. Ini sangat penting, seperti DGB-Jerman mempunyai slogan "*We are independent but we are not neutral*", artinya dalam urusan Serikat Pekerja kita independen tetapi dalam politik kita tidak boleh netral. Dalam kasus di Jerman, anggota DGB tidak semuanya menjadi anggota SPD, pilihan politiknya bisa berbeda-beda, tetapi ketika berbicara kepentingan serikat atau pekerja mereka satu kata. Sebagai contoh riil ini, barusan saya mendapatkan fotokopian dari teman SBSI yang akan menggugat hal SJSN ke Mahkamah Konstitusi, ini ide bagus tetapi persoalannya adalah kenapa kawan serikat yang lain tidak diajak ikut? Padahal yang diperjuangkan juga *toh* sama.

Kembali ke masalah Partai, dalam pandangan saya partai di Indonesia itu *nggak* jelas ideologinya yang mana, atau *nggak* punya ideologi barangkali? Tidak terlihat program yang jelas yang dapat membedakan partai yang satu dengan yang lainnya. Tampaknya partai itu adalah cerminan dari pemimpinnya, sehingga partai itu menjadi representasi orang bukan kelembagaan. Akibatnya bila ada perselisihpahaman antar pemimpinnya maka partai itu akan pecah. Saya khawatir kawan-kawan di Serikat Pekerja di Indonesia ini juga demikian.

Ide pembentukan partai buruh, yang sudah dimiliki Bang Mughtar (Mughtar Pakpahan, Seorang tokoh gerakan buruh, *red*), sudah baik, tetapi mungkin ada kesalahan di awal ketika pembentukannya, seperti tadi sudah diutarakan oleh bung Iqbal, apakah sudah dipertanyakan lebih dahulu dengan seluruh anggota SBSI ketika itu, dan juga dengan Serikat-Serikat Pekerja lainnya, tentang kesiapan untuk membangun partai buruh.

Saya berharap, bahwa di masa yang akan datang terbentuk sebuah partai yang berasal dari buruh yang kuat dan didukung oleh anggotanya dan mempunyai iuran. Saya yakin kawan serikat yang sudah membudayakan iuran itu juga akan tertular ke partai. Partai yang mewajib-

kan anggota mengiur itu akan menjadi partai yang kuat dan solid, karena dengan berkontribusi, setiap anggota merasa partai itu miliknya dan karenanya pasti berusaha merawat keutuhannya, membesarkan dan membuatnya lebih maju, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan banyak orang tentu saja.

Kembali ke gerakan buruh di Jerman, pada kurun awal mereka berjuang dalam kerangka tujuan yang sangat sederhana, bertahap dan tentunya solid. Tahap awal mereka berjuang untuk 8 jam kerja sehari. Setelah terpenuhi mereka berjuang untuk perbaikan kondisi dan keselamatan kerja. Selanjutnya tuntutan bantuan perumahan bagi buruh, yang saat itu memang sangat menyedihkan kondisinya. Seperti kondisi buruh pabrik kita saat ini barang kali ya, sekamar *share* untuk lima orang. Kemudian memperjuangkan pemberian beasiswa untuk anak-anak buruh, yang saat itu tidak mampu untuk mengirimkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. Baru setelah kurang lebih 35 tahun, sekitar 1883 mereka membicarakan tentang masalah jaminan sosial, saat itu yang pertama adalah Jaminan Kesehatan. Nah saya bermimpi, kalau suatu saat serikat pekerja kita, bergabung menyatukan kekuatan bersama untuk satu isu ke isu lainnya. Kalau semakin pecah-pecah pastinya akan semakin tidak kuat. Saya kira itu dahulu, terimakasih.

Ivan A. Hadar

Jika militer mengatakan, maka persatuan dan kesatuan. Kita sampai jam 24 ya? Silahkan.

Safrudin

Saya setuju terhadap apa yang tadi disampaikan mengenai *rethinking labour movement*. Namun, dari itu semua, buruh juga memahami, dan itu pula yang dipraktikkan oleh KAJIS. Ke depan, konfederasi tersebut mengurus negara. Artinya, buruh-buruh sudah menyadari dimana sumber martabat berasal, dan itu harus dibongkar. Urusan-urusan bagaimana pertentangan modal atau pengusaha akan menjadi urusan konfederasi. Oleh karena itu, saya sepakat bahwa pengorganisasian merupakan basis pertama, ideologi basis kedua, dan ketiga kontestasi. Dengan pemahaman semacam itu, buruh juga menyadari dan kita juga telah melakukan penyadaran dan memahami apa yang diucapkan oleh Bapak Revolusi kita, Soekarno. Kaum buruh atau proletar harus di depan. Itu juga sudah kita sadari. Namun, ada hal yang harus kita sadari adalah jangan membawa bu-

ruh ke dalam pengertian Marxisme-Leninisme. Dalam pandangan saya, yang terpenting adalah bagaimana membangkitkan kolektabilitas di Indonesia, yang berarti bahwa buruh tidak berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana membangun kolektivitas ini? Jika buruh mempunyai potensi, maka adalah diantara kita memikirkan kekuatan kolektivitas itu? Buruh memang bisa menjadi motor perubahan, tapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Jerman, sebagaimana tadi disampaikan mempunyai sejarah, dan itu bisa dari Barat atau Timur, tapi saling melengkapi. Saya kira itu. Terima kasih

Ivan A. Hadar

Ada yang lain?

Sabinus

Jika berbicara mengenai serikat buruh, maka ketika mahasiswa kami adalah kelompoknya PRD. Kita sering mengorganisasi buruh. Saya melihat ada kemunduran gerakan buruh. Ini terjadi karena orang-orang yang selama ini mengorganisasikan buruh sekarang menjadi elitis. Menurut saya, tidak ada regenerasi atas itu.

Di Indonesia, saya kira gerakan buruh dilemahkan oleh banyak hal. Negara, terutama dalam konteks Orde Baru, ikut serta dalam melemahkan gerakan buruh. Setiap orang yang berupaya melakukan gerakan buruh dicap sebagai komunis. Nah, oleh karena itu, siapa yang memilih partai buruh maka ia akan dicap sebagai PKI. Oleh karena itu, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Mochtar bisa dianggap sebagai pemicu kawan-kawan untuk mempunyai kesadaran bahwa kita memang harus mempunyai gerakan politik atau partai politik.

Saya melihat bahwa buruh harus disadarkan. Namun, pertanyaannya adalah siapa yang harus menyadarkan dan mengorganisir buruh? Pengalaman masa lalu adalah kaum terpelajar sehingga, dalam pandangan saya, terbangunnya buruh tidak oleh serikat buruh itu sendiri, tapi pihak lain, yang dalam hal ini mahasiswa atau terpelajar. Namun, pertanyaan saya lainnya adalah bagaimana kita bisa melakukan monitor atas elit-elit ini supaya tidak menjadi elitis sehingga melupakan basisnya. Nah, dalam hal ini, saya belum bisa melihat siapakah yang akan mengontrol mereka?

Saya sepakat dengan Bung Iqbal bahwa jika kita hendak mendirikan partai buruh maka lakukan tahapan-tahapan sebagaimana tadi telah disebutkan. Namun, saya lama ikut Pak Mochtar, tapi sepertinya serikat-

serikat buruh tidak ada yang mau maju. Para pemimpin-pemimpin serikat buruh yang mestinya menganjurkan para anggotanya untuk memilih partai buruh, tapi itu tidak pernah ada. Sebaliknya, mereka menganggap jika memilih partai buruh, maka akan menguntungkan Pak Mochtar sendiri. Itulah persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini.

Ivan A. Hadar

Baik, terima kasih. Masih berapa lagi kira-kira? Nah, *open house* masih berapa menit lagi karena kita sudah lebih dari jam 10 (22.00 WIB). Silahkan jika ada yang lain.

Nursyaifuddin

Assalamu'alaikum. Saya melihat memang persoalan yang kita hadapi dalam gerakan buruh ini hanyalah transisi posisi saja. Ini karena jumlah gerakan buruh tidak mengalami perubahan signifikan sejak masa Orde Baru. Lucunya, yang bertambah adalah federasinya. Jadi, yang bergerak bukan rakyatnya (anggota buruh, *red*), tapi elit-elit gerakan buruh. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang adalah gerakan elit buruh dan bukannya gerakan buruh itu sendiri.

Saya sepakat dengan Bung Iqbal bahwa optimisme penting, tapi kita harus menyadari kelemahan-kelemahan gerakan buruh agar menjadi kendali kita dalam memunculkan optimisme. Ini penting agar kita tidak terjebak ke dalam politik administrasi sebagaimana tadi telah disampaikan. Itu satu hal yang sebenarnya telah disadari oleh buruh, tapi tidak diakui. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus mengakui hal itu jika kita ingin belajar berubah untuk satu gerakan.

Dalam pandangan saya, apa yang terjadi di kalangan elit ini sebenarnya hanya keinginan untuk merebut catatan-catatan sejarah dari kalangan elit. Si A membuat apa, B apa? Dan lain sebagainya sehingga muncul fragmentasi yang luar biasa. Isu-isu yang dibawa dalam gerakan buruh di Indonesia mengenai isu kesejahteraan, misalnya, karena isu ini tampaknya menarik di mata funding, dan lain sebagainya. Pun, demikian dengan ketika kita membahas Undang-Undang no. 13.

Pandangan-pandangan ini saya sampaikan bukan sebagai wujud pesimisme, tapi sebagai usaha untuk mengingatkan gerakan buruh. Ini penting agar jangan sampai kita terjebak ke dalam, sebagaimana tadi disampaikan, masalah yang sama. Saya kira itu betul. Tanpa

sadar, negara sudah semakin memojokkan gerakan buruh. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terakhir mengatakan bahwa 10% pun bisa berunding. Ini jika menurut saya.

Saya berharap pemahaman yang muncul dalam diskusi kita malam ini bukan hanya pemahaman yang ada diantara elit buruh. Sebaliknya, mari bersama-sama menelurkan pemahaman ini kepada anggota kita masing-masing sehingga gerakan buruh bisa menjadi gerakan yang masif. Ada organisasi dan tujuan yang jelas sehingga ketika kita hendak membangun ideologi maka pemahaman sudah ada. Dengan demikian, kita tinggal membuat ideologis yang sesuai karena gerakan buruh tanpa ideologi seperti tidak mempunyai nyawa. Kita hanya sebatas robot. Itulah catatan-catatan saya, dan saya kira kita perlu mengatur waktu agar diskusi ini menjadi lebih efektif. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Terima kasih. Nah, apa yang tadi disampaikan sudah menjadi penutup. Sebagai kilas balik, konstelasi yang hadir pada malam hari ini tampaknya kita hanya berbicara diantara kita-kita saja, pengamat, pelaku, dan lain sebagainya yang semuanya *concern* terhadap gerakan buruh. Ada yang diundang, misalnya, dari parlemen, eksekutif, tapi tidak bisa hadir karena sepertinya mereka juga mempunyai tanggung jawab lain. Narasumber yang hadir pada malam hari ini baik Pak Hari, Mbak Ati, dan juga Bung Iqbal telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai gerakan buruh. Termasuk di dalamnya, kondisi riil gerakan buruh. Dalam dapurnya sendiri saja, gerakan buruh sudah menghadapi tantangan yang luar biasa.

Bung Iqbal tadi sudah menyampaikan rasa optimismenya, dan juga isu karena isu bisa membawa persatuan dan kesatuan. Istilah yang militeristik, kira-kira begitu. Pertanyaan mengenai mulai dari mana maka sebenarnya tadi sudah disampaikan Bung Jito mengenai pemahaman yang mungkin ujung-ujungnya ideologi yang tadi juga disampaikan Bang Amir. Tanpa ideologi memang susah, tapi ketika sudah ada pemahaman, keyakinan, dan arah ke depan maka isu-isu yang kecil bisa menjadi taktis strategis bisa membuat atau menarik minat kelompok yang mau bergabung.

Tadi, disebut-sebut mengenai negara. Barangkali, perlu juga diklarifikasi karena di Indonesia pemahaman pemerintah sama atau dengan negara. Saya kira pem-

ahaman semacam ini harus kita bongkar. Sebetulnya, dalam Undang-Undang 1945 sebutkan bahwa negara wajib menjamin hak pekerjaan yang sangat layak. Nah, bagaimana mem-*break down*-nya menjadi undang-undang menjadi tugas pemerintah. Ini bisa juga kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, negara harus dibedakan dengan pemerintah. Pemerintah boleh jatuh bangun, bertukar-tukar, dan sebagainya, tapi negara harus tetap ada. Negara melalui undang-undang atau konstitusi diwakilkan kepada pemerintah, dan harus melaksanakan tugas-tugas negara. Ini terjadi di negara-negara yang demokrasiya tidak hanya prosedural. Ada hal-hal yang mesti dirundingkan oleh pemerintah, dan jika hal ini tidak dilakukan, maka ada otoritas tertinggi yang mewakili negara akan memberikan *punish* atas hal itu. Di Indonesia, dalam beberapa hal, sudah melakukan hal itu meskipun belum sempurna. Namun, fungsinya sudah mulai kelihatan bagaimana pemerintah seharusnya memahami konstitusi. Kira-kira seperti itu. Jadi, ke depan, barangkali, ada hal-hal yang kritis, tapi ada hal-hal yang optimis. Nah, kita akan memuat hasil diskusi malam ini dalam Jurnal Sosial Demokrasi. Atas nama FES dan Jurnal Sosdem kami mengucapkan terima kasih, dan menjadi pahala. Saya juga meminta maaf jika ada kesalahan, wassalamu'alaikum, dan tepuk tangan untuk kita semua. ■



MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL POLITIK BURUH

Pendahuluan

Gerakan buruh mengalami pasang surut. Sejak awal, gerakan buruh mengalami radikalisasi, tapi kemudian surut. Pada masa awal kemerdekaan, gerakan buruh mempunyai ruang cukup baik untuk merepresentasikan dirinya. Mereka bahkan terlibat aktif dalam gerakan politik atau secara lebih khusus menjadi organ-organ partai politik. Pada masa Orde Baru, gerakan buruh bisa dikatakan mati suri. Politik perburuhan yang dilakukan Orde Baru hampir sama sekali menghabisi gerakan buruh. Bahkan, dalam banyak kasus, gerakan buruh menjadi apolitis.

Ketika demokratisasi kembali menyeruak di Indonesia oleh gerakan reformasi, ada harapan bahwa gerakan buruh akan bangkit. Namun, pada kenyataannya, beberapa persoalan masih menghinggapi gerakan buruh, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meskipun begitu, sebuah gerakan sosial ataupun politik harus dirumuskan agar gerakan buruh mampu mewarnai sejarah demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks itulah, sebuah pertanyaan krusial layak dirumuskan, bukan hanya dalam konteks melihat eksistensi gerakan politik buruh sekarang ini dengan berbagai persoalan yang ada, tapi yang lebih penting adalah apa yang mesti dilakukan agar gerakan buruh kuat di masa datang?



Persoalan Gerakan Buruh

Membangun gerakan sosial dan politik buruh yang kuat tidak akan mungkin tanpa melihat persoalan yang dialami buruh saat ini, yang menurut Hari Nugroho, ada dua persoalan pokok, yakni eksistensi gerakan buruh dan kemungkinan transformasi gerakan buruh. Persoalan eksistensi dan transformasi gerakan buruh atau secara luas gerakan buruh itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran Orde Baru dalam melakukan kooptasi terhadap gerakan buruh. Dalam bahasa Indrasari Tjandraningsih, politik perburuhan yang dilaksanakan Orde Baru berlangsung sangat efektif dan mematikan gerakan buruh, baik sebagai gerakan politik maupun lainnya.

Hari Nugroho menjelaskan beberapa persoalan pokok mengenai perburuhan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pemutusan jaringan politik gerakan buruh. Pembubaran SOBSI menjadi contoh yang bisa dijadikan rujukan. Kedua, politik korporatis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Di sini, buruh lebih dilihat sebagai “keluarga besar” negara, dan

orang-orang yang berada di dalamnya atau orang-orang yang memimpin serikat buruh lebih sebagai representasi pemerintah dibandingkan buruh. Ketiga, eksklusi sosial politik terhadap semua aliran gerakan buruh. Ini bisa dilihat dari praktik-praktik stigmatisasi gerakan buruh sebagai radikal atau yang paling ekstrim sebagai komunis atau PKI. Akibatnya, rantai politik ini menjadi hilang secara fundamental, dan dalam beberapa kasus buruh menjadi apolitis. Keempat, dalam arena politik formal, adanya kekuatan oligarkhis yang sangat kuat. Ketika parlemen menjadi sebuah arena “transaksi politik” atau kompromi politik, dan kemudian representasi politik tidak berjalan maka pertimbangan politik isu-isu krusial perburuhan yang diangkat ke permukaan akan sangat berbeda. Kondisi ini menjadi semakin buruk ketika dilihat persoalan ideologi partai. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana disampaikan Ivan A. Hadar, secara formal, partai politik mungkin mendukung semua masyarakat, termasuk buruh, tapi dalam praktiknya tidak demikian. Sebaliknya, justru banyak produk kebijakan atau un-

dang-undang yang merugikan gerakan buruh.

Di sisi lain, menurut Indrasari Tjandraningsih, ada persoalan besar dalam organisasi serikat buruh mulai dari sumber daya manusia (SDM), keuangan, hingga strategi gerakan. SDM buruh sangat lemah baik di jajaran pengurus dan lebih-lebih di jajaran basis. “Gerakan buruh” juga sangat miskin strategi dan inovasi. Padahal strategi dan inovasi ini penting agar eksistensinya dipercaya baik oleh konstituennya maupun oleh gerakan-gerakan sosial lainnya atau masyarakat lain secara luas.

Lemahnya gerakan sosial politik buruh, menurut Ridwan Manoarfa, disebabkan oleh kegagalan transformasi gerakan buruh dari oligarkhi atau dari kooptasi negara menjadi gerakan buruh yang mandiri. Kegagalan transformasi ini terjadi karena persoalan di tingkat elit dan pemahaman sosial yang lemah. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi gerakan buruh. Ini bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah serikat pekerja di tengah stagnasi jumlah anggota. Dengan kata lain, jumlah serikat buruh mengalami kenaikan pesat, tapi jumlah anggotanya stagnan. Fragmentasi ini tidak hanya membuat gerakan buruh lemah karena terpecah-pecah, tapi juga berimbas pada persoalan SDM sebagaimana disinyalir oleh Indrasari Tjandraningsih. Meskipun demikian, pelaku gerakan buruh, Said Iqbal, justru melihat sebaliknya. Menurutnya, fragmentasi gerakan buruh tidak terbaca ketika buruh dihadapkan pada isu yang sama, misalnya, Jaminan Sosial. Dalam hal ini, hampir semua elemen gerakan buruh bergabung, dan isunya bukan lagi semata isu buruh, tapi isu rakyat, yakni jaminan sosial. Menurut Iqbal, ada tiga *highlight* menjadi pedoman aksi jaminan sosial ini, yakni jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat, jaminan pensiun untuk pekerja formal, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah wali amanat, oleh rakyat sebagai stakeholder, bukan lagi PT atau BUMN.

Membangun Ideologi Gerakan Buruh

Ideologi sangat penting bagi sebuah gerakan buruh. Namun, sebagaimana dikemukakan Arie Sujito, ideologi tidak lahir dari training dan modul, tapi berangkat dari benturan realitas. Dalam konteks gerakan buruh, ideologi ini menjadi problematis karena proses deideologisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Lemahnya pendidikan politik di tingkat buruh juga membuat proses ideologisasi buruh menjadi terhambat. Kesadaran tidak terbangun karena kurangnya pengetahuan buruh di

tingkat grassroot. Padahal, sebagaimana dikemukakan Amir Effendi Siregar, “Mau tidak mau kita harus belajar perspektif ideologis yang sifatnya universal, dan yang sifatnya lokal. Dua objek ini bisa dipakai untuk kemudian bisa mengidentifikasi sehingga perspektif ideologis ini harus kita kuasai”. Menurut Amir Effendi Siregar, realitas hanya bisa dikenali ketika kita mempunyai perspektif ideologis sehingga pengetahuan tentang ideologi menjadi keharusan.

Kemudian, agar ideologi menyentuh ke dalam gerakan buruh, maka, menurut Hari Nugroho, ideologi harus diterjemahkan dari premis-premis yang lebih fundamental tentang hubungan antara perorangan dengan masyarakat, hubungan perorangan dengan negara. Selain juga bagaimana hubungan itu dilakukan. Menurut Arie Sujito, “Yang terpenting adalah memberi makna atas ideologi atau atas praktik sosial pabrik dibandingkan memberi pengetahuan ideologi kepada buruh”.

Partai Politik Buruh

Kegagalan partai politik buruh yang muncul selama reformasi atau pascareformasi jika bisa dibilang demikian juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan dalam buruh itu sendiri. Menurut Hari Nugroho, berbicara tentang kegagalan partai politik buruh berarti berbicara tentang kontradiksi antara ketersediaan peluang dan ketidakmatangan gerakan sosial ke dalam gerakan politik. Gerakan buruh belum matang untuk menjadi gerakan politik. Selain itu, basis kolektivisme yang sempit. Ini terjadi karena mobilisasi sumber daya yang terbatas dan kelemahan mengidentifikasi kelas sebagai konstituen. Padahal, kolektivisme merupakan bagian penting gerakan.

Di sisi lain, dalam politik gerakan buruh, persoalan yang dihadapi juga berasal dari representasi identitas. Sebagaimana dikemukakan Hari Nugroho, “Sebagai sebuah hasil studi sementara-ketika pemilu serikat pekerja tidak menjadikan identitas pekerja sebagai identitas politiknya. Sebaliknya, yang muncul adalah identitas politik yang lain, misalnya, pilihan ideologis, agama ataupun yang berkaitan dengan historis”. Persoalan pendidikan buruh di tingkat *grassroot* juga menjadi persoalan yang membuat gerakan buruh lemah. Di sini, persoalan ideologi muncul. Ada beberapa gerakan buruh yang sangat ideologis, tapi sayangnya basis massanya kecil, sedangkan yang massanya besar masih melakukan proses pencarian.

Terlepas dari kelemahan dan kegagalan yang pernah terjadi, gerakan sosial politik, seperti dikemukakan Said Iqbal, adalah nafasnya gerakan buruh. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan capaian-capaian signifikan dalam gerakan buruh, maka gerakan buruh memang harus menjadi gerakan sosial politik. Lebih lanjut, Ivan A. Hadar mengemukakan bahwa jika berkaitan dengan perbaikan kehidupan buruh, maka hal ini berhubungan dengan undang-undang, gaji, lingkungan dan lain sebagainya. Namun, jika berhubungan dengan nasib buruh, maka, menurut Tan Malaka, itu berkaitan dengan partai politik. Dengan kata lain, menurut Ivan A. Hadar, harus ada wadah yang bisa digunakan untuk mengubah nasib buruh dengan berbagai dimensinya dan menjadi sebuah gerakan. Dalam konteks inilah, keberadaan partai politik buruh atau setidaknya yang mewakili aspirasi buruh menjadi penting.

Sayangnya, dalam kaitannya dengan partai politik, menurut Mian Manurung, persoalannya adalah partai yang ada di Indonesia tidak mempunyai ideologi. Mereka tidak mempunyai program yang jelas. Akhirnya, partai itu merepresentasikan orang sehingga ketika orang-orang yang ada di belakangnya saling berantem, maka partai itu pecah. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bisa mendirikan partai buruh, yang dalam keyakinan Mian Manurung bisa menjadi besar?

Menurut Said Iqbal, kegagalan buruh dalam berpolitik karena ia muncul dari elit dan seringkali menjadi komoditas. Partai-partai buruh yang pernah ada hampir tidak mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, jika kita hendak mendirikan partai buruh alternatif, menurut Said Iqbal, maka kita harus bertanya dulu kepada buruh. Untuk itu, langkah pertama adalah harus membentuk satu tim independen yang meluas, dan menyebar *questioner/* angket ke sejumlah buruh, tani, nelayan dan agamawan tentang perlukah adanya saluran politik bagi mereka. Langkah berikutnya mendorong bersatunya (mayoritas) serikat buruh yang ada (karena mereka merupakan organisasi kader yang sudah tertata) untuk mengadakan konvensi nasional diperluas tentang perlukah dibentuk partai buruh. *Ketiga*, bila mana konvensi memutuskan "perlu", maka diadakan referendum nasional oleh tim yang dibentuk untuk itu. Untuk menanyakan kepada seluruh buruh, tani, nelayan dan agamawan, setujuakah mereka dengan dibentuknya partai buruh ini. *Keempat*, bila mayoritas menyatakan setuju pembentukan partai buruh, maka dibentuk pengurus dan struktur partai yang

diperluas. *Kelima*, peran Serikat Buruh kembali menjadi peran sosial ekonomi yang bersifat independen (bukan *underbouw* partai), tetapi memberikan sokongan kepada partai. Dalam kaitan ini, partai buruh akan memainkan peran sosial politik yang membawa aspirasi kepentingan kaum buruh dan turunanya.

Penutup

Tidak seluruh gerakan buruh tentu saja mengalami kegagalan. Setidaknya, jika tiga level tafsir politik Arie Sujito digunakan, yakni: *pertama*, politik sebagai kontestasi. Jika politik kita pahami sebagai kontestasi, maka tidak banyak buruh memang yang terlibat dalam kekuasaan. *Kedua*, politik dalam pengertian pengorganisasian. *Ketiga*, politik kita pahami sebagai berpengetahuan. Dalam hal pengorganisasian, menurut Sujito, kita bisa mengatakan bahwa buruh di Indonesia pada level politik pengorganisasian saya apresiasi betul. Ini karena jauh melampaui apa yang kita bayangkan, baik dalam hal variasi organisasi, kegiatan buruh luar biasa.

Beberapa hal kiranya perlu dilakukan untuk membangun gerakan buruh yang kuat. *Pertama*, membuka sekat-sekat sosial dan politik kepada isu-isu lain yang berdampak kepada persoalan perburuhan. Misalnya, persoalan buruh berkait erat dengan persoalan kemiskinan, korupsi, *fair trade*, dan lain sebagainya. *Kedua*, memahami dinamika politik lokal. Ketika politik lokal itu menjadi penting maka memahami struktur politik lokal kemudian juga menjadi sangat penting. Dalam hal ini, memahami isu sosial dan politik lokal menjadi penting bagi konsolidasi gerakan buruh yang lebih luas. *Ketiga*, membaca basis massa. Menurut Indrasari Tjandraningsih, ketika kita berbicara mengenai serikat buruh maka yang seringkali dibicarakan adalah elit-elitnya. Karakter basis buruh justru seringkali dilupakan. Padahal, ada perubahan karakter basis. Persoalannya adalah jarang sekali ada yang melihat perubahan ini. Gerakan itu intinya adalah massa. Namun, ketika massa itu tidak kita cermati wujudnya maka sebuah gerakan bergerak dengan asumsi. *Keempat*, di atas semuanya, pentingnya membangun optimisme secara kritis. Ini karena, menurut Said Iqbal, jika gerakan buruh selalu dilihat dari kaca mata yang pesimis, maka lama-lama gerakan buruh akan benar-benar tidak bisa bangkit. ■



Kebebasan Berserikat: Jauh Panggang dari Api¹

Endang Rokhani²



Pengantar

Salah satu yang dihasilkan dari gerakan reformasi bagi gerakan buruh di Indonesia adalah disyahnkannya Undang-undang no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lahirnya UU No. 21 ini disambut dengan sangat antusias oleh kalangan buruh ataupun dunia perburuhan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya serikat buruh yang baru didirikan berdasarkan undang-undang tersebut. Departemen Tenaga kerja mencatat ada 86 serikat buruh tingkat federasi. (www.nakertrans.go.id diakses tanggal 14 September 2005).³

Antusiasme ini adalah reaksi yang sangat wajar, dari kondisi masyarakat yang semula sangat dibatasi hak berserikatnya, kemudian dibuka kran kebebasan kalangan perburuhan untuk membentuk serikat buruh. Kebebasan yang dijamin melalui Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh ini menjamin adanya perlindungan bagi aktivitas serikat buruh dan juga sanksi pidana bagi yang melanggar undang-undang tersebut.

Perlindungan bagi serikat buruh termaktub dalam pasal 28, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota dan/atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- 1 Naskah kontribusi untuk *Jurnal Sosial Demokrasi*.
- 2 Penulis adalah aktivis perburuhan, peneliti independen pada isu perburuhan dan anggota beberapa jaringan gerakan buruh, antara lain L2P, KPKB, Jaker COC, INSTEAD, dan LAPA.
- 3 Data tidak dapat di update karena laman yang dimaksud sudah /sedang tidak aktif.

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti-pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Sedangkan sanksi bagi pelanggar termuat dalam pasal 43, barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan tindak pidana dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan.

Jika menyimak pasal-pasal tersebut, segalanya nampak jelas, tentang bentuk tindakan yang dikategorikan

dalam kejahatan terhadap terselenggaranya serikat pekerja/serikat buruh. Demikian juga tentang hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku, maka tidak disangsikan lagi jika banyak pihak yang sangat antusias dengan adanya undang-undang ini.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Undang-undang ini tidak semudah seperti yang diharapkan. Tidak banyak pelanggaran kebebasan berserikat dapat dibawa ke pengadilan. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengingat pengalaman sejarah perserikat buruhan di

Indonesia yang dihadapi dengan “tidak ramah” baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Pada saat system perserikatburuhan Indonesia masih bersifat tunggalpun bukannya tanpa resiko ketika membentuk serikat buruh. Apakah sedemikian ditaatinya UU No. 21/2000 ini atau ada hal lain?

Pada aras empirik, tidak sedikit kasus yang dilaporkan tentang adanya pelanggaran kebebasan berserikat ini. Komite Solidaritas Nasional (KSN) pada Agustus 2009 mencatat 28 kasus terindikasi perbuatan pelanggaran kebebasan berserikat (bahan seminar KSN, 18 Agustus 2009).

Sejauh ini baru ada satu kasus yang berhasil dibawa ke Pengadilan, yaitu kasus kebebasan berserikat di PT. King Jim Indonesia di Jawa Timur saja yang akhirnya pelaku pelanggaran dalam hal ini General Manegernya divonis 18 bulan penjara pada Januari 2009. Catatan lain tentang pelanggaran atas UU No. 21 tahun 2000 adalah penelitian yang dilakukan oleh ACILS antara 2009-2010 (Hak Dasar



Perburuhan di Indonesia 2010: Survei Pelanggaran di Sektor Formal),⁴ tercatat ada 529 kasus yang dilaporkan oleh responden, kasus terbanyak yaitu 143 (27%) adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kebebasan berserikat seperti penolakan terhadap serikat pekerja/serikat

4 Penelitian ini melibatkan beberapa serikat pekerja/serikat buruh di seluruh Indonesia dan beberapa lembaga penelitian, tetapi hasilnya belum dapat dipublikasikan.

buruh yang dibentuk secara syah, pemecatan terhadap pekerja/buruh terkait kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, skorsing atau tindakan disiplin terkait kegiatan serikat dan penangkapan/penahanan/investigasi terhadap kegiatan serikat. Mengingat data ini diambil hanya dari serikat buruh yang terlibat dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan angka ini hanyalah fenomena gunung es saja.

Beberapa Persoalan

Beberapa persoalan masih sering dihadapi oleh serikat buruh untuk membawa kasusnya ke lembaga pengadilan. Meskipun persoalan ini tidak sepenuhnya kesalahan/kelemah dari serikat buruh itu sendiri.

a. Syarat Yuridis

Sebagai suatu tindak pidana dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana. Sebagai tindak pidana, pihak yang dilanggar kepentingannya tidak dapat mengajukan tuntutan langsung ke pengadilan, akan tetapi harus melalui alat-alat negara seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana. Kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan dan hakim di pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara.

Dalam perkara perburuhan tugas penyidikan juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan tugas penyidikan. Undang-undang No. 21 tahun 2000 telah mengaturnya secara khusus, dalam pasal 41 menyebutkan selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Jika dalam tindak pidana biasa penyidik adalah Polri, maka dalam tindak kejahatan dalam undang-undang ini adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yang pada prakteknya diangkat secara khusus melalui penetapan presiden.

Dengan demikian PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan manakala ada laporan tindak kejahatan terhadap kebebasan berserikat. Pada

prakteknya, pada tahap penyidikan ini, serikat buruh sering merasa dipermainkan. Laporan ke Polisi sering tidak ditindaklanjuti atau bahkan ditolak karena pihak kepolisian menganggap masalah ini adalah masalah perburuhan sehingga menganggap bukan wewenangnya untuk melakukan penyidikan.

Mengingat bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berserikat adalah kejahatan, maka untuk dapat membawa masalah ini ke meja hijau, diperlukan syarat yuridis dalam hukum acara pidana. Di mana suatu kasus agar dapat diajukan ke meja hijau harus terpenuhi alat buktinya. Alat bukti yang sah dalam hukum pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Jika bukti tidak dipenuhi maka, suatu peristiwa tidak dapat diajukan ke depan persidangan.

Untuk memahami mengapa kejahatan terhadap kebebasan berserikat ini tidak mudah maju ke meja hijau, meskipun undang-undang dengan jelas menetapkan bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kebebasan berserikat, kiranya kita perlu melihat dengan cermat tentang alat bukti.

Wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Disnaker di beberapa kabupaten dan kota⁵ yang dikonfirmasi soal ini pada umumnya menyatakan belum ada kasus yang diproses berdasarkan UU No. 21 tahun 2000. Meskipun diakui ada beberapa laporan dari serikat pekerja/serikat buruh yang menyatakan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Namun kasusnya tidak dapat diproses sebagai kejahatan terhadap kebebasan berserikat dikarenakan ada beberapa kelemahan.

Kelemahan yang dimaksudkan terutama sekali terkait dengan alat bukti. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak mampu memberikan bukti yang cukup atas laporan mereka. Sehingga Disnaker tidak dapat memproses laporan yang tidak disertai bukti yang

5 Wawancara dilakukan sejak Juli- November 2006, di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Medan dan Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang (Banten), Jakarta Utara dan Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Jawa Barat). Hanya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menyatakan yang pernah menangani kasus pelanggaran kebebasan berserikat, tetapi kasus ini belum ada putusan pengadilan.

cukup untuk membawanya kepada proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan proses yang akan dilalui dalam menyelesaikan pelanggaran kebebasan berserikat menggunakan hukum acara pidana. Yang berarti setiap kasus yang telah selesai disidik oleh PPNS akan disampaikan ke polisi, dan polisi yang akan melimpahkan perkara ini ke Jaksa Penuntut Umum. Jika hasil penyidikan PPNS tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP maka berkas tersebut akan dikembalikan lagi ke PPNS dan kasus belum dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi alat bukti, Disnaker mempunyai prosedur baku dalam menerima laporan tentang terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan berserikat. Laporan yang masuk ke Disnaker, akan ditindak lanjuti dengan mempelajari kasusnya dan meminta bukti dari para pihak, serta dilakukan pembinaan. Dalam proses pembinaan ini, petugas dari Dinas Tenaga Kerja memberikan pemahaman tentang kebebasan berserikat baik pengusaha, sp/sb. Ketika akhirnya perusahaan mau menerima keberadaan serikat buruh, biasanya masalah dianggap selesai, dan kasusnya ditutup dan petugas Dinas Tenaga Kerja perlu diadili.

b. Pembuktian

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berserikat adalah kejahatan yang harus memenuhi syarat yuridis agar perkaranya dapat di proses sebagai tindak kejahatan dengan memberikan bukti yang cukup. Serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya adalah pihak pelapor, dibebani untuk memberikan bukti yang cukup atas persangkaan terjadinya pelanggaran atas kebebasan berserikat. Hal ini tidak mudah bagi serikat buruh.

Pertama, pada umumnya tindakan perusahaan yang dimaksudkan untuk menolak keberadaan serikat, dilakukan secara lisan dan atau menggunakan modus operandi yang memenuhi syarat administrasi untuk tidak terjadinya pelanggaran hukum, sehingga tidak memberi kesempatan kepada sp/sb untuk memperoleh bukti yang cukup.

Kedua, tentang saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (pasal 1 ayat 26 UUNo. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Menghadirkan saksi dalam kasus kebebasan berserikat adalah merupakan kesulitan sendiri. Karena

dalam kasus kebebasan berserikat yang paling mungkin menjadi saksi adalah anggota atau pengurus atau pekerja lainnya yang tidak lain adalah orang yang dalam upahan pihak yang terlapor dalam hal ini pengusaha. Maka akan tidak mudah untuk mencari saksi karena ada kemungkinan orang yang seharusnya dapat jadi saksi akan tidak bersedia menjadi saksi karena khawatir akan kehilangan pekerjaan jika mereka jadi saksi.

Ketiga, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dalam hal ini seharusnya disampaikan oleh pengusaha, yang mau mengakui tindakan yang dituduhkan kepadanya. Hal ini sesuatu yang tidak mudah.

Jika melihat hal-hal yang demikian apakah selamanya sp/sb tidak dapat membawa masalah pelanggaran terhadap kebebasan berserikat ke pengadilan dan tidak ada pelaku kejahatan terhadap kebebasan berserikat yang dihukum?

Contoh Kasus

Hal lain yang menurut penulis penting adalah cara pandang atau cara menganalisa suatu kasus. Kekeliruan cara pandang terhadap kasus dapat juga menyebabkan pelanggaran atas kebebasan berserikat, tetapi tidak diajukan sebagai kasus pelanggaran kebebasan berserikat tetapi hanya sebagai perkara perselisihan kepentingan sebagai mana yang penulis temukan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan⁶, ada satu kasus tentang pelanggaran pemasangan papan nama serikat pekerja/serikat buruh. Akan tetapi kasus tersebut tidak diadili sebagai kejahatan terhadap kebebasan berserikat sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2000. Tetapi diadili sebagai perselisihan kepentingan. Dalam hal ini PHI tidak melakukan kekeliruan karena memang PHI kompetensinya sangat terbatas. Pelanggaran atas UU No. 21 tahun 2000 yang merupakan tindak pidana tidak dapat diadili di PHI.

Ketika masalah ini dikonfirmasi ke Disnaker Deli Serdang, Sumatera Utara, salah seorang pegawai Disnaker menyatakan bahwa itu bukan merupakan pelanggaran atas kebebasan berserikat, karena pelanggaran pemasangan papan nama bukanlah bentuk peng-

6 Pembacaan berkas ini dilakukan pada tahun 2006, namun data lengkap tidak dapat ditampilkan.

hambatan atas kegiatan serikat.

Sedangkan salah seorang hakim *ad hoc* (hakim yang diangkat khusus karena keahliannya) dari serikat buruh di PHI Sumatera Utara secara pribadi berpendapat bahwa kasus ini merupakan pelanggaran atas kebebasan berserikat.

Meskipun salah seorang hakim berpendapat hal ini merupakan kasus bentuk pelanggaran atas kebebasan berserikat, akan tetapi majelis hakim tidak dapat menadili perkara ini berdasarkan UU No. 21 tahun 2000. Hal ini dikarenakan hakim hanya memutuskan berdasarkan apa yang diminta oleh para pihak, mengingat PHI adalah peradilan perdata. Sedangkan kejahatan terhadap kebebasan berserikat berdasarkan UU No. 21 tahun 2000 yang melakukan tuntutan adalah jaksa penuntut umum, yang merupakan yurisdiksi pada pengadilan umum dalam peradilan pidana.

Melihat dari contoh, di atas, terletak pada serikat buruh yang bersangkutan, yang tidak membawa masalahnya kepada ranah pidana. Sayangnya penulis tidak bertemu dengan serikat buruh yang bersangkutan sehingga tidak dapat memperoleh informasi pertimbangan serikat buruh tersebut untuk melakukan gugatan PHI bukannya melapor ke Kepolisian.

Beberapa Langkah

Dikalangan gerakan serikat buruh sendiri tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan agar pelaksanaan UU No. 21 tahun 2000 ini menjadi sebuah kenyataan. Misalnya Trade Union Right Center (TURC), sebuah lembaga yang aktif bekerja pada isu-isu perburuhan, beberapa kali melakukan seminar yang melibatkan semua pihak seperti serikat buruh, kepolisian, pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) dan juga Kejaksaan untuk melihat kendala-kendala yang dialami oleh semua pihak dalam penegakan hukum, khususnya tentang penindakan terhadap pelanggaran UU No. 21 tahun 2001.

Baru-baru ini Komisi Untuk Kebebasan Berserikat (KUKB) dibentuk oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh dan NGO yang dimotori oleh LBH Jakarta. Kelompok ini memfokuskan diri pada usaha-usaha perlawanan terhadap kejahatan kebebasan berserikat (*union busting*).

Usaha lain yang sudah dilakukan adalah loby-loby yang dilakukan oleh berbagai serikat buruh untuk bertemu dengan pihak kepolisian. Dari berbagai rangkaian seminar, diskusi dan usaha loby atau audiensi dengan

yang penulis ikuti, dapat dicatat, bahwa pada awal pelaksanaan UU No. 21 tahun 2000, pihak kepolisian menganggap masalah ini adalah bukan wilayah kerja mereka. Tetapi dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh serikat buruh baik di Jakarta atau daerah lain ada perkembangan yang sedikit menggembirakan di beberapa daerah.

Misalnya di Jawa Timur, dimana pihak kepolisian berhasil diyakinkan oleh teman-teman serikat buruh khususnya FSPMI Jawa Timur sehingga kasus PT. King Jim Indonesia dapat di adili. Sedangkan untuk Jabodetabek, meskipun belum sampai mengirim pengusaha ke penjara, setidaknya di Polda Metro Jaya sudah ada petugas yang secara khusus ditugaskan untuk melayani keluhan tentang pelanggaran kebebasan berserikat ini.

Perkembangan yang ada tentang tanggapan kepolisian terhadap masalah pelanggaran UU No. 21 tahun 2000 belumlah memusakan kalangan buruh. Karena apa yang ada saat ini masih merupakan interpretasi individual atau daerah, belum merupakan kebijakan yang menyeluruh dari lembaga kepolisian. Dengan kondisi ini tetap saja tidak ada jaminan bagi buruh yang mengalami tindak kejahatan kebebasan berserikat akan memperoleh keadilan. Sementara tindakan kejahatan terhadap kebebasan berserikat masih terus beronlanjut bahkan merambah pada perusahaan-perusahaan asing seperti yang dialami oleh para pekerja di *British International School* (BIS) Jakarta dan Bank Swadesi Jakarta.⁷

Usaha lain yang dilakukan dalam menghadapi pelanggaran kebebasan berserikat adalah melakukan gugatan ke pengadilan umum. Dalam hal ini serikat buruh menggugat atas perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagaimana yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Indonesia (Sekar Indosiar). Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini telah ada divonis pada 18 Januari 2011 yang lalu. Dalam amar putusannya Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang diketuai oleh Janes Aritonang memerintahkan agar manajemen PT Indosiar Visual Mandiri meminta maaf selama dua hari berturut-turut di Harian

7 Dikemukakan dalam diskusi bulanan Jaringan *Labour Law Practitioner* (L2P) dengan judul "Union Busting di Perusahaan-perusahaan Asing", tanggal 3 Maret 2010, bertempat di LBH Jakarta.

Kompas dan Media Indonesia.

Meskipun gugatan ini menimbulkan perdebatan yang menarik dari substansi hukum, namun tidak sedikit yang memuji. Setidaknya melalui gugatan ini memberi "sedikit" kemenangan dalam menghadapi kesumpekan masalah kejahatan terhadap kebebasan berserikat (*union busting*) yang sangat sulit dapat ditembus jika melalui jalur pidana.

Penutup

Keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup untuk menjamin bahwa keadilan dapat ditegakkan. Masih banyak usaha yang harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat.

Pertama, dari pemerintah dalam hal ini kepolisian perlu membuat aturan semacam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) yang dapat digunakan oleh jajaran kepolisian dalam menerima laporan yang berkaitan dengan kejahatan kebebasan berserikat (*union busting*), mengingat ada kekhususan pada masalah ini. Kekhususannya adalah adanya hubungan sub ordinat antara korban dan pelaku, sehingga perlu ada perlakuan khusus untuk menemukan kebenaran atas peristiwa yang terjadi.

Kedua, interpretasi dari PPNS tentang tindakan-tindakan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kebebasan berserikat. Hal ini tidak mudah karena ada tindakan yang meskipun dalam undang-undang dengan jelas dimasukkan sebagai bentuk penghalang-halangan pada kebebasan berserikat, tetapi secara teori manajemen menjadi hak mutlak perusahaan. Tindakan tersebut adalah mutasi. Tindakan ini yang paling sering dilakukan oleh perusahaan dalam usaha menolak/menghambat serikat buruh. Sehingga perlu ada kepekaan yang tinggi bagi PPNS dalam menghadapi modus ini. Karena jika PPNS dan atau kepolisian dan kejaksaan masih memandang mutasi dari satu dimensi saja, maka selamanya undang-undang ini hanya akan menjadi mandul.

Ketiga, pihak Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang Pengawasan juga penting untuk memisahkan mana masalah yang masih bisa dilakukan pembinaan dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang harus dijatuhi sanksi. Sehingga tidak terjadi kerancuan antara tindakan yang cukup dilakukan pembinaan, dan tindakan pelanggaran yang sudah seharusnya dijatuhi sanksi pidana. Hal ini penting guna penegakan hukum yang

berlaku dan rasa keadilan dikalangan buruh.

Keempat, yang tidak kalah penting juga adalah kemampuan serikat buruh (dan atau bersama pengacara yang membantunya) dalam menganalisis kasus, mengingat undang-undang perburuhan saat ini bersifat perdata murni. Ini artinya, setiap perkara perburuhan adalah merupakan perkara antar warga Negara, yang berarti bahwa para pihak sendirilah yang harus menentukan mau dibawa kemana perkara yang dihadapinya, apakah akan dijadikan sebagai perkara pidana ataupun perdata, apakah akan diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Namun bagi serikat buruh menjadi penting untuk ikut menegakan hukum guna membangun system kemasyarakatan yang taat aturan, hal ini akan lebih memudahkan serikat buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota.

Kelima, pengurus atau calon pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus bersikap professional dalam menjalankan organisasinya atau rencana pendirian organisasi. Caranya adalah, jika dipanggil atau berbicara dengan pimpinan perusahaan harus jelas kapasitasnya. Kapasitas sebagai buruh/pekerja yang menerima upah atau sebagai pengurus organisasi yang mengemban amanat anggota. Artinya jika ketika menghadapi pimpinan perusahaan adalah sebagai pimpinan organisasi, jangan pernah menghadapinya sendiri. Hal ini penting guna mendapatkan saksi ketika ada tindakan-tindakan yang mungkin akan merugikan serikat buruh. Selalu menuangkan dalam bentuk tulisan/surat seluruh pembicaraan dengan pihak perusahaan, dengan demikian jika dibelakang hari ada perkara, tidak kesulitan dalam menghadirkan bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Ini adalah usaha untuk "menciptakan" alat bukti, mengingat pelanggaran kebebasan berserikat adalah kejahatan yang khusus dimana modus operasinya bisa menjadi sangat sempurna dan sulit pembuktiannya. ■

Sumber Bacaan

1. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh
2. KUHP
3. www.nakertrans.go.id
4. Kerta-kertas Kerja dan Seminar



MENGGESER JEBAKAN MENJADI PELUANG: PENGUATAN GERAKAN DALAM ARENA PASAR

Indrasari Tjandraningsih¹



Pengantar

Keberadaan serikat buruh di Indonesia saat ini dipenuhi oleh situasi optimis dan pesimis sekaligus serta kegamangan dalam memperkirakan kemungkinan kemampuannya berperan membela kepentingan kelas pekerja di hadapan modal. Keadaan ini merupakan hasil dari jalinan antara situasi eksternal serikat buruh yang berkembang dengan cepat dan kadang-kadang 'tak terduga' di satu pihak dan wujud dari lemahnya sumber daya manusia, strategi dan solidaritas di antara serikat. Di atas semua itu harus diakui bahwa serikat buruh di Indonesia bukanlah aktor penentu arah kebijakan, akan tetapi menjadi obyek kebijakan, terutama di dalam kebijakan pasar bebas. Untuk menciptakan peluang agar serikat buruh dapat keluar dari kegamangan tersebut, diperlukan tindakan-tindakan inovatif dalam menyusun strategi baru untuk penguatan dan perluasan gerakan.

Kebijakan Pasar Bebas

Hingga saat ini kebijakan dan implementasi pasar bebas menjadi perdebatan di antara yang mendukung dan menolak. Mereka yang mendukung terutama dari kubu para ekonom yang secara umum telah menyelesaikan perdebatan di antara mereka dengan mendukung pasar bebas karena membawa lebih banyak keuntungan. Para penentang atau setidaknya pihak-pihak yang kritis terhadap pasar bebas melihat bahwa penerapan pasar bebas membawa dampak yang merugikan terutama bagi negara-negara berkembang karena menurunkan standar perburuhan dan merusak lingkungan serta menciptakan ketergantungan Negara berkembang terhadap Negara

¹ Peneliti perburuhan AKATIGA-Pusat Analisis Sosial, Bandung

BURUH INDONESIA BEBAS

maju. Dalam bahasa yang lebih lugas para penentang menyebut pasar bebas sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme model baru.

Pasar bebas menjadi salah satu sarana yang efektif bagi rezim neoliberalisme² yang semakin menekankan absennya campur tangan negara dalam urusan bisnis dan perdagangan. Rezim ekonomi-politik perdagangan internasional yang telah menjadi ideologi dunia yang dominan dan menjadi ruang hidup kita ini, oleh Norena Heertz, seorang akademisi dari universitas Cambridge Inggris, disebut sebagai kapitalisme neoliberal pasar bebas. Rezim ini telah menciptakan sebuah pergeseran perimbangan kekuasaan dari pemerintah ke tangan modal dan menjadikan modal sebagai panglima.

2 Jantung gagasan neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika, dan hanya jika, lalu-lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Dalam kerangka pikir neoliberal cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi adalah satu-satunya dan bukan salah satu model tindakan dan relasi antar manusia yang mempertimbangkan perhitungan untung-rugi seperti perhitungan ekonomi (B.Herry Priyono: Dalam Pusaran Neoliberalisme dalam *Neoliberalisme*, Cindelaras 2003:47-84),

Situasi Perburuhan dan Serikat Buruh Dalam Pasar Bebas

Dalam iklim kapitalisme neoliberal pasar bebas seperti sekarang serikat buruh menghadapi empat kekuatan yang sangat sulit diimbangi sendirian yaitu Negara, modal, lembaga keuangan internasional dan kolaborasi antara ketiganya. Kemampuan modal sangat canggih dalam memproduksi dan mereproduksi berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan akumulasi melalui inovasi teknologi dan organisasi kerja dan seringkali serikat buruh secara tak sadar justru menjadi bagian dari strategi tersebut. Semangat UU 21/2000 yang sangat dirayakan serikat buruh diwarnai oleh karakter neoliberal, demikian juga UU 13/2003 yang melegalkan praktek-praktek fleksibilitas hubungan kerja baru sesudah diterapkan disadari telah merugikan buruh³. Karakter neoliberal dalam kedua UU tersebut tersamarkan dan tak disadari karena pemberlakuannya dilaksanakan di saat euforia reformasi dan dalam prosesnya telah melibatkan sebagian wakil-wakil serikat buruh. Pembacaan kritis

3 Lebih jauh lihat buku Muhtar Habibi *Gemuruh Buruh di Tengah Pusaran Neoliberalisme*, Penerbit Gava Media 2009.

terhadap kedua UU perburuhan tersebut dan juga UU peradilan hubungan industrial memperlihatkan pada dasarnya ketiganya mengandung sejumlah jebakan yang sangat melemahkan posisi tawar serikat buruh. Kejelian dan ketepatan waktu diluncurkannya UU tersebut telah membuat jebakan di dalamnya dipandang sebagai peluang oleh serikat buruh.

Dalam kerangka sejarah kebijakan perburuhan Indonesia, bersamaan dengan dominasi kapitalisme neoliberal pasar bebas, pendulum pemihakan pemerintah juga ikut bergeser dari kelompok warga negaranya yang lemah (kelas buruh) ke arah kelompok warga Negara yang kuat (pemilik modal). Tak dapat disisihkan juga peran perusahaan-perusahaan multinasional dan organisasi keuangan internasional seperti *World Bank* dan IMF yang menekan pemerintah agar lebih melenturkan dan membebaskan ruang gerak modal untuk mengoptimalkan kemampuan meraih keuntungan melalui deregulasi, penghapusan tarif dan pembukaan pasar seluas-luasnya, serta menerapkan pasar kerja yang fleksibel⁴.

Kondisi buruh yang terus memburuk dan posisi tawarnya yang semakin lemah di tengah rezim pasar bebas semakin sering disuarakan. Jebakan dalam UU perburuhan memperlihatkan wujudnya melalui praktik *outsourcing*, upah rendah, pelanggaran berserikat serta minimnya pengawasan oleh pemerintah dan menjadi persoalan pokok yang dihadapi serikat buruh⁵.

Jalanan situasi semacam di atas telah menciptakan banyak persoalan dan pekerjaan rumah bagi serikat buruh dan menunjukkan betapa besarnya musuh bersama yang harus dihadapi. Di saat yang sama serikat buruh dalam pengertian sebuah kelompok atau kolektivitas yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya masih sibuk dengan urusan 'berbenah rumah': menguatkan organisasi, memperbanyak anggota, meredam persaingan di antara sesama elit, meningkatkan kemandirian, merambah arena perjuangan lain dengan memasuki pertarungan memperebutkan posisi

legislatif, konsolidasi kekuatan, melakukan rangkaian aksi-aksi buruh dan sebagainya. Dua situasi internal dan eksternal yang harus secara bersamaan dihadapi pada saat yang sama membutuhkan lebih banyak tenaga untuk memikirkan cara dan strateginya yang tepat.

Usulan bagi Strategi Perjuangan Serikat Buruh

Dalam kondisi sedemikian, perlu dimunculkan pertanyaan: Bagaimanakah persoalan dibaca dan dirumuskan? Berapa efektif kerja-kerja yang dilakukan serikat buruh? Tepatkah strategi yang diambil? Cocokkah strategi yang diambil dengan permasalahan yang dihadapi? Permasalahan macam apa yang harus dihadapi dengan strategi macam apa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk diajukan untuk meraih kembali peluang-peluang keberhasilan dan agar sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efektif. Perlu diakui bahwa serikat buruh memiliki lebih banyak keterbatasan untuk mengembangkan strategi dibandingkan lawan-lawannya.

Oleh karena itu sangat perlu melakukan perhitungan dalam membangun strategi perlawanan. Perhitungan-perhitungan perlu dilakukan terhadap sumber-sumber daya: informasi dan pengetahuan, finansial, manusia dan jaringan. Menghadapi lawan sebesar rezim pasar bebas nan neoliberal jelas tidak dapat dilakukan dengan kekuatan yang cerai berai atau tak padu atau dengan cara-cara yang sudah biasa dilakukan. Sangat dibutuhkan kepaduan dan solidaritas yang tinggi di antara sesama serikat dan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Juga perlu dilakukan inovasi dan kombinasi strategi dalam mewujudkan kepentingan buruh. Strategi mengandalkan kekuatan massa perlu juga diperiksa efektivitas jangka panjangnya dan eksekusi yang muncul. Inovasi dan kombinasi strategi juga diperlukan untuk menunjukkan kepada pihak lawan kewibawaan dan citra serikat buruh yang positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat melihat kelompok buruh sebagai rombongan tukang demo dan pembuat onar; sebuah citra yang terbentuk karena intensitas dan eksekusi aksi-aksi buruh yang banyak terjadi serta dimensi eksklusif gerakan buruh.

Kemampuan bernegosiasi, berargumentasi dan berdiskusi dengan bahasa yang efektif dan penguasaan informasi yang memadai menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh serikat buruh. Heroisme dan militansi memang perlu dalam menunjukkan eksistensi

4 Lihat Dae-Oup Chang 'Informalising Labour in Asia's Global Factory' dalam *Journal of Contemporary Asia* vol.39, no.2, May 2009, pp.161-179 untuk analisis yang menarik mengenai perkembangan strategi modal dan implikasinya bagi gerakan buruh di Asia.

5 Lihat antara lain Tjandraningsih, Herawati & Suhadmadi, 2010, *Diskriminatif dan Eksploitatif:Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia* ; Tjandraningsih & Herawati, 2009, *Menuju Upah Layak*, AJI Indonesia, 2009, *Hujan Batu Buruh Kita*.

serikat buruh, akan tetapi mengedepankan citra bahwa serikat buruh juga 'berotak selain juga berotot' – kuat data dan argumentasi sekaligus punya basis dukungan yang riil, akan menjadi strategi yang tepat untuk membangun kewibawaan. Dalam pandangan penulis, hal ini yang masih sangat perlu di bangun oleh kebanyakan serikat buruh dan ini samasekali bukan pekerjaan yang mudah. Dari pengalaman bergaul dengan berbagai serikat buruh, pekerjaan penting ini belum banyak menjadi prioritas organisasi dan karena itu belum dilakukan investasi dan alokasi sumber daya terhadapnya. Meskipun demikian upaya dan peluang itu tetap ada dan telah mulai mewujud dalam gerakan-gerakan yang dimotori oleh serikat buruh yang melibatkan kelompok-kelompok mahasiswa, akademisi, LSM, anggota parlemen dan jurnalis.

Upaya untuk menguasai informasi perlu terus dilakukan oleh serikat buruh sebagai dasar untuk membangun alternatif strategi memperjuangkan kepentingan buruh di hadapan kekuatan-kekuatan besar itu. Ideologi libe-

ralisme, pasar bebas dan kemudian ideologi neoliberal menjelma menjadi kekuatan besar karena pemikiran dan gagasannya dibangun dalam waktu sangat panjang. Pasar bebas diawali oleh pemikiran Adam Smith hampir 250 tahun lalu dan terus dikembangkan dengan berbagai perubahan untuk kemudian diadopsi dengan perubahan fundamental oleh kelompok pemikir neoliberal yang terdiri dari para akademisi terutama dengan latar belakang ilmu ekonomi dari Amerika Utara dan Eropa sejak tahun 1947 dan terus disempurnakan hingga saat ini.

Ini menunjukkan pentingnya ketekunan dan kemauan memanfaatkan potensi intelektual yang dimiliki serikat buruh untuk membangun kekuatan, memperluas jaringan dan menyebarkan pengaruh, untuk bisa mengubah jebakan menjadi peluang. Meskipun sulit, harus tetap dilakukan ketika serikat buruh memutuskan untuk tetap diakui keberadaannya sebagai kekuatan penyeimbang yang akan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja di Indonesia. ■





BURUH DAN POLITIK

Ir. H. Said Iqbal, ME, Presiden DPP FSPMI



“Djaman jang sekarang ini ada sangat soesah bagi kaoem boeroeh, apalagi kaoem boeroeh rendahan karena mereka ini dengan perlahan-lahan akan terdesak oleh orang jang keloear dari sekolah pertengahan dan tinggi. Tentoe keadaan jang begini tidak lekas terdjadi akan tetapi perlahan-lahan, tetap toch terdjadi”.

(kereta api, Februari 1929)

Sejarah Politik Pergerakan Serikat Buruh

Jhon Ingleson dalam bukunya “Tangan dan Kaki Terikat” terbitan komunitas bambu, Januari 2004, menjelaskan kondisi politik dan serikat buruh pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Dalam bukunya Ia menjelaskan: “Pemimpin serikat buruh menghadapi pertanyaan fundamental. Haruskah mereka membatasi aktifitas mereka pada urusan industrial-upah dan kondisi kerja, praktek kecurangan, kesehatan dan isu keamanan, sehingga bisa meminimalkan resiko sikap represif pemerintah? Ataukah harus mencari usaha mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam gerakan politik nasionalis yang lebih kuat dan menguji batas kekuasaan negara dalam rangka menguatkan gerakan nasional secara keseluruhan? Beberapa menganggap bahwa hubungan organisasi yang erat antara partai politik dan serikat buruh merupakan urusan politik yang sama besar dengan agenda serikat buruh dalam memperjuangkan upah dan kondisi kerja”. Demikian Jhon Ingleson menguraikan tentang perdebatan di dalam Serikat Buruh dalam menentukan pilihan berpolitiknya. Bayangkan perdebatan tersebut sudah terjadi 90 tahun yang lalu dan berlangsung pada masa penjajahan pula. Hingga sekarangpun perdebatan itu masih terus berlangsung dikalangan aktifis buruh di Indonesia. Lebih lanjut Jhon, dalam bukunya menjelaskan, “Perhimpunan *Beambte Spoor* dan *Tram* di Hindia Belanda (PBST) yang berdiri di Bandung tahun 1926, telah memasukan daftar perjuangan dalam gerakannya adalah: Beri lampu penerangan, tambah langit-langit rumah buruh, tambah sarana air di gedung-gedung, ijin 5 menit sebelum selesai kerja untuk cuci tangan, penyelia harus berkata sopan, perbaiki bonus dan gaji, penurunan harga

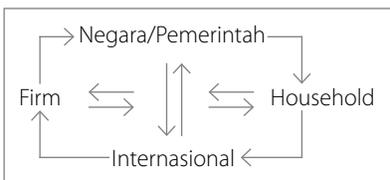
sewa rumah dan pembayaran uang lembur yang layak”.

Paparan diatas menjelaskan kepada kita bahwa serikat buruh di jaman kolonial penjajahan Belanda sudah berani menyuarkan isu tersebut, dan pada jaman sekarangpun, isu-isu tersebut juga berulang menimpa kaum buruh. Dan bagi serikat buruh di jaman sekarangpun tetap melakukan perjuangan dengan isu dan permasalahan yang sama, padahal bangsa Indonesia sudah merdeka 65 tahun lamanya. Dari sejarah pergerakan serikat buruh dalam politik dan ekonomi ini, maka kita dapat menarik benang merah bahwa buruh dan politik di Indonesia sudah dimulai dari 100 tahun yang lalu, dimana gerakan mereka berada dalam gerakan politik dan gerakan sosial ekonomi.

Teori Sederhana

Dalam teori ekonomi, Adam Smith (ekonomi klasik) menggambarkan hubungan timbal balik ekonomi (saling membutuhkan) antara pengusaha (*Firm*) dan buruh (*Household*). Begitu pula Keynesian menjelaskan tentang perluasan hubungan timbal balik “Adam Smith” tersebut dengan menambahkan pelaku “negara dan “hubungan internasional” di dalam siklus ekonominya, seperti tergambar di bawah ini :

Dari hubungan timbal balik di atas, maka tiada



kata lain bagi buruh bahwa mereka harus melakukan peran sosial politik dan sosial ekonominya agar dapat memberikan pengaruh dan daya tawar (*bargaining position*) terhadap pemerintah, pengusaha, dan dunia internasional agar aspirasi mereka di dengar. Dengan teori sederhana, hal ini dapat dijelaskan bahwa di dunia ada dua aliran yang dominan menguasai visi misi gerakan sosial politik / partai politik (disamping aliran lainnya), yaitu: aliran sosialis (kaum buruh dan variannya) dan aliran kapitalis (kaum pemilik modal dan turunannya). Misal Partai Demokrat (USA), SPD (Jerman) Partai

Buruh (di Inggris, Australia, Brazil), partai demokrat sosialis (Jepang) adalah contoh-contoh partai beraliran sosialis yang mengusung isu-isu penurunan pajak, perlindungan HAM, kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan upah serta kesejahteraan buruh. Disisi lain Parta Republik (USA), Partai Demokratik Kristen (Jerman) Partai Konservatif (Inggris, Australia), Partai LDP (Jepang) adalah contoh-contoh partai beraliran kapitalis yang mengusung isu-isu peningkatan pajak, perlindungan investasi/modal, kurang sensitip terhadap isu peningkatan kesejahteraan buruh dsb. Terlihat jelas, bahwa isu perburuhan menjadi isu yang sangat penting bagi partai politik, kaum buruh dan serikat buruh untuk menjadi “pemain” utama dalam peran sosial politiknya dalam menggapai peningkatan ekonomi.

Beberapa teori sosial perburuh-an menjelaskan, dalam memainkan peran sosial politik dan sosial ekonominya, kaum buruh (serikat buruh) dapat memilih beberapa pilihan model yang sudah ada di beberapa negara. Di Jepang dan Singapura misalnya, kaum buruh memainkan peran besarnya sebagai kekuatan sosial ekonomi di tingkat perusahaan (bukan di tingkat negara) yaitu melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat buruh dengan majikan. Mereka bernegosiasi tentang dana pensiun, jaminan kesehatan, peningkatan upah, kesejahteraan, pendidikan dsb. Peran negara dalam memberikan peningkatan sosial ekonomi bagi buruh kecil sekali, negara lebih kepada membuat regulasi dan stabilisasi, walaupun dalam 5 tahun terakhir ini gerakan serikat buruh di Jepang mulai menambah orientasinya yaitu menjadi lebih aktif dalam gerakan sosial politik dengan mendukung Partai Demokrat Sosialis. Tetapi di USA dan mayoritas negara Eropa, justru kaum buruh (serikat buruh) lebih memerankan peran sosial politiknya. Mereka bernegosiasi dengan pemerintah untuk meminta pemotongan pajak, asuransi pengangguran, penciptaan lapangan kerja, penekanan nilai inflasi dsb. Tekanan melalui negosiasi tersebut, mereka lakukan biasanya melalui partai politik yang “pro” buruh. Artinya, dalam model ini menjelaskan bahwa gerakan kaum buruh lebih kepada gerakan sosial politik.

Politik ideologi, pengorganisasian, atau kontestan, mana yang lebih dulu?

Secara sederhana, penulis mendapatkan penjelasan bahwa dalam literature tentang politik dikenal tiga definisi politik, yaitu pertama - politik sebagai sebuah ideologi, kedua - politik sebagai sebuah pengorganisasian, dan ketiga - politik sebagai sebuah arena (kontestan). Dari ketiga teori ini, menurut hemat penulis, untuk menggerakkan kaum buruh (serikat buruh) ikut berpolitik, maka harus dimulai dengan politik sebagai sebuah pengorganisasian. Cara sederhana membangun kesadaran buruh berjuang untuk dirinya adalah melalui pengorganisasian yang kuat, yaitu dengan terus menerus menjelaskan dan membangun kesadaran kelas tentang isu-isu perburuhan yang harus diperjuangkan oleh kaum buruh dan serikat buruh secara bersama-sama. Dan hal itu hanya bisa terwujud dengan membangun persatuan seluruh gerakan serikat buruh (dan kaum buruhnya) yang terorganisir dengan baik. Ketika kesadaran persatuan berorganisasi untuk berjuang bersama sudah terbangun, maka secara simultan politik ideologi harus ditanamkan sebagai suatu keniscayaan kepada para pemimpin serikat buruh dan kaum buruh Indonesia. Dan pada akhirnya ketika politik pengorganisasian dan politik ideologi sudah tertanam dalam gerakan buruh, maka pada saat yang tepat (yang disepakati mayoritas serikat pekerja/serikat buruh) politik kontestan/arena akan dimasuki oleh gerakan buruh di Indonesia, tetapi independensi gerakan serikat buruh harus tetap dijaga. Dengan kata lain, serikat buruh dalam berpolitik mempunyai jargon "Independen tetapi tidak netral". Dibawah ini, penulis membagi gagasan tentang 6 isu prioritas gerakan buruh Indonesia yang harus terus menerus diperjuangkan sebagai politik pengorganisasian, yaitu :

1. Isu Jaminan Sosial (Undang-Undang No. 40 tahun 2004, Undang - Undang No. 3 tahun 1992 dan RUU BPJS).

Pemberlakuan jaminan sosial (termasuk jamsostek) adalah sebuah persoalan bangsa yang perlu diperjuangkan oleh gerakan serikat pekerja. Karena dengan jaminan sosial, maka akan terbangun jaring pengaman bagi warga negara untuk mendapatkan hak hidup di Republik Indonesia. Fakta-fakta dibawah ini, mudah-mudahan dapat menyegarkan ingatan kita, betapa pentingnya sistim jaminan sosial. Fakta tersebut adalah :

- 1.1 Jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun di Indonesia bagi kaum buruh masih bersifat diskriminasi, limitasi (terbatas), dan berorientasi pada "profit" bukan manfaat dan pelayanan. Hal ini tercermin dalam kenyataannya hanya PNS/TNI - POLRI saja yang mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup dan jaminan pensiun. Padahal jumlah PNS/TNI-POLRI hanya 5 juta orang (BPS, Februari 2010). Tetapi pekerja/buruh yang berjumlah 30,72 juta orang (BPS, Februari 2010), ketika mereka sudah tidak lagi bekerja maka mereka kehilangan hak untuk mendapatkan biaya jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarganya, termasuk ketika pensiun, buruh swasta tidak ada dana pensiunnya. Terlebih lagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada sekarang ini (Jamsostek, Askes, Taspen, dan ASABRI) lebih berorientasi kepada keuntungan dan dividen dikarenakan berbentuk BUMN dan PT. kondisi inilah yang disebut dengan jaminan sosial di Indonesia masih diskriminatif, limitatif, dan "profit oriented" yang tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicerminkan dengan berlakunya pelaksanaan jaminan sosial (jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja) bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Data dibawah ini menjelaskan hal tersebut, yaitu :
 - a. Dari 237,5 rakyat Indonesia, hanya sekitar 95,1 juta orang saja (39%) yang tercakup dalam sebagai skema jaminan sosial.
 - b. Dari sekitar 30 juta-an pekerja/buruh formal, hanya sekitar 9 juta-an (27%) saja yang mendapatkan jaminan dari jamsostek.
 - c. Dari sekitar 70 juta-an pekerja/buruh informal, tidak sampai 1 % yang telah terjamin dalam Jaminan Sosial.
 - d. Angka kematian ibu di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara dan angka harapan hidup di Indonesia lebih rendah disbanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Padahal besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih tinggi ketimbang ketiga Negara tersebut. (*The Economist*, "The World in 2008").
- 1.2 Begitu pula berkenaan dengan data tentang

Tabel 1

Bentuk Kompensasi	Pekerja Malaysia	Pekerja Indonesia
	(Masa Kerja 20 th)	
Pesangon	5 bulan upah	$[9+7+(15\% \times 16)]$ = 18,4 bulan upah
JHT (Jaminan Hari Tua)	23 % x 12 bulan x 20 tahun = 55,2 bulan	5.7 % x 12 bulan x 20 tahun = 13,68 bulan upah.
Total	60,2 bulan upah	32,08 bulan upah

Sumber : UU No. 13/2003

Tabel 2

No	Negara	Badan Penyelenggara	Iuran		
			Pemberi Kerja	Pekerja	Total
1	Singapura	CPF	20,00%	20,00%	40,00%
2	Malaysia	EPF	12,00%	11,00%	23,00%
3	Filipina	SSS	4,70%	3,30%	8,00%
4	Tanzania	NPF	10,00%	10,00%	20,00%
5	Ghana	SSNIT	12,50%	5,00%	17,00%
6	Gambia	SSHF	10,00%	5,00%	15,00%
7	Indonesia	Jamsostek	3,70%	2,00%	5,70%

Sumber : Buku Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Des 2000

pelaksanaan jaminan pensiun di Indonesia, yaitu :

- a. Hanya 500 perusahaan swasta yang memberikan Jaminan Dana Pensiun (0.021 %) dari total 237 ribu-an perusahaan terdaftar. Artinya, ada 99.9% dari total pekerja/buruh swasta tidak memiliki dana pensiun.
- b. Pesangon dan iuran hari tua yang diterima pekerja Indonesia jauh lebih kecil dibanding pekerja Malaysia, seperti data pada tabel 1. Oleh karena itu, menurut hemat penulis serikat buruh dan gerakan sosial lainnya dalam memperjuangkan pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia dewasa ini (sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2004, Undang-Undang No. 3 tahun 1992, dan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah harus menuntut hal-hal sebagai berikut :
 - Jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia.
 - Jaminan pensiun wajib bagi pekerja formal.
 - Badan Hukum BPJS harus Wali Amanat, tidak lagi berbentuk BUMN dan atau PT.

1.3 Tulisan dan data dibawah ini akan lebih detail

lagi menjelaskan kepada kita betapa buruknya jaminan sosial di Indonesia, khususnya jamsostek, yaitu :

- a. Iuran Jamsostek (JHT) di Indonesia paling kecil dibanding dengan beberapa negara di dunia, seperti tabel 2 berikut.
- b. Kekayaan dan hasil pengembangan iuran Jamsostek belum optimal buat kesejahteraan pekerja/buruh. Karena Jamsostek menjadi milik pemerintah (BUMN) yang berbentuk PT, bukan wali amanat.
- c. Hasil pengembangan dana PT. Jamsostek yang tidak mencerminkan keadilan bagi pekerja
 Dari data tabel 3 terlihat sekali, bahwa program jamsostek saat ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pekerja/buruh, sebagai contoh yaitu :
 - Tiap tahun pekerja/buruh hanya menerima dana hasil pengembangan sebesar Rp. 67.174 per orang, tetapi direksi dan komisaris mendapatkan rata-rata Rp. 240 juta per orang. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan program ini.
 - Dana cadangan untuk badan (PT. jamsostek)

Tabel 3. RUPS 2007 PT. Jamsostek Tentang Pembagian Laba Bersih Senilai Rp 998.393.462.589. (program jk, jkk, jpk).

No	%	Nilai (Rp.)	Peruntukan	Dinikmati Oleh	Rata-Rata Per Orang (Rp)
1	55	549.116.404.424	Pengembangan JHT	8,1 juta orang peserta Jamsostek	67.174 (US \$ 6,9/thn)
2	30,57	305.170.723.403	Cadangan perseroan dan tujuan	Badan Usana (PT. Jamsostek)	-
3	10	99.839.346.259	DPKP	8,1 juta orang peserta dalam bentuk pinjaman + hibah	12.325 (US \$ 1,3/thn)
4	4	39.935.738.504	Program kemitraan	Mitra	-
5	0,43	4.331.250.000	Insentif/bonus	13 orang Direksi dan Komisaris	± 240.000.000 (US \$ 25.000/thn)

Data : dari berbagai sumber diolah

disisihkan sebesar Rp. 305,17 Milyar per tahun, berarti bila dihitung dari mulai jamsostek berdiri hingga tahun-tahun ke depan maka akan didapat dana puluhan Trilyun rupiah. Bila dana puluhan Trilyunan rupiah ini dimanfaatkan untuk subsidi biaya sewa rumah dan ongkos transportasi (dimana dari hasil penelitian didapat bahwa 40% dari upah yang diterima pekerja/buruh habis digunakan untuk sewa/cicilan rumah dan ongkos transportasi), maka 40% dari upah tersebut dapat ditabung oleh pekerja/buruh setiap bulannya. Atau apabila dana trilyunan rupiah tersebut digunakan untuk bea siswa anak pekerja/buruh, maka mereka dapat bersekolah ke Universitas, tidak hanya sampai SMP/SMA saja. Dan juga dana Trilyunan rupiah tersebut dapat digunakan untuk biaya berobat pekerja/buruh dan keluarganya ketika mereka sudah tidak bekerja lagi.

2. *Isu Outsourcing Tenaga Kerja dan Karyawan Kontrak*
Sistim kerja *outsourcing* sekarang ini begitu merajalela dan bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003. Sehingga hal ini menjadi isu utama bagi kita untuk memperjuangkan penghapusan *outsourcing* yang tidak sesuai dengan Undang - undang No. 13 tahun 2003. Dalam kenyataannya di lapangan penggunaan *outsourcing* dan karyawan kontrak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Dimana faktanya adalah :

- Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003, *outsourcing* tenaga kerja tidak boleh untuk proses produksi atau kegiatan utama di perusahaan.
- Pengguna *outsourcing* tenaga kerja hanya boleh

untuk *security, cleaning service, driver, catering*, dan jasa penunjang pertambangan

- Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003, penggunaan karyawan kontrak ada syarat-syarat yang ketat.

Tetapi terjadi penyimpangan dalam penggunaan outsourcing (OS) tenaga kerja dan karyawan kontrak, yaitu :

- Semua proses produksi menggunakan OS dan karyawan kontrak.
- Upah lebih kecil dari upah minimum (dipotong oleh agen penyalur tenaga kerja).
- Tidak mendapat dana pensiun dan uang pesangon (*severance pay*).
- Tidak ada asuransi kesehatan.
- Mudah dipecat (putus hubungan kerja), kapan saja.
- Kesejahteraan yang didapat lebih rendah dari pekerja tetap (*permanent worker*).
- Eksploitasi terhadap pekerja OS dan karyawan kontrak.

3. *Isu Upah*

Isu upah di Indonesia adalah tentang upah rendah, upah minimum tidak 100% kebutuhan hidup layak (KHL), upah lebih rendah daripada biaya hidup. Disamping itu juga tentang struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan belum ada, sehingga gaji antara orang asing dan lokal menjadi timpang serta pekerja dengan masa kerja diatas 5 tahun gajinya hampir sama dengan karyawan kontrak.

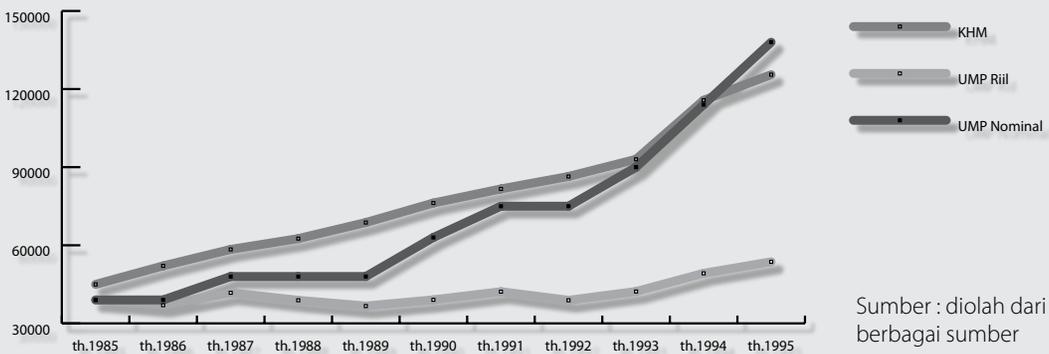
Tabel dibawah ini, dengan upah minimum DKI Jakarta sebagai contoh, akan menggambarkan kepada

Tabel 4. Prosentase Nilai UMP terhadap KFM/KHL DKI Jakarta 1998 – 2008.

Tahun	UMP (Rp)		KFM / KHM (Rp)		Prosentase UMP Terhadap KFM / KHM (%)
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan	
1998	198.500		254.251		78.07
1999	231.000		351.263		65.76
2000	286.000		384.172		74.45
2001	426.250		246.000		100.06
2002	591.226		519.931		113.71
2003	631.554		746.749		84.57
2004	671.550		699.713		95.98
2005	711.843		759.963		93.67
2006	819.100		815.056		100.49
2007	900.560		991.988		90.78
2008	972.604		1.055.275		92.17

Sumber : BPS DKI Jakarta.

Grafik 1. UMP Nominal dan UMP Riil terhadap KFM / KHM DKI Jakarta 1985 – 1995 (1985 = 100)



Sumber : diolah dari berbagai sumber

kita tentang betapa rendahnya upah buruh di Indonesia

Dari tabel 4, terlihat jelas bahwa upah pekerja/buruh di DKI Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal nilai KHL adalah nilai yang sangat minimal sekali dari kebutuhan hidup masyarakat. Dan juga nilai KHL adalah hasil survey bersama dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah, tetapi anehnya tidak pernah keputusan upah minimum nilainya sesuai 100% hasil survey KHL tersebut. Begitu pula dengan melihat grafik 1, maka tergambar bahwa upah Riil selalu dibawah upah nominal dan KHL.

4. *Isu Pengawasan Perburuhan (Labour inspection) Sangat Lemah*

Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka membuat pengawasan perburuhan juga mengalami perubahan radikal, dan menjadi lemah serta terjadi pelanggaran aturan perburuhan, antara lain : out sourcing tidak sesuai Undang-undang, upah murah, jam lembur tidak sesuai Undang-undang, PHK sepihak, dsb. *Fakta dibawah ini menjelaskan :*

- Belum tertatanya otonomi daerah membuat pengawasan perburuhan menjadi lemah, karena Disnaker hanya tunduk kepada Bupati/Walikota.
- Tenaga pengawas perburuhan (sumber daya

manusia) tidak kompeten, misal : Dinas Pengawasan diisi dari Dinas Pemakaman.

- Uang suap dari pengusaha nakal makin merajalela/meningkat.

5. *Isu Peradilan Perburuhan (PPHI) yang Tidak Pro Pekerja / Buruh*

Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial/PPHI (peradilan perburuhan) dibuat dengan tujuan agar penyelesaian perburuhan dapat diselesaikan dengan cepat, murah, dan berkeadilan. *Tetapi faktanya menjelaskan lain, yaitu :*

- Biaya di peradilan perburuhan mahal dan banyak mafia peradilan.
- Proses penyelesaian perkara menjadi lama (satu perkara = 9 proses gugatan).
- Lokasi peradilan perburuhan sangat jauh, sehingga saat sidang banyak pekerja yang tidak datang, sehingga pekerja kalah dalam perkara.
- Pekerja selalu kalah dalam berselisih dengan pengusaha melalui peradilan perburuhan, karena pekerja kurang dana.

6. *Isu Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/ SEZ)*

Tahun 2009 adalah tahun yang menentukan dan penting bagi Batam, Bintan, Karimun dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Karena mulai tahun tersebut akan dibuat Undang-undang kawasan ekonomi khusus (special economic zone/SEZ) yang menjadikan tiga daerah tersebut sebagai proyok percontohan SEZ di Indonesia. Tetapi belajar dari pengalaman di negara lain, seperti di China, India, Brazil, Malaysia dan Vietnam, bahwa SEZ *faktanya ditemukan efek negatif bagi pekerja/buruh* yaitu upah dibayar rendah, minimnya jaminan kesehatan, dan tidak ada dana pensiun.

Pilihan-Pilihan Cara Berpolitik Kaum Buruh

Dalam berpolitik bagi kaum buruh, mereka dapat melakukan pilihan-pilihan dalam cara berpolitiknya, yaitu: pertama, kaum buruh (Serikat Buruh/SB) menyampaikan konsep dan aspirasinya kepada partai-partai politik yang ada untuk diperjuangkan. Atau Kedua, kaum buruh (SB) dapat menempatkan orang pilihannya untuk “dititipkan” ke suatu partai politik tertentu yang mempunyai visi misi yang sama dengan SB, dan melalui

orang tersebut aspirasi kaum buruh diperjuangkan. Pilihan lainnya adalah, ketiga, kaum buruh (SB) mendirikan sendiri partai buruh sebagai alat perjuangan politiknya, tetapi pilihan ini memerlukan persyaratan-persyaratan yang ketat sekali.

Kasus di Amerika Latin merupakan sebuah contoh yang menarik sebagai pembandingan untuk Indonesia. Dimana, kondisi kultur masyarakat Amerika Latin hampir menyerupai kultur masyarakat Indonesia, yaitu paternalistik, miskin dalam ekonomi, terjajah lama dan mudah tersulut dengan isu sara. Dalam satu dekade ini, mayoritas negara-negara di Amerika Latin, pemerintahannya dikuasai oleh partai politik yang disokong penuh kaum buruh dan serikat buruh, ditambah sokongan dari kalangan agamawan. Mayoritas penduduknya sudah muak dengan eksploitasi buruh, tani, nelayan dan korupsi merajalela, serta ketimpangan sosial yang terlalu dalam, angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, harga beras dan transportasi yang mahal dan tidak adanya keteladanan kepemimpinan. Hal ini semualah yang membuat partai politik disokong buruh, tani, nelayan dan agamawan di Amerika Latin, menjadi partai berkuasa sekarang ini.

Kondisi di atas, dalam kurun waktu sekarang hingga sepuluh tahun mendatang, menyerupai kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Bukanlah hal yang mustahil, pada satu titik tertentu dalam kurun waktu tersebut, akan muncul pemimpin dan partai politik yang didukung kaum buruh, tani, nelayan, gerakan sosial lainnya dan agamawan akan menjadi partai berkuasa. Partai ini akan beraliran ideologi sosialis religius (karena bangsa Indonesia bangsa yang agamis, hal ini tidak bisa dinafikan) dengan mengusung tema perlindungan HAM, kelestarian lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi diiringi pemerataan ekonomi dan peningkatan upah, kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh, tani, nelayan, dan rakyat lainnya serta kebebasan menjalankan agamanya masing-masing. Kondisi menuju kepada terbentuknya sebuah partai politik alternatif (dikarenakan partai politik yang ada sekarang ini bukan rumah yang nyaman bagi buruh, tani, nelayan, rakyat kecil, dan gerakan sosial lainnya) akan lahir yang dipelopori oleh gerakan serikat buruh (karena dari semua elemen gerakan yang ada, tanpa mengecilkkan peran yang lainnya, gerakan buruh adalah yang paling siap dengan massa terorganisir dan menerima banyak pendidikan) dengan dukungan elemen gerakan sosial lainnya. Untuk menuju

kepada kondisi tersebut, maka gerakan serikat buruh tersebut harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Pertama, Ada satu tim independen yang meluas, menyebar questioner/angket ke sejumlah buruh, tani, nelayan, masyarakat menengah bawah/miskin dan agamawan tentang perlukah adanya saluran politik bagi mereka.

Kedua, Mendorong bersatunya (mayoritas) serikat buruh yang ada (karena mereka merupakan organisasi kader yang sudah tertata) untuk mengadakan konvensi nasional diperluas tentang perlukah dibentuk partai buruh.

Ketiga, Bilamanakonvensi memutuskan “perlu”, maka diadakan referendum nasional oleh tim (*task force*) yang dibentuk untuk itu. Untuk menanyakan kepada seluruh buruh, tani, nelayan, masyarakat kecil dan agamawan, setujukah mereka dengan dibentuknya partai buruh ini, dengan cara menyebar questioner kepada seluruh anggota serikat buruh sebanyak 3,4 juta orang atau bila ditambah anak dan istri akan berjumlah + 15 juta orang (Data Depnakertrans 2008). Dan secara pareto diagram, dapat dipastikan 20 % nya akan mengembalikan questioner dan menyetujui perlunya sebuah partai. Berarti

diperkirakan ada 3 juta orang akan mendukung, sebuah jumlah yang lumayan besar.

Keempat, Bila mayoritas menyatakan setuju pembentukan partai buruh, maka dibentuk pengurus dan struktur partai yang diperluas, yaitu dengan melibatkan elemen gerakan sosial lainnya.

Kelima, Maka peran Serikat Buruh kembali menjadi peran sosial ekonomi yang bersifat independen (bukan *under bouw* partai) tetapi memberikan sokongan kepada partai. Dan peran partai buruh memainkan peran sosial politik yang membawa aspirasi kepentingan kaum buruh dan masyarakat kecil. Atau dengan kata lain serikat buruhnya harus tetap independen tetapi tidak netral.

Bukan tidak mungkin, sepuluh tahun kedepan akan muncul satu kekuatan baru, yaitu partai buruh yang didirikan oleh mayoritas serikat buruh dan elemen gerakan sosial lainnya yang saling mengisi dengan aliran sosialisme religius. Karena di masa depan sekat-sekat abangan, santri dan priyayi akan memudar. Dan aliran partai buruh sosialisme religius akan memperkaya aliran yang sudah ada, yaitu aliran keagamaan dan aliran nasionalis. Sosialisme religius (SosDem Pancasila) adalah jalan tengah. Wallahu alam bi'sawab. ■





Tuntutan Reformasi Jaminan Sosial: Transformasi **Gerakan Buruh** Menuju **Gerakan Sosial dan Politik?**

Surya Tjandra, Trade Union Rights Centre



Kapitalisme mendorong lahirnya kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan bertolak belakang: kelas pemilik modal dan kelas buruh. Keuntungan berlebih pemilik modal adalah hasil dari pemerahan buruh yang berlebih juga, dan karenanya kepentingan buruh secara fundamental bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. Pada saat yang sama, terjadi juga apa yang oleh Karl Mannheim disebut sebagai 'demokratisasi fundamental' dari masyarakat, yaitu pemberdayaan dari kelompok-kelompok subordinat yang sebelumnya dikeluarkan dari pengaruh dan partisipasi politik. Kelas yang dahulu dipinggirkan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut dirinya sekarang mulai secara sistematis menuntut pembagian kue hasil pembangunan yang lebih adil. Kelas buruh yang terorganisasi, sebagaimana terjadi di Eropa Barat asal kapitalisme, seringkali memainkan peran penting di sini.

Pada gilirannya, di bawah bayang-bayang ketakutan terjadinya perpecahan dan kekacauan sosial, negara akan berusaha menemukan titik temu di antara dua kepentingan besar yang saling berhadapan ini. Di sinilah kemudian lahir yang kita kenal sebagai 'kebijakan sosial', ditandai oleh lahirnya serangkaian undang-undang yang melegitimasi campur tangan negara untuk memberikan kaum pekerja dan tanggungan mereka perlindungan minimal dari dampak buruk dan bahaya ekonomi kapitalisme, seperti kecelakaan, sakit, usia tua, maupun ketiadaan pekerjaan.

Di Indonesia, sebagai respon dari krisis ekonomi yang merontokkan Orde Baru dan keinginan untuk menunjukkan diri berbeda dengan pendahulunya, pemerintahan pasca-reformasi 1998 di Indonesia muncul dengan satu gagasan penting: saatnya Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang lebih menyeluruh. Lahir pada awalnya atas usulan Dewan Pertimbangan Agung, pada Sidang Umum MPR tahun 2002 pun menyepakati amandemen UUD 1945 yang secara khusus menyebutkan hak rakyat atas jaminan sosial dan tanggung jawab negara mewujudkannya. Setidaknya tiga Presiden RI, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, memiliki perannya masing-masing untuk melahirkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tanggal 19 oktober 2004.

Undang-undang ini secara cukup fundamental ingin mereformasi sistem jaminan sosial yang ada sekarang, dari yang bersifat limitatif dan diskriminatif berlaku hanya pada sebagian anggota masyarakat, menjadi universal dan tanpa diskriminasi berlaku untuk seluruh warga negara tanpa kecuali. Sebuah cita-cita mulia yang saat ini justru mendapat halangan utama dari penyelenggara negara sendiri. Pemerintah SBY jilid kedua (2009-) menihilkan beberapa kerja anggota kabinetnya sendiri dengan membuntukan negosiasi untuk RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan DPR. Sebuah aliansi puluhan serikat buruh dan LSM perburuhan, petani, nelayan, mahasiswa, dan profesi, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), adalah organ masyarakat sipil yang saat ini paling bersemangat mendesakkan pelaksanaan reformasi jaminan sosial ini.

KAJS sendiri secara "resmi" disepakati pada pertemuan yang difasilitasi FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) pada satu pertemuan di Hotel Treva, Jakarta, 6-8 Maret 2010, yang dihadiri belasan aktivis organisasi perburuhan tingkat nasional. Pertemuan ini penting karena guna memperkuat tuntutan buruh, disepakati untuk melebur seluruh elemen pendukung aksi jaminan sosial bagi seluruh rakyat ini ke dalam bentuk satu "Komite Aksi". Di mana Presiden atau Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum Konfederasi, serta Presiden atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Umum Federasi menjadi pendukungnya, dengan struktur instruksi ke daerah berupa pertemuan formal dengan DPR, DPD, pemerintah dan lembaga resmi lainnya, rapat formal gabungan SP/SB dan elemen lainnya.

Disepakati juga koordinasi KAJS dilaksanakan oleh Koordinator/Presidium, yang terdiri dari: R. Abdullah (KSPSI), Joko Hariyono (SPN), Achmad Munji (KSPSI), Indra Munaswar (KOBAR), Ali Akbar (KSPI), Timbul Siregar (OPSI), Abdulah Sani (KSBSI), dan Surya Tjandra (TURC). Sedangkan Sekretaris Jenderal KAJS disepakati adalah Said Iqbal (FSPMI/KSPI). Di samping itu aliansi SP/SB di daerah juga direncanakan dibentuk, dengan tugas mengorganisir aksi, lobby informal dan menyiapkan konsep sandingan, serta menyelenggarakan seminar/lokakarya dan pertemuan berkenaan dengan jaminan sosial serta memperluas jaringan KAJS yang melibatkan SP/SB lain untuk mengadvokasi pelaksanaan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Serangkaian program aksi yang kalau ditotal melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah pun dilaksanakan, diiringi kampanye dan propaganda di masyarakat dan media massa, dengan tujuan agar DPR dan DPRD masing-masing daerah mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk pelaksanaan jaminan sosial. Sebuah aksi nasional tanggal 5 April 2010 di DPR, bersamaan dengan pembukaan sidang paripurna DPR, membuka aksi, dengan puncaknya pada aksi Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2010 di Istana Negara, dengan tuntutan utama dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional, dengan tiga tuntutan utama: jaminan kesehatan seluruh rakyat, seluruh penyakit, seumur hidup, jaminan pensiun, dan BPJS sebagai badan hukum publik "wali amanat". Menggenapi ini, tanggal 10 Juni 2010 KAJS memasukkan gugatan warga Negara (*citizen lawsuit*) terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan delapan menteri terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat ini.

Pro-Kontra KAJJS

Sebagai sebuah organisasi yang mencoba mengkonsolidasikan kekuatan gerakan serikat buruh, dengan agenda seserius dan seambisius jaminan sosial universal bagi seluruh rakyat, jelas KAJJS menabrak berbagai kepentingan yang selama ini menikmati situasi yang ada. Kepentingan yang paling terusik tentunya adalah dari Pemerintah sendiri, yang selama ini menikmati akses terhadap dana segar hasil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jaminan sosial yang sudah ada selama ini, khususnya PT Jamsostek yang memiliki aset lebih Rp 90 triliun. Aksi-aksi yang dilakukan KAJJS jelas mengganggu *status quo*, khususnya dengan adanya gugatan warga Negara yang secara langsung merepotkan pemerintah, seperti diakui oleh salah seorang anggota tim pembela pemerintah.

Isu yang diangkat oleh KAJJS juga dinilai sebagian kalangan berhasil melampaui kepentingan tradisional buruh di Indonesia pada umumnya, yang praktis masih berkutat pada isu-isu eksistensial seperti upah dan status kerja yang tidak jelas. Berbeda dengan 'komite aksi' yang sering muncul, KAJJS memecahkan rekor dengan berhasil bertahan cukup lama, lebih setahun sejak dibentuk, dan masih terus bersemangat dan konsisten dengan isu yang sama. Tidak berhenti pada penggalangan kekuatan di tingkat nasional, KAJJS juga bergerak mengajak aktivis serikat buruh di daerah-daerah, yang sebagian sebetulnya juga sudah memiliki aliansinya sendiri, untuk juga mengangkat perjuangan reformasi jaminan sosial nasional ini di daerahnya.

Meski demikian, KAJJS oleh sebagian kalangan lain dirasa juga menimbulkan masalah, dengan secara langsung atau tidak mengambil alih peran dan upaya konsolidasi beberapa konfederasi serikat buruh tingkat nasional pasca-TUMPOC (*Trade Union Meeting for Political Consensus*) yang dilaksanakan 23-25 November 2009 di Sukabumi. Ketika disepakati pembentukan FReN (Forum Rembug Nasional) sebagai kelanjutan dari TUMPOC pada Februari 2010, banyak aktivis yang sama pun kemudian bergeser ke KAJJS yang dibentuk hanya selang sebulan setelahnya pada Maret 2010.

Ketidakjelasan sumber dana untuk operasional maupun keraguan pada kepemimpinan dari FReN menjadi alasan utama yang disampaikan para aktivis (juga donor) yang pada awalnya mendukung FReN untuk kemudian menggeser dukungan ke KAJJS. Sifat FReN yang cenderung struktural di mana birokrasi pengurus

konfederasi secara otomatis dan *ex officio* akan menjadi pemimpinnya, dirasa sebagian pimpinan federasi sebagai menghambat peran mereka padahal kekuatan riil justeru berada di federasi bukan konfederasi.

Inilah juga yang bisa jadi mendasari kurang antusiasnya, kalau tidak bisa dibilang penolakan, sebagian pimpinan konfederasi terhadap KAJJS. Kompetisi personal antara pemimpin buruh juga tampaknya sedikit mewarnai penolakan ini (kasus Thamrin Mosii, Presiden KSPI dan Said Iqbal, Presiden FSPMI/Sekjen KAJJS), selain sebagian pimpinan konfederasi memang secara langsung memiliki *vested interest* untuk tidak begitu saja mau menerima gagasan reformasi sistem jaminan sosial yang ada khususnya terkait jaminan sosial untuk buruh, Jamsostek (kasus Rekson Silaban, Presiden KSBSI dan Sjukur Sarto, Ketua Umum KSPSI, keduanya adalah Komisaris di PT Jamsostek yang diangkat sepihak oleh Pemerintah, bukan karena dipilih/ditunjuk oleh kalangan buruh sendiri).

Situasi ini membelah tanggapan konfederasi yang pada gilirannya juga berpengaruh pada tanggapan buruh secara umum pada isu ini dan konsekuensi perjuangan mereformasi sistem jaminan sosial ini. KSPSI, khususnya yang berada pada kubu Sjukur Sarto, praktis tidak terlalu terlibat aktif di KAJJS, hanya ada beberapa individu pimpinannya. KSPI, meski Thamrin Mosii Presidennya tidak sepenuhnya menolak tidak juga pernah ada sikap tegas mendukung, dan KSPI praktis terbelah dengan banyaknya pimpinan federasi di bawah KSPI yang aktif mendukung dan terlibat dalam KAJJS. Sementara KSBSI, hanya satu federasi sektoral di bawahnya yaitu Lomenik (sektor logam dan elektronik) yang bersedia menjadi penggugat dalam gugatan warga Negara yang diajukan KAJJS, sementara yang lain tidak mau terlibat.

Belakangan Rekson Silaban dan Sjukur Sarto juga berhasil mengajak Thamrin Mosii untuk secara tidak langsung 'menolak', UU SJSN dengan pertama-tama mendesakkan revisi UU Jamsostek daripada mendesakkan pelaksanaan UU SJSN. Sesuatu yang di kalangan KSPI sendiri mengundang kritik secara internal, karena merasa Thamrin telah berhasil 'dipengaruhi' oleh Rekson maupun Sjukur. Seperti dijelaskan seorang pimpinan sebuah federasi, pernyataan sikap ketiga pimpinan konfederasi tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di sebuah hotel di Jakarta yang disponsori oleh PT Jamsostek, yang secara cukup mencolok memajang berbagai atributnya di lorong hotel menuju ruang kon-

ferensi pers.

Lepas dari pro-kontra dan politik antar-serikat buruh ini, KAJJS terbukti relatif berhasil mengkonsolidasi gerakan buruh untuk mendesak agenda reformasi jaminan sosial. Kalau setahun lalu belum banyak pimpinan serikat buruh yang memahami apalagi mendukung isu ini, keberhasilan mengerahkan massa yang cukup besar pada peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2010 dengan liputan di halaman satu hampir seluruh media cetak, menjadikan isu reformasi jaminan sosial mendapat tempat. Di tengah ketiadaan partai politik yang secara ideologis memiliki agenda politik dan sosial seperti ini, kehadiran KAJJS terbukti telah mewarnai percaturan politik khususnya di parlemen, seiring pembahasan, dan pengawalan oleh KAJJS, RUU BPJS di sana.

Ketika beberapa anggota DPR mengungkapkan frustasinya karena pemerintah dengan cukup percaya diri men-*deadlock*-kan pembahasan terkait RUU BPJS, KAJJS muncul dengan ide 'mimbar rakyat untuk jaminan sosial', yang akan menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2011, dengan satu tuntutan yang cukup tegas: 'Laksanakan Jaminan Sosial Sekarang, atau SBY Turun!'. Sesuatu yang praktis tidak akan muncul dari kalangan serikat buruh arus utama yang saat ini menjadi unsur utama pendukung KAJJS beberapa tahun lalu.

Mencermati situasi politik yang ada, seperti tuduhan tokoh lintas agama bahwa Pemerintah telah melakukan 'pembobongan publik', ditambah lagi bocoran Wikileaks yang mengungkap laporan diplomat Amerika Serikat terkait 'penyalahgunaan kekuasaan' Presiden SBY dan keluarganya, tuntutan seperti ini juga yang datang dari satu kekuatan macam serikat buruh, lengkap dengan ancaman 'pemogokan umum di tiga kawasan industri' jelas akan amat berpengaruh pada konstalasi politik yang ada.

Beberapa Catatan

Demikianlah, dalam tempo yang relatif singkat, perlahan-lahan tapi pasti KAJJS mulai membangun kekuatan dan pengaruhnya sebagai kekuatan sosial dan politik. Keberhasilan mendesak DPR untuk menyetujui RUU BPJS sebagai inisiatif DPR, relatif keberhasilan penggalangan kekuatan gerakan buruh dari tingkat nasional hingga ke daerah, penyebaran informasi dan agenda tuntutan terkait reformasi jaminan sosial menyeluruh di kalangan buruh dan masyarakat, peran sebagai katalisa-

tor yang memberi kesegaran di tengah stagnansi politik terkait pembahasan RUU BPJS di DPR, merupakan beberapa contoh konkret dari peran dan pengaruh KAJJS yang terus meningkat.

Dalam situasi seperti ini, perlahan-lahan mulai muncul juga pertanyaan di sebagian aktivis KAJJS sendiri terkait masa depan. Perjuangan KAJJS memang berlanjut, tapi apa sesungguhnya tujuan akhir dari semua ini? Inilah pertanyaan besar yang tampaknya masih belum jelas dijawab secara lugas oleh KAJJS. Gagasan seperti pembentukan 'majelis permusyawaratan buruh/pekerja' atau 'dewan buruh/pekerja' oleh sebagian kalangan dalam KAJJS, sebagai bentuk konkret penggalangan persatuan dan kekuatan buruh secara nasional yang lebih permanen dan sistematis, merupakan beberapa upaya yang mulai mengarah untuk menjawab pertanyaan ini. Harapannya cukup sederhana meski tidak juga bisa dibalang mudah: mempertahankan persatuan gerakan buruh dengan agenda sosial dan politik kerakyatan yang lebih sistematis.

Beberapa pekerjaan rumah juga sudah menanti, seperti usaha penggalangan kekuatan basis yang lebih solid masih belum optimal dilaksanakan. Seperti disampaikan oleh seorang aktivis Forum Buruh DKI, aliansi serikat buruh di DKI, pendekatan KAJJS praktis juga masih lebih bersifat elitis, kampanye elite dengan lobby elite, acara-acaranya pun cenderung bersifat seremonial dengan instruksi pada basis yang kurang jelas. Ia mengkritik mengapa KAJJS tidak mendelegasikan sebagian kerja KAJJS kepada aliansi daerah seperti Forum Buruh DKI, misalnya, untuk secara aktif mengkampanyekan isu reformasi jaminan sosial ini kepada basis buruh, yang dinilai aksesnya lebih dimiliki serikat buruh di daerah daripada di pusat.

Sebagian pimpinan KAJJS juga merasa sudah bisa cukup mampu meraih dukungan basis buruh semata ketika pimpinannya bisa diajak untuk mendukung dan aktif di KAJJS. Padahal, seperti disampaikan seorang aktivis LSM yang juga aktif di KAJJS, banyak aktor di dalam KAJJS aktif dengan membawa 'nama pribadi' daripada organisasi, dan banyak yang bukan aktor utama di organisasinya masing-masing. Sehingga partisipasi aktif di KAJJS tidak otomatis partisipasi organisasinya, atau mampu mengubah orientasi organisasinya sendiri untuk mau mendukung perjuangan reformasi jaminan sosial. Partisipasi beberapa aktivis KSPSI (kubu Sjukur Sarto) dan KSBSI (Rekson Silaban) di dalam KAJJS, misalnya,

tidak menjamin konfederasinya berubah sikap terkait perjuangan reformasi jaminan sosial.

Di sisi lain, alih-alih berusaha sungguh menggalang dukungan basis buruhnya sendiri, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), aktor utama di balik pembentukan dan operasionalisasi KAJJS, tampaknya lebih tertarik untuk mendekati massa yang paling cepat dimobilisasi seperti di Bekasi, yang memang basis utama FSPMI. Kemampuan KAJJS untuk mengangkat dan mengemas isu juga dipertanyakan, ketidakjelasan pembagian beban tugas secara internal cukup menghambat efektifitas kinerja KAJJS yang semestinya bisa lebih baik lagi. Kesepakatan untuk membuat instruksi di masing-masing organisasi dari tingkat paling atas ke paling bawah di serikat untuk mendukung perjuangan jaminan sosial dan penggalangan aliansi serikat buruh di tingkat daerah, pun hanya FSPMI yg melaksanakannya, yang lain meski tidak pernah secara jelas menolak hingga sekarang juga tidak sungguh-sungguh mewujudkannya.

Untunglah ada gugatan warga Negara, di mana TURC (*Trade Union Rights Centre*), sebuah LSM pelayanan serikat buruh di Jakarta, dengan Direktornya Surya Tjandra, memainkan peran penting mewujudkan itu. Pada saat-saat tertentu, khususnya ketika logistik untuk melaksanakan rapat menurun, gugatan warga negara ini menjadi satu-satunya sarana KAJJS melakukan konsolidasi gerakannya. Kehadiran TURC yang memang menfokuskan kerja-kerja dan sumber dayanya pada pemberdayaan dan advokasi buruh untuk isu hukum, juga cukup memberi warna dan kepercayaan diri bagi KAJJS, khususnya ketika memasuki proses persidangan di pengadilan. Sebagai sebuah LSM, TURC juga dinilai menghadirkan perspektif yang berbeda di banding serikat buruh, dengan fleksibilitas dan kreatifitas yang dimiliki tanpa perlu khawatir 'merebut lahan' dan kompetisi yang sering muncul antar-serikat buruh.

Dari uraian di atas tampak KAJJS memang masih embryo sebagai sebuah organisasi persatuan perjuangan, namun sebagian upaya dan perjuangan KAJJS terbukti telah memberi pengaruh berharga. Bagaimana bisa begitu? Ada beberapa penjelasan. Di dalam KAJJS ada FSPMI, yang praktis menjadi motor penggerak utama dari KAJJS dengan Said Iqbal sebagai Presiden FSPMI dan Sekjen KAJJS menjadi bahan bakarnya sekaligus motivatornya. Inilah kekuatan sekaligus juga potensi kelemahan, khususnya ketika kinerja KAJJS menjadi tergantung pada inisiatif FSPMI. Selain itu isu yg dibawa

adalah isu penting yang bila terlaksana akan mempunyai dampak penting dan panjang bagi bangsa ini, sementara praktis tidak adanya 'saingan' yang melakukan hal sama dengan metode kerja yang sama.

Bagaimana pun, KAJJS telah berhasil jadi 'cubitan' bagi pemerintah, tapi belum bisa menjadi 'pukulan' mematikan yang bisa memaksa pemerintah berkompromi dan mau melaksanakan agenda reformasi jaminan sosial, yang memang tidak pernah datang secara gratis. KAJJS pada saat ini lebih sekadar mengganggu pemerintah dan perusahaan negara pelaksana jaminan sosial yang masih enggan memenuhi kewajibannya, masih perlu kerja keras lagi untuk melahirkan massa sadar yang mendukung bukan sekadar ikut-ikutan tetapi karena kesadaran akan pentingnya perjuangan reformasi jaminan sosial ini.

Singkat kata, tantangan terbesar KAJJS di masa depan barangkali adalah bagaimana mentransformasikan gerakannya menjadi sebuah kekuatan sosial dan politik yang diperhitungkan. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat dan dipercaya oleh basisnya, dengan energi perjuangan yang cukup kuat untuk sebuah perjuangan yang niscaya akan memakan waktu yang lama. Ini bukan sebuah pekerjaan sederhana, apalagi untuk sebuah organisasi macam KAJJS. Ia seharusnya lebih merupakan pekerjaan partai politik, yang sayangnya belum ada satu partai pun yang secara ideologis mendukung gagasan sosial macam jaminan sosial ini di Indonesia.

Apakah KAJJS mampu mentransformasi kekuatan gerakan buruhnya menjadi gerakan sosial dan gerakan politik, masih harus menunggu beberapa waktu lagi untuk membuktikannya. Yang jelas, seperti diungkap salah seorang aktivis KAJJS, 'Layar sudah terkembang, adalah pantang bagi kita untuk surut berjuang!' Sebuah pernyataan yang makin sering terdengar disampaikan aktivis KAJJS di tingkat nasional dan daerah, di organisasi level atas maupun bawah, seiring kerja-kerja yang dilakukan KAJJS. Inilah, 'demokratisasi fundamental' yang sesungguhnya sedang terjadi di negeri ini.

Jakarta, 18 Maret 2011

TURC

TRADE UNION RIGHTS CENTRE

Jalan Mesjid III No. 1, Pejompongan, Jakarta 10210
 Tel. +6221 5703929, Fax. +6221 5738912,
 Email: info@turc.or.id

Mengapa sebuah “pusat bagi hak-hak serikat pekerja/serikat buruh?”

Setelah berperan aktif dalam perjuangan melawan belenggu kolonialisme di Indonesia, serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia menjadi aktor yang penting dalam pergerakan organisasi-organisasi akar rumput di Indonesia. Situasi ini terus berlanjut pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno hingga berakhirnya pemerintahan tersebut pada pertengahan tahun 1960an. Ketika rezim baru berkuasa, sebuah rezim yang dikenal sebagai “Orde Baru” dibawah Pemerintahan Presiden Soeharto, serikat pekerja/serikat buruh berada dibawah kontrol kuat pemerintah demi pembangunan ekonomi.

Menyusul terjadinya krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru nusantara yang dilakukan oleh para mahasiswa dan kaum muda, pada Mei 1998 Presiden Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri. Setelah peristiwa itu, kebijakan-kebijakan perburuhan menjadi lebih luwes sehingga memberikan ruang-ruang kesempatan lagi bagi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. Sejak itu, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar meningkat secara signifi-

kan. Pada tahun 2001 terdapat 53 serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar dan pada tahun 2003 jumlah ini meningkat menjadi 70. Dalam situasi ini serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia harus mencari sebuah peran baru bagi mereka ketika kebebasan berserikat muncul dihadapan. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi serikat pekerja/serikat buruh untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui perundingan bersama dan memikirkan strategi-strategi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi merupakan ujian nyata bagi gerakan perburuhan di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini dan juga tantangan lainnya, serikat pekerja/serikat buruh harus melakukan sejumlah analisa dan juga pelatihan-pelatihan.

Walaupun demikian, sebagian besar serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan penelitian, dan jumlah organisasi-organisasi yang secara khusus memfokuskan kerjanya pada penelitian mengenai isu-isu perburuhan dan pada pelatihan-pelatihan bagi gerakan buruh sangatlah minim. Meskipun jumlahnya terus meningkat, namun kualitas dan kemampuan serta keahliannya

tidak terdistribusikan secara merata diantara serikat pekerja/serikat buruh. Tidak ada jaringan antar organisasi yang fokus pada penyediaan layanan bagi perburuhan dan tidak ada gerakan perburuhan dengan sumber daya yang relatif baik; bahkan tidak ada sistem pendidikan yang sistematis bagi pekerja/buruh dan juga tidak ada kebijakan bagi unit penelitian yang khusus bagi serikat pekerja/serikat buruh. Untuk mengisi kekosongan ini, maka dibentuklah *Trade Union Rights Centre* (TURC) pada 10 Desember 2003, dengan itikad untuk dapat terus memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan penelitian-penelitian yang terkait dengan kebijakan dalam isu-isu seperti peraturan perburuhan, perundingan bersama, kesetaraan jender, tindakan khusus sementara, politik ekonomi Indonesia dan globalisasi.

Tujuan

TURC bertujuan untuk membantu serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia dalam meningkatkan kapasitasnya, diantaranya melalui:

- Mengumpulkan, selalu memperbaharui dan menyediakan informasi mengenai isu perburuhan dengan cara-cara yang mudah diakses;
- Membuat dan selalu memperbaharui bank data mengenai situasi ekonomi dan hubungan industrial di Indonesia;
- Merencanakan dan melaksanakan program-program pelatihan bagi serikat pekerja/serikat buruh;
- Mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dalam mengembangkan usulan-usulan kebijakan yang komprehensif;
- Menyediakan forum-forum diskusi mengenai perburuhan dan isu-isu sosial-ekonomi;
- Berperan sebagai sebuah pusat informasi yang mencakup berbagai isu sosial-ekonomi dan politik bagi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi-organisasi berbasis komunitas.

Pusat Sumber Daya

TURC juga dimaksudkan untuk menjadi sebuah pusat sumber daya (*resource centre*) dan direncanakan untuk terus memperbaharui dan memperluasnya. Tersedia berbagai buku dan bacaan yang diterbitkan secara berkala dan menyajikan beragam isu, diantaranya mengenai serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia dan di Asia Tenggara, serikat pekerja/serikat buruh

internasional, ekonomi di Indonesia, hubungan industrial, kesetaraan jender, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan juga publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh UNDP dan ILO.

Pusat sumber daya ini sejatinya berperan sebagai perpustakaan bagi serikat pekerja/serikat buruh, namun juga terbuka bagi LSM, mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk melengkapi koleksi informasi, sumber-sumber buku dan dokumen telah didiskusikan dengan para aktivis perburuhan. Sebagai langkah awal, pusat sumber daya ini memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan, dan di masa depan akan dikembangkan lagi kegiatan-kegiatan seperti pelatihan diploma perburuhan dan pelatihan peningkatan kapasitas penelitian.

Pusat Informasi

Para aktivis serikat pekerja/serikat buruh telah sepakat bahwa TURC menyediakan informasi yang berguna bagi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. Kategori utama informasi yang dimaksud adalah:

- Informasi dan analisa mengenai peraturan-peraturan perburuhan dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut mempengaruhi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia;
- Dokumentasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan berserikat;
- Pemetaan serikat pekerja/serikat buruh dan LSM yang aktif bekerja dalam isu hak-hak buruh;
- Informasi mengenai hak-hak buruh dan standar perburuhan internasional;
- Informasi mengenai praktek kerja subkontrak, buruh migran dan sektor informal;
- Program-program pendidikan mengenai peraturan-peraturan perburuhan bagi pemimpin serikat pekerja/serikat buruh;
- Advokasi mengenai strategi kapan pekerja/buruh harus mengandalkan hukum perburuhan dan kapan ketika mereka tidak harus.

Program-program Pendidikan

TURC menawarkan berbagai program pelatihan jangka pendek bagi para pemimpin serikat pekerja/serikat buruh, organiser dan pekerja/buruh di tingkat perusahaan di Indonesia. Selama tiga tahun pertama keberadaannya, TURC telah merencanakan serangkaian pelatihan-pelatihan, diantaranya:

- Hukum perburuhan bagi aktivis serikat pekerja/serikat buruh;
- Ekonomi perburuhan dan globalisasi;
- Zona pemrosesan ekspor;
- Program penyalarsan struktur;
- Perundingan bersama;
- Tindakan khusus sementara;
- Isu Gender dalam serikat pekerja/serikat buruh;
- Penelitian mengenai isu perburuhan;
- Pelatihan mengenai serikat pekerja/serikat buruh sejati (*Genuine*)

Penelitian

Salah satu fokus kerja TURC adalah melakukan penelitian yang terkait dengan kebijakan-kebijakan perburuhan. Pada tiga tahun pertama kehadirannya, salah satu fokus penelitian yang dilakukan TURC adalah mengenai dampak reformasi undang-undang perburuhan, dampak globalisasi dan respon dari gerakan perburuhan terhadap isu-isu tersebut.

TURC berencana untuk melakukan penelitian di zona pemrosesan ekspor, penelitian mengenai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan privatisasi di Indonesia. Selain itu juga berencana melakukan kajian mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh di tingkat nasional dan menyiapkan beberapa dokumen untuk diskusi mengenai peran ILO dalam deregulasi peraturan perburuhan di Indonesia dan “proses ekstra-parlementer” dalam kerangka penyusunan hukum dan peraturan perburuhan sebagai bagian dari “program reformasi hukum perburuhan”.

Publikasi

Selain mempublikasikan hasil-hasil penelitian, TURC juga mempublikasikan sejumlah buku mengenai isu-isu perburuhan, seperti misalnya buku teks mengenai pelatihan hukum perburuhan dan berbagai dokumen seminar dan artikel yang diterbitkan dalam publikasi lokal dan internasional. Selanjutnya TURC mempublikasikan sejumlah bacaan populer yang ditujukan bagi serikat pekerja/serikat buruh, termasuk juga diantaranya modul pelatihan bagi pekerja/buruh ditingkat perusahaan, booklet mengenai sejarah perburuhan Indonesia dan booklet mengenai tindakan khusus sementara dan mengenai hak-hak pekerja/buruh perempuan. Sebagian besar publikasi ini direncanakan dapat diunduh dari

website TURC.

Struktur Organisasi

Seluruh properti TURC adalah milik “Perkumpulan TURC” – sebuah lembaga pendidikan yang bersifat amal, dikelola oleh Dewan Pengurus Perkumpulan dan dipimpin oleh seorang ketua. Dewan pengurus terdiri dari:

- 4 (empat) orang anggota pendiri
- 3 (tiga) orang wakil dari serikat pekerja/serikat buruh
- 1 (satu) orang aktivis jender
- 1 (satu) orang akademisi

Dewan Pengurus Perkumpulan mengawasi kerja-kerja yang dilakukan oleh TURC, mengangkat dan memberhentikan staf, dan mengontrol penggunaan dana dan aset. Dalam kegiatan sehari-hari, TURC dikelola oleh seorang direktur. Disamping itu, ada juga sebuah kelompok kerja perburuhan yang anggotanya terdiri dari para aktivis perburuhan yang bertindak sebagai Dewan Penasehat TURC.

Strategi Keuangan

Pada tiga tahun pertama sejak didirikannya, TURC menggunakan dana yang diperoleh dari layanan yang diberikan bagi kalangan perburuhan untuk membiayai 20-30% biaya operasional. Sedangkan 70-80% dibiayai oleh dana dari donor internasional yang digunakan untuk pendanaan program-program tertentu. TURC merencanakan akan meningkatkan kemandiriannya secara financial. Hal ini dilakukan dengan memungut komisi dari program-program penelitian dan pelatihan, dan memasarkan publikasi dan program-program trainingnya. Meskipun demikian, TURC akan berusaha memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tetap dapat terjangkau oleh konstituennya.



Meretas Kesadaran, Merajut Ideologi



Judul Buku	: Buruh Bergerak: Sebuah Konstruksi Ideologi
Penulis	: Andito
Penerbit	: Trade Union Care Center (TUCC) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES)
E d i s i	: Cetakan Pertama, September 2008
T e b a l	: 220 halaman

perjuangan itu melalui pengalaman Amerika ketika membuat Declaration of Independence pada 1776. Traktat bersejarah ini menekankan persamaan manusia dan jaminan hak yang melekat pada setiap individu. Di Eropa, Revolusi Perancis 1789 melahirkan rumusan *Declaration of the Rights of Man and Citizen* yang berinti pada kebebasan (*libertie*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternity*). Begitu juga di negeri ini, UUD 1945 adalah deklarasi besar tentang sejarah perlawanan rakyat melawan penindasan manusia, baik dalam bentuk penjajahan kapitalisme-dagang Belanda maupun fasisme-militeristik Jepang.

Upaya pengembalian harkat dan martabat kemanusiaan ini juga terekam cukup tegas pada Alinea pertama Pembukaan UUD 1945: *"...penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."* Kalimat ini telah memasuki wilayah universal bahwa penjajahan menindas prinsip kemanusiaan dan perikeadilan. Tujuan dibentuknya pemerintahan RI yang merdeka dan berdaulat adalah tak lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

"Kesejahteraan kaum buruh tidaklah diberikan atau datang begitu saja. Pun tidak turun dengan sendirinya dari langit. Namun, kesejahteraan, harkat, dan martabat buruh harus diperjuangkan, dengan dan oleh tangan kaum buruh melalui alat politiknya sendiri." Inilah seutas kalimat yang kerap menggugah kesadaran kaum buruh untuk bangkit melawan penindasan sistem kapitalisme global sejak dua abad lalu.

Di dada kaum buruh dan para pejuang demokrasi, semangat pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan adalah landasan hakiki kemerdekaan. Kita bisa merekam

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun, dalam ranah kehidupan riil, terutama dalam konteks buruh dan logika hubungan industrial, buruh tak pernah punya banyak pilihan untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Buruh tak memiliki hak untuk bernegosiasi, bersepakat, atau berkeluh kesah. Kondisi ini akumulatif terus tereproduksi dalam keseharian hidup kaum buruh sehingga yang namanya upah murah, jam kerja panjang, terancamnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta problem normatif lainnya, menjadi suatu praktik sosial yang dianggap normal dan lumrah.

Dari kondisi di atas, jelas terpampang, buruh "dipaksa" untuk menyesuaikan diri dengan relasi industrial yang eksploitatif dan mekanistik, yang digambarkan Foucault dalam *Discipline and Punish* (1991), dikerjakan sebagai sesuatu yang normal. Pada aras itulah kuasa relasi industrial yang bekerja di dalam keseharian buruh yang mekanistik. Kesadaran kelas tidak serta-merta muncul kendati mereka mengalami sejenis penindasan. Kesadaran pragmatis justru makin menguat karena kuasa industrial tidak hanya beroperasi di wilayah itu tetapi juga di dalam domain gaya hidup, misalnya, buruh selalu berusaha meniru perilaku konsumsi kelas menengah. Di dalam wilayah seperti itu upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup (pragmatis) adalah pilihan paling rasional ketimbang pemenuhan kebutuhan politis yang berbasis pada kesadaran kelas.

Buku "*Buruh Bergerak: Sebuah Konstruksi Ideologi*" merupakan serpihan catatan hasil refleksi kritis seorang aktivis muda yang terlibat cukup intens dalam pengorganisasian buruh. Lebih tegas, buku ini merupakan kumpulan dari serpihan materi *Basic Leadership Training* dan *Intermediate Leadership Training* yang diselenggarakan oleh TUCC dengan dukungan FES sepanjang periode 2007-2008 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Buku ini, yang ditulis dalam ragam gaya bahasa ringan, memberi sebuah inspirasi bahwa meretas kesadaran dan merajut ideologi adalah tugas besar kaum buruh yang harus dikerjakan secara *ajeg*. Kenapa? Karena menurut Andito, mengutip Lao Tzu (600-531 SM), "mengetahui orang lain adalah kebijaksanaan, sementara mengetahui diri sendiri adalah pencerahan" (hal. 19).

Andito memulai dari pertanyaan yang mendasar (ideologis!): Sudah berapa lama kita bekerja? Apa saja yang sudah kita dapatkan? Seberapa besar pekerjaan kita memberi makna bagi diri, keluarga, dan lingkungan kita? Apakah kita puas dengan pekerjaan kita sekarang? Apakah kita menyadari siapa diri kita?

Meretas Kesadaran

Sejumlah proposisi di atas patut ditanyakan kaum buruh, karena buruh (dan kelas sosial marjinal lain), intrinsik, sesungguhnya menyadari dan merasakan adanya jurang lebar dan menganga antara penghasilan yang mereka peroleh dan kebutuhan hidup yang tak pernah *equal*. Dengan status sebagai buruh, tiap bulan kita dihantui oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sedangkan gaji yang kita terima tidak pernah mencukupi. Padahal usaha keras telah dilakukan, sementara prestasi dan komitmen pada perusahaan juga tidak mengecewakan (hal. 20).

Tapi, mengapa di negeri yang kaya ini, yang terkenal makmur dan sejahtera, yang *gemah ripah loh jinawi*, yang punya hasil alam dan bumi yang melimpah ruah, buruh negeri ini tak pernah bisa tersenyum *sumringah*? Nusantara yang kita cintai ternyata hanya menyajikan dua wajah ekstrem: orang kaya yang semakin kaya dan orang kebanyakan yang semakin miskin dan dimiskinkan. Di negeri ini, kesenjangan sosial tampil menyolok, tapi tidak diteriakan dengan kasar. Semua berjalan harmonis. Kedua kelas sosial ini seakan tidak saling mengganggu. Orang-orang kaya antri launching apartemen baru. Orang-orang miskin antri pembukaan pos penerimaan Bantuan Tunai Langsung alias BLT (hal. 21).

Salah satu argumen logis dari fenomena di atas, bisa kita timba dari pengantar Erwin Schweisshelm, dalam buku ini. "Demokrasi yang sehat dan plural, membutuhkan basis masyarakat sipil yang kuat. Di antara sekian banyak lapisan masyarakat sipil di Indonesia, kelas buruh mendapat prioritas terakhir. Fenomena ini cukup mengesankan, mengingat bahwa buruh setidaknya menempati sepertiga dari total tenaga kerja yang ada (hal. 3).

Lalu, bagaimana kaum buruh menyadari kondisi ini. Menurut penulis, mengutip teori Mazhab Frankfurt (yang dikembangkan oleh Horkeimer, Adorno, dan Habermas), kaum buruh harus memiliki perspektif kritis, yakni basis ideologi. Sebab, ideologi adalah

struktur pengetahuan yang punya solusi kokret untuk menghadapi realitas yang dihadapi buruh. Tujuan utama membuka epistema ideologi (kritis) adalah membangun “ide perlawanan” atas dominasi dan hegemoni intelektual kaum mapan yang selalu mentransformasikan gagasan dan ide dominan kepada publik guna menutupi berbagai penindasan dan penghisapan (kelas) yang dilakukannya (hal. 29-30).

Ideologi setidaknya memiliki tiga pondasi: gagasan, sikap, dan aksi. Konsep atau gagasan adalah tersingkapnya realitas tanpa keraguan. Konsep diperoleh dari interaksi subyek dengan obyek melalui pancaidera yang terverifikasi melalui akal rasional kita. Konsep-konsep yang terakumulasi dan terstruktur kita namakan ilmu pengetahuan (*sicence*).

Sikap adalah konsekuensi lanjut dari atau penilaian spontan atas pengetahuan yang kita terima. Jika kita tidak punya sikap, bisa dipastikan kita tidak punya pengetahuan. Sikap kita menentukan penilaian kita atas realitas yang kita tangkap. Dan penilaian kita menentukan kualitas diri kita.

Sedangkan perbuatan (tindakan atau aksi) manusia sangat bergantung pada kesadarannya atas realitas. Karena kita makhluk sosial, maka tindakan kita harus mengarah pada pembaharuan kehidupan sosial pula (hal. 31-32).

Seorang karyawan yang memiliki pengetahuan perburuhan yang utuh akan mengetahui segala konsekuensi perbuatannya. Ia akan memiliki kepekaan sosial yang lebih baik terhadap nasib-nasib karyawan lain, terutama yang tertindas. Ia juga menyadari sistem perburuhan punya hubungan atau relasi dengan sistem lain. Sebaliknya, karyawan yang tidak punya pengetahuan perburuhan yang utuh tidak akan berani bertindak. Meski pun ia dizalimi, ia lebih berpikir personal dan tidak peduli dengan realitas yang menindasnya (hal. 33).

Ini yang disebut “modal intelektual” buruh. Secara sederhana, modal intelektual dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang terkait dengan relasi konstruksi sosial yang kerap tak terlihat secara riil dan terasa secara kasat mata. Di samping modal intelektual tersebut, kaum buruh juga harus memiliki “modal sosial”, yakni sebuah relas antar-individu yang membentuk jejaring yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Jejaring ini menjadi basis material yang dapat diakumulasi

oleh individu yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan potensi masing-masing. Dalam konteks pabrik, jejaring tersebut bersinggungan langsung dengan lingkungan pabrik maupun lingkungan sosial tempat para buruh beraktivitas dan tinggal.

Relasi di antara kedua lingkungan tersebut amat sangat penting dalam menunjang seorang buruh yang mencoba bertahan hidup dalam konteks industrial. Di dalam kedua wilayah itu, kaum buruh juga membangun basis relasi sosial bernuansa primordial. Mereka biasanya memanfaatkan modal sosial tersebut untuk mencari lapangan kerja baru, tempat indekos, memasukkan saudara atau kerabat ke perusahaan tertentu, dan lain-lain.

Bisa dibilang, hampir semua relasi sosial itu berkarakter pragmatis dan terkait erat dengan realitas hidup sehari-hari yang harus diatasi buruh dalam jangka pendek. Dalam konteks tekanan hidup yang kuat inilah relasi yang tercipta kerap tak mendukung lahirnya pemikiran kritis, jika bukan kondisi sosial yang apolitis, yang kerap menjangkiti perilaku mayoritas buruh kita.

Dalam konteks politis, rezim penguasa juga tak segan-segan memberi makna atau konotasi negatif terhadap (gerakan) buruh. Kalimat yang kerap diungkapkan penguasa, antara lain buruh itu pekerja kasar, tidak terdidik, hanya tau bahasa menuntut, berperilaku kasar, doyan demonstrasi, mogok, boikot, anti kemapanan, berhaluan “kiri”, memimpikan masyarakat “tanpa kelas”, ateis dan antiPancasila, dan seterusnya. Ujungnya, kesadaran “kritis” buruh (secara ideologis) diberangus, karena rezim penguasa lebih mementingkan para pekerja “berkarya” daripada “berpolitik”.

Meminjam analisis Gramsci, kita sering mendengar lontaran kalimat (yang cenderung hegemonik), seperti karyawan adalah pegawai kerah putih di kantor, sedangkan buruh adalah pegawai kerah biru di pabrik. Istilah buruh, bagi rezim, mungkin terdengar lebih menggigit, ideologis, dan solid. Sementara istilah karyawan lebih terdengar intelek, kalem, penurut, dan borjuis. Padahal, hakikat keduanya sama saja. Keduanya sama-sama dihisap, diperas, dan dimiskinkan pengusaha. Bedanya, hanya teknik pemanjaan dan pemberian fasilitas. Tak heran, manajemen sering bersikap keras terhadap buruh, meskipun hakikatnya si

manajer atau asisten manajer juga buruh; yang bekerja dan mendapat upah dari si pengusaha (hal. 45).

Realitas Sosial

Kerasnya tuntutan hidup yang dihadapi buruh memaksa kaum buruh membangun modal sosial untuk menghadapi segala masalah tuntutan kehidupan sehari-hari mereka ketimbang menyelesaikan secara tuntas problem relasi industrial yang eksploitatif itu. Pragmatisme untuk bertahan hidup di lingkungan industrial justru yang mendorong mereka untuk membangun dan memperluas relasi sosial di luar kelompok utama (kaum buruh). Relasi itu akan difungsikan pada kondisi tertentu, misalnya, saat terkena pemutusan kontrak kerja, mengalami keguguran, ketika berjualan minuman-makanan, dan sebagainya.

Bagi buruh, membangun dan memperluas relasi di luar kelompok utama adalah langkah pragmatis yang jauh lebih penting ketimbang “menemukan” kesadaran kelas (politik) dari materi-materi pendidikan dan pelatihan. Mereka memakai “cara” itu mengingat pabrik/perusahaan cenderung menghambat dan membatasi ruang gerak mereka dalam membangun dan mengembangkan modal sosial di lingkungan kerja.

Namun, buruh mampu menyalahi hambatan-hambatan itu. Peluang untuk membangun modal sosial melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh aktivis perburuhan justru lebih menguntungkan mereka secara sosial. Corak produksi industrial dan tekanan budaya patriarki serta persentuhan langsung dengan konsumerisme memang telah melunturkan “kesadaran kelas” buruh (perempuan). Namun demikian, muncul semacam “kesadaran pragmatis” kaum buruh untuk memanfaatkan wahana organisasi guna memenuhi sebagian dari kepentingan mereka.

Apakah “kesadaran pragmatis” memengaruhi perilaku atau orientasi politik? Jika ditinjau berdasarkan “jumlah suara”, identifikasi partai politik, deskripsi ideologi, perilaku dan kebijakan atau evaluasi peraturan ekonomi-politik, memang sangat minimal. Bahkan, dalam momentum politik seperti pemilihan umum, buruh tidak terlalu menghiraukan kekuatan hak suara untuk setidaknya menginisiasi keberadaan mereka dalam realitas sosial politik Indonesia. Memilih “Golput” atau “Boikot” dinilai tidak efektif karena

dampaknya tidak menyentuh langsung kepentingan buruh. Politik kelas buruh tidak dapat lagi diidentifikasi sebagai bagian dari kehidupan politik mereka atau untuk kelas itu sendiri. Imajinasi mereka telah melintasi batas kelas-kelas lain. Misalnya, kita dapat menemukan aspirasi yang sama persis dalam gaya hidup buruh dan kelas menengah. Artinya, sebagai bagian dari perjuangan politik, artikulasi dan pilihan buruh tidak lagi menjadi penentu kesadaran kelas.

Borjuis dan Proletar

Setiap orang berusaha memperoleh kehidupan yang cukup. Tapi tidak semua orang menanggapinya dengan benar. Segelintir orang menyalahkannya dengan menjalankan suatu bisnis, dan berhasil. Bukan sekadar cukup, malah ia menjadi makmur dan sejahtera. Perusahaan berkembang pesat dan diperkuat sistem. Kita kenal mereka sebagai kelas borjuis.

Kita mulai berhubungan dengan kelas borjuis ketika bekerja di perusahaan mereka. Sebelumnya, kita tak tahu apa itu jam kerja, peraturan kantor, pengupahan, serikat buruh. Diterima bekerja saja sudah syukur (hal. 63).

Ternyata dunia yang kita hadapi tidak sesederhana yang kita kira. Kenyataan berbicara lain. Selalu saja ada sekelompok manusia yang ingin menguasai manusia lain dan berupaya mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Mereka tidak membiarkan hak istimewa dan kapital mereka beralih kepada kelompok lain. Siapakah mereka? Kaum borjuis, pemilik perusahaan. Tentu saja ada kelompok lain yang tertindas. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk hidup normal. Keringat mereka diperas demi kepentingan kelompok mapan. Kelompok tertindas ini disebut proletar. Kita, buruh, masuk dalam kelompok ini.

Pemilik perusahaan hanya tahu kewajiban produksi. Pelanggaran quota berakibat pada pemutusan kontrak kerjasama dengan perusahaan pemberi order. Pemilik menyerahkan sistem produksi kepada manajemen. Manajemen menginstruksi bawahannya yang kemudian mengawasi buruh di hierarki terbawah dengan ketat. Peraturan perusahaan membuat buruh tidak punya waktu senggang. Manajemen menilai, waktu senggang buruh adalah pemborosan karena waktu senggang = tidak bekerja = tidak ada uang masuk ke kas perusahaan. Selama bekerja buruh dilarang

mengerjakan segala aktivitas yang tidak terkait dengan perusahaan. Profit oriented membuat mata hati mereka tertutup. Buruh dibatasi untuk kencing, buang hajat, sembahyang, melahirkan, makan, dll. Terlalu lama di toilet dapat berimplikasi pada pemotongan honor.

Hegemoni bisa juga terjadi pada komunikasi. Di perusahaan, komunikasi adalah bahasa lain dari instruksi. Tidak ada obrolan dua arah yang sejajar. Semuanya monolog. Komunikasi yang macet secara lambat laun akan merusak dinamika kerja. Berikut adalah contoh bagaimana hegemoni masuk dalam komunikasi antarburuh.

Giliran Hegemoni

Sebuah teori mengatakan, titik puncak penghisapan adalah perlawanan kaum tertindas melawan kelas penindas. Binatang saja menggigit bila disakiti. Apalagi manusia. Membangkitkan satu revolusi itu mudah. Menyulut kerusuhan sosial tidak sulit. Apalagi mengajak kaum tertindas yang sakit hati jiwa dan raga. Sebagian besar orang miskin yang kelaparan rela menyerbu toko makanan. Mereka hanya punya dua pilihan: makan atau mati. Mereka melawan kelompok borjuis dengan sepenuh hati, dengan segenap kebencian dan selaksa sumpah serapah (hal. 66).

Setelah semua ini terjadi, lalu apa? Ketika kelas borjuis runtuh, berkuasalah kaum proletar yang menaikkan harkat dan martabat kaum tertindas. Kekuasaan milik rakyat dan akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Begitulah slogan awalnya. Benarkah?

Perlu dipahami, perilaku seseorang adaptif dengan situasi dan kondisi. Kaum proletar berteriak anti kemapanan karena mereka belum mencicipi hidup mapan dengan kekuasaan dan harta berlimpah. Setelah mereka merebut singgasana kaum borjuis, perilaku mereka pun tidak ubahnya seperti kelas yang mereka runtuhkan itu. Jadilah pemerintahan diktator proletar. Kadangkala mereka memobilisasi dan mengatasnamakan masyarakat sebagai afirmasi. Revolusi tanpa batas membuat mereka menggunakan hukum semaunya dan mengenyampingkan hak-hak asasi manusia.

Artinya, perubahan kelas tidak menandakan berakhirnya ritus penindasan. Hegemoni ditandai oleh sakralisasi atau penambahan suatu nilai atas suatu realitas yang dilakukan oleh struktur atas, kelas mapan, kepada struktur rendah, kelas yang rapuh. Tujuannya,

menaikkan posisi tawar sekaligus melemahkan perlawanan dan gugatan dari pihak struktur rendah (hal. 67).

Dengan suatu cara tertentu, penguasa mengkondisikan bahwa apa-apa yang mereka lakukan bernilai benar, kuat, wajar, dan tentu saja sakral. Penguasa dapat memaksimalkan rantai birokrasi yang panjang untuk mengendurkan perlawanan, sekaligus menyedot uang masyarakat. Mereka tidak peduli berapa inefisiensi biaya akibat birokrasi yang panjang, asalkan tercipta stabilitas politik. Untuk mereduksi perlawanan, pengusaha juga membangun sentra-sentra kegiatan dan komunitas, sehingga aspirasi dapat teredam dengan sendirinya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan aparat untuk memberikan tekanan psikologis dan fisik kepada siapa pun yang mencoba beroposisi.

Proses hegemoni yang berlangsung secara terus-menerus menghasilkan tradisi hegemonik yang akan berjalan otomatis. Mekanisme pengawasan dijalankan oleh swadaya masyarakat sendiri. Setiap orang merasa punya kekuasaan. Itulah mengapa hansip penjaga acara resepsi di perkampungan berlagak seperti penguasa wilayah. Tidak sembarangan orang melewati jalan itu tanpa seizinnya.

Hegemoni Perusahaan

Hegemoni juga terjadi di dalam perusahaan. Sejak pertama kali masuk kerja, seorang buruh baru ditanamkan rasa hutang budi kepada perusahaan tersebut. Rasa syukur Buruh tidak akan menuntut hak-haknya yang wajar. Segala bentuk aturan dimaknai sebagai konsekuensi yang mesti diterima dan dijalani. Alasan lazimnya, "Masih untung saya masih diterima bekerja di tempat ini" (hal. 68).

Dengan kondisi 'menang sebelum bertanding', perusahaan lapang hati mengeksploitasi waktu-waktu produktif buruh. Manajemen memberi wejangan tentang indahnya bekerja yang tulus dan giat tanpa menuntut pamrih. Bekerja tanda ketaatan pada kontrak karya. Sedangkan "pamrih" (baca: gaji, tunjangan, bonus) murni kebaikan manajemen.

Sehingga tidak ada pelanggaran kecuali kesalahan buruh. Setiap saat buruh dituntut untuk produktif. Pada saat yang sama perusahaan tidak mau tahu bagaimana buruh mencapai prestasi tersebut. Manajemen menilai, menunjukkan kebaikan tanda kelemahan. Buruh tidak boleh dikasihani. Buruh memang dibayar untuk

diperas dan dimaki. Mengeluh terhadap sistem kerja yang eksploitatif? Manajemen malah menambah dan memperberat aturan. Hukuman dianggap sebagai solusi, bukan dialog untuk mendapatkan saling pengertian.

Demi menghindari dari hukuman sekaligus menimba iba, individu buruh mendekati atasan secara pribadi. Dengan menjalin hubungan privat, diharapkan bukan saja jaminan pekerjaan, buruh malah memperoleh fasilitas dan hadiah. Buruh yang menjilat cenderung mementingkan diri sendiri. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan nasib rekan-rekan yang lain. Tentu saja manajemen sangat menanti kondisi ini. Dengan komunikasi *fait-accompli*, manajemen mudah mengadu domba antarburuh.

Pecah Belah

Hidup perusahaan bergantung pada jalannya mesin dan ketaatan buruh. Bila roda mesin berhenti berputar, kerugian terbesar niscaya diderita perusahaan. Perusahaan menyadari betul efek yang akan terjadi jika buruh punya serikat dan ideologi yang solid. Mereka punya banyak sarana untuk memecah belah soliditas buruh. Mulai dari pendekatan persuasif, membujuk, menawarkan hadiah, uang, hingga jabatan kepada tokoh buruh, hingga kampanye busuk kepada antarburuh agar curiga-mencurigai (hal. 69).

Demi menghindari pergolakan yang merusak citra dan mengurangi laba perusahaan, pihak manajemen menyediakan ruang pelepas stres dengan membangun berbagai sarana kesenian, olahraga, hingga program rekreasi. Diharapkan muncul rasa sayang dan toleran yang tinggi terhadap perusahaan. Efeknya, para buruh kembali menunjukkan produktivitasnya.

Bila masih ada ketidakpuasan atau bentuk protes yang lain, manajemen melokalisir isu sebagai problem pribadi, bukan problem sosial. Ketika ada aksi demonstrasi menuntut perbaikan sistem, perusahaan menyiasati dengan cara lain. Alih-alih menolak mentah-mentah tuntutan buruh, pihak manajemen mendukung aksi tersebut dengan memberikan fasilitas dan bantuan keuangan agar demo tersebut kelihatan menarik dan tidak anarkis. Pada titik inilah perusahaan berhasil memandulkan gerakan buruh.

Tetesan Hegemoni

Bukankah serikat buruh di perusahaan

menyuarakan aspirasi? Benar, selama pengurusnya aktif dan punya visi. Bila tidak, serikat hanyalah tempat *kongkow* segelintir elite buruh yang menghambur-hamburkan iuran anggota dengan tujuan yang tidak jelas. Amatilah demonstrasi buruh. Kalangan awam melihatnya sebagai perlawanan kaum sosialis. Tapi alam bawah sadar pelaku demonstrasi mungkin berkata, demonstrasi tiada lain ekspresi kebingungan, semacam krisis identitas dari sekelompok buruh. Ia ikut demo karena tidak enak hati kepada rekan-rekannya, atau ingin masuk televisi, atau ingin keluar dari rutinitas kerja. Tentu, sesuai harapan kita semua, lebih banyak lagi buruh yang bergerak dengan tulus karena kesadaran ideologisnya.

Tindakan kita berbeda dengan penilaian orang kebanyakan. Orang-orang sekadar melihat ekspresi permukaan kita. Tapi penilai yang sejati ada pada nurani kita sendiri. Dengan perspektif ini, sebuah aksi demonstrasi tidak menghancurkan neoliberalisme atau praktik kapitalisme di korporasi, tapi justru sebuah upaya pencitraan dan pernghargaan atas praktik kapitalisme. Dengan istilah lain, gerakan buruh yang tidak peka sosial dikondisikan oleh perusahaan atau negara zalim untuk memperkuat mekanisme penindasannya.

Antonio Gramsci mengatakan, supremasi kelompok atau kelas sosial muncul dengan dua cara, yaitu: penindasan (*coercion*) dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni. Hegemoni bisa dijalankan oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Praktik hegemoni tidak dimonopoli oleh satu kekuatan melainkan bergradasi dan menyebar ke struktur sosial lain.

Di hadapan penguasa, buruh objek hegemoni, Namun di hadapan keluarganya, buruh pelaku hegemoni. Di pasar, istri kita terhegemoni pedagang. Di jalan raya, pelaku hegemoni bisa supir bis, pedagang yang menghampar dagangan di trotoar, bahkan pengojek motor yang menerapkan tarif sesukanya. Namun kita ketahui bahwa pusat hegemoni dunia ada pada kapitalisme.

Bebas Hegemoni

Menghilangkan hegemoni tidak bisa dengan mengemis belas kasihan atau melakukan sesuatu untuk memancing rasa iba. Tidak ada pelaku hegemoni yang

sudi melepaskan kekangan hegemoninya. Apalagi bila ia telah banyak berinvestasi untuk meraih posisi sedemikian. Membongkar segala hal yang menradisi, mapan dan baku perlu sebuah keberanian serta dasar bagi suatu perubahan yang lebih besar. Apalagi ketika ia berhubungan dengan sistem dan struktur kekuasaan (politik) Indonesia yang potensial untuk menindas.

Bagi buruh, membongkar sistem hegemoni mengacu pada sistem dan budaya perusahaan. Penindasan yang berlangsung terus menerus membuat buruh menjadi imun pada perubahan. Mental buruh rusak. Mereka semakin takut menjauh dari perusahaan. Mereka lebih mendamba disakiti daripada lepas sama sekali dari perusahaan (hal. 72).

Tali penindasan akan mengendur bila buruh membongkar segala sakralitas budaya yang tidak mempunyai argumentasi kuat antara perusahaan dengan dirinya. Pembongkaran ini diawali dengan menaikkan terlebih dahulu posisi tawar buruh dalam hal pengetahuan dan ketrampilannya. Dengan memperkuat nilai tambah, barulah buruh mampu berhadapan secara terhormat *vis-a-vis* superstruktur, dalam hal ini korporasi dan negara.

Buruh harus membongkar mental mindernya. Perusahaan biasanya menunjukkan kepongahannya dengan memamerkan segala kemewahan duniawi untuk membuat minder negosiator buruh. Dengan membongkar mental materialistiknya, buruh tidak silau dengan segala fasilitas dan gaya hidup yang ditawarkan (baca: disogok) oleh perusahaan. Karenanya, buruh menguatkan solidaritas untuk memutus rantai hegemoni itu bersama-sama. Serikat buruh menampilkan diri sebagai kelas yang layak diperhitungkan sehingga manajemen tidak memandang kita dengan sebelah mata.

Merajut Ideologi

Mengutip Deepak Chopra (dalam *The Imorality of the Free Market*), Andito menjelaskan, "Ada keterputusan antara moralitas publik dan individu. Apa yang korporasi dan pemerintah lakukan (pembangkutan dana pensiun masyarakat, pembunuhan massal) tak terpikirkan oleh individu. Segelintir masyarakat berhasil menjembatani kesenjangan ini. Satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan hanyalah kesadaran yang merata.

Ketika Anda dihadapkan pada sebuah pilihan

moral yang sulit, pilihan Anda muncul secara intuitif: apakah memilih kekerasan ataukah melawan kekerasan. Dalam tataran yang lebih luas, hal ini tidak menandai perbedaan antara baik dan buruk. Ia menandai tahapan-tahapan evolusi bahwa kesadaran senantiasa menembus dan terus berlanjut".

Kita, sebagai buruh, sadar bahwa nasib kita lebih dekat ke buntung daripada untung. Kita tidak punya masa depan yang jelas karena rekening kita nol. Gaji yang kita terima amblas dalam hitungan hari. Tengah bulan, kita antri kasbon ke bagian keuangan atau pinjam uang di koperasi. Buruh laksana pekerjaan determinan, sekadar mengisi waktu hingga ajal menjemput kita. Profesi ini memang tidak membanggakan (hal. 60).

Dalam banyak kasus, perusahaan mengondisikan ketertindasan sebagai takdir inheren dalam kehidupan buruh. Kalimat "buruh" dan "tertindas" seakan menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Sayangnya, tokoh-tokoh agama yang tidak terlalu memahami semak belukar perburuhan juga kerap tak bergeming, jika bukan mengamini berbagai pendindasan sistemik dan struktural yang kerap dihadapi kaum buruh.

Alih-alih menarik tangan buruh dari kubangan penindasan, mereka memberi petunjuk tentang indahnya kebersamaan (bersama penguasa), indahnya hidup sederhana (dengan gaji yang minim), dan indahnya kesabaran (ditindas terus menerus). Tak heran, jika fokus utama perusahaan sejak era Revolusi Industri lalu adalah membangun sebuah sistem kerja yang membuat buruh mengalami kelumpuhan kesadaran kelasnya.

Bagaimana gerakan buruh dan serikat buruh bisa berkembang dan bertahan ditengah kondisi saat ini yang kian tak menentu? Rolando Munck dalam *Globalization and Labour; the New "Great Transformation"* (2002), setidaknya memberi jawaban hipotetis. Menurut Munckm, di tengah kompleksitas persoalan serikat buruh, gerakan buruh perlu menciptakan prasyarat-prasyarat bagi kemunculan globalisasi "dari bawah" □ (*globalization from below*).

Munck berkesimpulan bahwa globalisasi dari bawah dipahami sebagai suatu gerakan-tandingan yang bermuasal dalam bagian-bagian yang beragam dalam kemasam isu-isu yang berbeda. Globalisasi dari bawah terfokus pada persoalan strategi-strategi hirarkis dengan menempatkan kualitas khusus untuk tindakan-tindakan dari bawah. Sebaliknya globalisasi dari atas adalah pola globalisasi yang memungkinkan adanya

intervensi pihak-pihak seperti WTO dan sejenisnya.

Munck berpendapat bahwa dalam menghadapi globalisasi Korporasi, serikat buruh perlu melakukan apa yang disebut dengan gerakan serikat buruh Globalizing. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam membangun ini adalah: (1) melibatkan serikat buruh dalam gerakan buruh internasional agar dapat berperan sebagai suatu gerakan sosial yang dapat bermutasi, bertransformasi dan berregenerasi; (2) pada level internasional membangun isu utama dalam *term-term* pembaruan buruh adalah kemunculan dari suatu makna baru tentang solidaritas global; dan (3) pada level nasional serikat buruh hendaknya mampu mengatasi pembagian-pembagian dalam kelas pekerja untuk mencapai suatu “model” alternatif bagi organisasi produksi.

Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah dengan kondisi serikat buruh di Indonesia sekarang, serikat buruh akan mampu melakukan hal di atas? Walau dengan sedikit pesimis dengan kondisi yang ada sekarang akan tetapi usaha yang sudah dilakukan untuk membangun gerakan buruh yang lebih massif.

Permasalahan kesadaran buruh yang masih rendah selalu menjadi kambing hitam bagi sebagian pengurus serikat buruh. Rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan program-program yang dilakukan oleh serikat buruh menjadi pembenaran atas rendahnya kinerja organisasi, dan sebagainya yang secara umum menyalahkan posisi anggota serikat dan rendahnya kesadaran... bagi saya hal ini menunjukkan ketidakmampuan pengurus serikat dalam mengelola organisasi dan memenuhi mandat yang diberikan oleh anggotanya kepada para pengurus.

Pada beberapa diskusi yang dilakukan bahwa salah satu hambatan dalam proses membangun gerakan buruh yang massif adalah dikarenakan bahwa oligarki (kekuasaan yang hanya pada sekelompok orang) yang terjadi diserikat buruh begitu sangat kuat. Elite serikat buruh, terutama di serikat buruh kuning menjadi penghambat dalam proses radikalisasi gerakan buruh. Yang kedua adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh serikat buruh tidak terjadi secara sistematis. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak anggota jarang sekali diadakan, kalau pun ada berkembang ke arah komersialisasi. Dan permasalahan yang ketiga adalah tidak adanya solidaritas antar serikat buruh di Indonesia. Dalam beberapa pengalaman di lapangan

banyak serikat buruh yang saling menganggap serikat buruh lainnya lebih jelek, fanatisme dan stigmatisasi begitu kuat diantar elemen gerakan buruh yang ada.

Sebab lain yang kerap mengandaskan tuntutan para buruh dan organ serikat buruh dalam proses artikulasi tuntutan politik—sejak Orde Baru hingga rezim reformasi saat ini—adalah keberpihakan negara yang keterlaluan pada penguasa (borjuasi lokal) dan modal global. Realitas ini berdampak sistemik. Keterlibatan dan advokasi para aktivis serikat buruh yang melakukan kerja-kerja politik pembebasan dalam kerangka representasi kepentingan buruh menjadi tak efektif bukan hanya karena tak sensitifnya dan apolitisnya birokrasi kita, namun lebih dari itu, mesin birokrasi telah dirancang sebagai “penghalang” bagi seluruh tuntutan buruh.

Perjuangan menegakkan hak-hak buruh sepertinya masih buruh waktu panjang. Gerakan buruh perlu terus melakukan uji coba-uji coba untuk mematangkan ideologi, flatform, konsep, maupun strategi perjuangan. Dalam jangka panjang, latihan itu mungkin akan kian mematangkan proses penyusunan kekuatan politik yang berkarakter kelas pekerja secara konkret guna menggali dan memobilisasi setiap potensi kekuatan yang ada dalam gerakan buruh; yang bertumpu pada satu kesadaran, bahwa perjuangan buruh harus didasarkan pada kekuatan gerakan massa kaum buruh sendiri.

Itulah yang kita dambakan. Tapi, apakah semua renungan ini benar? Mungkinkah kita terhegemoni oleh struktur elite dalam lapisan buruh sendiri? Atau, kitakah pelaku hegemoni selama ini? *Wallahualam Bis'sawab.* ■

L A U N A,

*Staf redaksi Jurnal Sosial Demokrasi;
pengajar Ilmu Politik pada FISIP
Universitas Satya Negara Indonesia*

wan oji sudah pindah rumah



Judul Buku : wan oji sudah pindah rumah
Penyunting : Nurhady Sirimorok, Puthut EA
Penerbit : Remdec
Cetakan : pertama, Januari 2010
Tebal : 131 halaman

Ketika membaca judul buku *Wan Oji Sudah Pindah Rumah*, ada pertanyaan menggelitik yang muncul dalam benak saya “Sebegitu hebatkah seorang wan oji sehingga pindahan rumahnya harus didokumentasikan menjadi sebuah buku?”. Namun ternyata, yang dimaksud dengan “pindahan rumah” dalam buku itu bahwa Wan Oji, aktivis gerakan buruh yang konsisten selama puluhan tahun, telah berpulang. Pindahan rumah yang dimaksudkan dalam judul buku itu adalah kepindahan Wan Oji dari rumahnya yang fana menuju ke rumahnya yang baru. Kita berharap rumahnya yang baru tersebut lebih indah dan asri. Sebagaimana dituliskan oleh penyunting buku ini, “Wan Oji sudah pindah rumah. Di rumahnya yang sekarang, kami membayangkan, ada beranda yang sejuk dengan beragam bunga yang tertata rapi, tempat ia menyepak secangkir kopi. Di depan beranda itu, ada empang besar yang penuh ikan. Di dekat empang itu, ada kandang kambing yang dikelilingi oleh pohon durian. Ia bertetangga dengan Mansour Fakih. Mereka sering masak dan makan bersama. Sese kali, mereka berdua saling melempar canda dari jendela. Mereka berdua, bahagia”.

Buku *Wan Oji Sudah Pindah Rumah* bertutur tentang aktivis gerakan buruh, Fauzi Abdullah, dari teman-teman dan juga kolega yang secara intens ataupun hubungan sepintas yang memberikan kesan mendalam. Dalam buku ini, kita akan menemukan tulisan orang-orang hebat sebagaimana sosok yang coba digambarkan dalam hampir setiap tulisan buku ini seperti Vedy R. Hadiz, Daradjatun Koentjarajakti, Riwanto Tirtosudiro, Wiladi Budiharga, Syvia Tiwon, dan masih banyak lagi. Ada kurang lebih 26 tulisan, belum termasuk kata pengantar penyunting dan tulisan penuh emosional dari sang istri, Dwi.

Sebagai sebuah buku yang bisa dikatakan untuk mengenang sosok Wan Oji, keseluruhan tulisan ini tidak bisa dilepaskan dari ekspresi penuh kagum dari para penulis yang ada dalam buku ini. Sosok Wan Oji yang

sederhana atau aktivis yang konsisten dan menjauhi dunia hingar bingar selebritas sebagai aktivis dengan mudah ditemukan dalam tulisan buku ini. Namun, tentu saja, menjadi kurang menarik membahas sebuah buku jika kita berpaku pada “pengagungan” atas sosok yang coba digambarkan oleh penulisnya. Meskipun tetap harus kita catat bahwa, sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan buku ini, seorang sosok Fauzi Abdullah. Aktivis gerakan buruh yang sederhana, dengan kaos oblong dan celana bahan yang keduanya sering terlihat robek-robek atau terkesan kumal dengan sandal jepit yang selalu dipakainya kemana-mana (hal. 35). Kita juga sepakat bahwa Wan Oji adalah, menurut ungkapan Riwanto Tirtosudiro, “seorang *engaged intellectual*, yang tak ragu untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik demi meningkatkan harkat hidup rakyat”. Wan Oji, menurut Tirtosudiro, adalah contoh dari *concerned and committed intellectuals* (hal. 43).

Kenangan akan sosok yang kita kagumi acapkali memang mendorong pengagungan semacam itu, dan ini merupakan hal yang sangat wajar. Namun, yang tidak kalah penting dari usaha mengenang semacam itu adalah melihat dan mendiskusikan kembali pemikiran-pemikiran dan gagasan sang sosok. Ini penting karena dengan cara semacam itulah kita bisa belajar, generasi berikutnya bisa belajar mengenai apa yang menjadi *concern*, dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Jika awal perubahan berangkat dari gagasan atau pemikiran, maka mendiskusikan pemikiran menjadi sedemikian penting. Menariknya, meskipun buku ini ditulis oleh banyak orang bahkan bisa dikatakan terlalu banyak untuk buku setebal 131 halaman, tapi masih bisa kita temukan gagasan Fauzi Abdullah yang bisa kita serap, dan jika mungkin kita implementasikan dalam gerakan.

Ada beberapa pemikiran penting Fauzi Abdullah yang layak didiskusikan kembali meskipun, bagi banyak orang, pemikiran itu tidak orisinal. Semua orang di

gerakan buruh barangkali sudah paham mengenai subjek atau objek yang dibicarakan. Namun, setidaknya, pemikiran itu berangkat dari suatu paradigma tertentu. Suatu cara pandang (*worldview*) bagaimana seharusnya setiap persoalan dipecahkan.

Ada beberapa gagasan Wan Oji yang bisa ditangkap dalam buku ini, yakni pengorganisasian buruh dan pendidikan (politik) buruh. Menurut Wan Oji (lihat tulisan Fauzan dalam buku ini), serikat buruh hendaknya dibangun oleh orang-orang buruh sendiri dengan syarat utama bahwa serikat tersebut harus demokratis dan anggota-anggotanya terpolitisasi (dalam arti luas) sehingga justru orang-orang di dalam serikatlah yang bertugas untuk melakukan pengorganisasian, pendidikan dan penguasaan diri sendiri. Fungsi LSM atau elemen lain hanya bertindak sebagai supporting system, memberikan hal-hal yang memang belum dapat dikerjakan oleh serikat buruh. Tentu saja, mengubah dan membangun hal ini tidaklah mudah, terlebih proses politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Kita memerlukan waktu yang sangat panjang, dan oleh karena itu diperlukan suatu pendidikan politik. Sebagaimana dikutip kembali oleh Fauzan dalam buku ini, "Membuat orang marah (provokasi) lebih mudah, dan membangun kekuatan yang instan tidaklah menjawab persoalan karena serikat akan rentan hancur dalam waktu singkat bila tidak dipersiapkan dan dibangun dengan sungguh-sungguh". Kesadaran buruh dalam kaitan ini menjadi pokok dari terbangunnya kekuatan buruh (hal. 33). Oleh karena itu pula, barangkali, Fauzi Abdullah kurang menyarankan adanya mogok besar-besaran. Mogok boleh dilakukan jika memang diperlukan. Makanya, seperti dicatat Vedy R. Hadiz, banyak aktivis buruh mulai mengkritik posisi atau strategi politiknya. Ia dianggap terlalu moderat dan sering menurunkan semangat militansi buruh dengan nasehat dia untuk betul-betul bersiap sebelum mengambil posisi konfrontatif terhadap

pemodal atau negara (hal. 64).

Dalam pemahaman Fauzi Abdullah, cara memperjuangkan hak-hak buruh tidak selalu harus melalui aksi mogok (Fahmi Panimbang, hal. 78). Meskipun ia menyadari bahwa serikat buruh harus dengan kuat melawan tidak hanya pengusaha yang nakal dan kejam, tapi juga kapital global yang serakah. Namun, serikat buruh harus memiliki strategi penuh pertimbangan. "Aksi-aksi mogok yang besar memang diperlukan, tapi seharusnya diperhitungkan dengan matang karena kadang-kadang malah berujung pada PHK bagi banyak buruh. Oleh karena itu, perlu kecakapan mobilisasi sumber daya agar aksi mogok berpengaruh kuat dan risiko PHK dapat diatasi dengan tersedianya dana bagi korban PHK. Dengan cara demikian, maka orientasi gerakan buruh mestinya lebih bersifat jangka panjang. Untuk itu, ada dua komponen yang harus dipersiapkan bagi keberhasilan konsolidasi gerakan buruh, yakni struktur gerakan dan kapasitas teknis maupun intelektual. Struktur gerakan meliputi institusionalisasi, dokumentasi pengalaman, dan pembangunan jaringan untuk kerja sama yang lebih panjang demi memperbesar ruang aktualisasi politik gerakan buruh. Sementara komponen kedua, penting sebagai usaha bahwa buruh mestinya menjadi aktor yang memainkan peran-peran kunci dalam gerakan.

Gagasan-gagasan itulah yang barangkali bisa kita diskusikan atau setidaknya menjadi pengingat atas agenda gerakan buruh itu sendiri. Selebihnya, gagasan dalam tulisan lebih banyak menghadirkan sosok Fauzi Abdullah sebagai "guru kehidupan" yang sederhana dan konsisten dalam perjuangannya. ■

Puji Rianto,
Jurnal Sosial Demokrasi.

"Membuat orang marah (provokasi) lebih mudah, dan membangun kekuatan yang instan tidaklah menjawab persoalan karena serikat akan rentan hancur dalam waktu singkat bila tidak dipersiapkan dan dibangun dengan sungguh-sungguh".

“Sosialisme yang demokratis bukanlah sebuah konsep yang tertutup dari ide-ide baru tentang penciptaan hubungan kemasyarakatan (...). Tetapi keyakinan fundamental yang terus berkembang ini didasarkan pada suatu filsafat hidupbersama yang berasaskan kebebasan, kemanusiaan, negara hukum, dan keadilan sosial”

Willy Brandt (1913 – 1992)





“Kebebasan dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Kebebasan hanya dapat berkembang dalam sistem pemerintahan yang stabil. Tugas pertama bagi mereka yang menghargai kebebasan adalah dengan melindunginya, dan bilamana ada pelanggaran, mengembalikannya.”
(Friedrich Ebert , 1919)

